



*Sejarah Kerajaan Tradisional*  
**SURAKARTA**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
JAKARTA  
1995

Milik Depdikbud  
Tidak diperdagangkan

# **SEJARAH KERAJAAN TRADISIONAL SURAKARTA**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
JAKARTA  
1999**



## **SEJARAH KERAJAAN TRADISIONAL SURAKARTA**

**Tim Penulis** : Dwi Ratna Nurhajarini  
Tugas Triwahyono  
Restu Gunawan

**Penyunting** : Restu Gunawan

**Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang**

**Diterbitkan oleh** : Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional  
Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal  
Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

**Jakarta 1999**

**Edisi 1999**

**Dicetak oleh** : **CV. ILHAM BANGUN KARYA**

**ISBN 979-9335-01-9**

## **SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN**

Karya-karya sejarah dengan berbagai aspek yang dikaji dan ditulis melalui Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (Proyek IDSN), dimaksudkan untuk disebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan bahan informasi kesejarahan kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan banyak pihak akan menambah pengetahuannya tentang sejarah, baik yang menyangkut akumulasi fakta maupun proses peristiwa. Di samping itu, para pembaca juga akan memperoleh nilai-nilai kesejarahan, baik mengenai kepahlawanan, kejuangan, maupun perkembangan budaya yang terungkap dari paparan yang terdapat dalam karya-karya sejarah itu.

Kami menyadari bahwa buku-buku karya Proyek IDSN itu tidak luput dari berbagai kelemahan: isi, bahasa, maupun penyajiannya, namun kami meyakinkan pembaca bahwa kesalahan dan kelemahan itu tidaklah disengaja. Untuk itu, diharapkan kepada pembaca untuk memberikan kritik, saran perbaikan terhadap karya-karya Proyek IDSN ini. Kritik dan saran itu tentu akan sangat berguna untuk memperbaiki karya-karya proyek ini.

Kepada para penulis yang telah menyelesaikan tugasnya dan kepada semua pihak yang ikut serta, baik langsung

maupun tidak langsung dalam mewujudkan karya-karya  
Proyek IDSN sebagaimana adanya ditangan pembaca,  
kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, Juli 1999  
Direktur Jenderal Kebudayaan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'IGN. Anom', written over a horizontal line.

**IGN. Anom**  
**NIP. 130353848**

## PENGANTAR

Buku *Sejarah Kerajaan Tradisional Surakarta* merupakan salah satu hasil pelaksanaan kegiatan penulisan yang diselenggarakan oleh Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1999/2000.

Buku ini memuat uraian tentang konsep tradisional yang mengacu kepada bentuk dan ciri-ciri lokal serta aspek-aspek yang bercorak agraris yang telah lama ada pada kerajaan-kerajaan tradisional Surakarta.

Penerbitan buku ini dimaksudkan untuk melengkapi penulisan tentang kerajaan-kerajaan tradisional yang telah diterbitkan oleh Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

Dengan terbitnya buku ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kesejarahan dan memberikan informasi yang memadai bagi masyarakat terutama generasi muda yang berminat serta memberi petunjuk bagi kajian selanjutnya.

Jakarta, Juli 1999

**Pemimpin Proyek Inventarisasi dan  
Dokumentasi Sejarah Nasional**



**Wiwi Kuswiah**  
NIP. 131125902

## DAFTAR ISI

	Halaman.
<b>Sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan .....</b>	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ix</b>
<b>Bab I    Pendahuluan</b>	
1.1    Pengantar .....	1
1.2    Permasalahan .....	2
1.3    Tujuan .....	2
1.4    Ruang Lingkup .....	3
<b>Bab II   Keadaan Umum Daerah</b>	
2.1    Lingkungan Geografis .....	7
2.2    Lingkungan Fisik Kraton Surakarta .....	12
2.3    Stratifikasi Sosial Masyarakat .....	27
<b>Bab III  Kerajaan Mataram Surakarta</b>	
3.1    Hubungan Kerajaan Majapahit, Demak, Pajang, Mataram .....	55
3.2    Perpindahan Pusat Kerajaan Mataram Kartasura ke Surakarta .....	68
3.3    Palihan Nagari (Perjanjian Giyanti) .....	85
<b>Bab IV  Kasunanan Surakarta Adiningrat Pada Abad           18-19</b>	
4.1    Pemerintah .....	105
4.2    Dominasi Kekuasaan Kolonial .....	121

4.3	Reaksi Terhadap Dominasi Kekuasaan Kolonial ....	131
4.4	Hubungan Antara Kasunanan Surakarta Adiningrat Dengan Kerajaan Lainnya di Jawa .....	138
4.5	Ekonomi dan Perdagangan.....	143
<b>Bab V.</b>	<b>Kasunanan Surakarta Adiningrat Awal Abad 20</b>	
5.1	Sistem Pemerintahan .....	155
5.2	Surakarta Pada Masa Pergerakan Nasional ....	170
5.3	Perkembangan Dalam Bidang Kebudayaan dan Pendidikan .....	179
<b>Bab VI</b>	<b>Kesimpulan .....</b>	<b>189</b>
<b>Daftar Pustaka</b>	<b>.....</b>	<b>193</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *1.1 Pengantar*

Sebagai upaya untuk memahami sejarah Indonesia yang mencakupi kurun waktu panjang dan berdimensi banyak, kiranya dapat disederhanakan dengan mengkategorisasikan menjadi 3 perkembangan: Masa Kerajaan Tradisional, Masa Kolonial dan Masa Kemerdekaan Republik Indonesia. Pembagian ketiga perkembangan itu bukan merupakan pembabakan yang ketat. Sebab perkembangan itu di dalam prosesnya dapat berjalan secara tumpang tindih.

Konsep tradisional yang digunakan disini mengacu kepada bentuk dan ciri-ciri lokal yang telah lama berakar pada kerajaan-kerajaan di Indonesia. Pada umumnya unsur integratif kerajaan itu adalah faktor agama-agama, Hindu, Budha dan Islam. Dalam perkembangan ini kerajaan-kerajaan di Indonesia memperlihatkan proses-prosesnya sendiri yang memberikan corak Nusantara. Periode ini dapat pula disebut sebagai Masa Nusantara. Ada Corak-corak kerajaan agraris dan ada pula yang maritim atau campuran dari keduanya.

Sebagai suatu negara bangsa (nation-state), akar nation Indonesia belumlah lama. Gejalanya baru dapat diamati pada awal abad 20. Sebelum itu nation Indonesia belum dikenal. Nation lama dapat dikaitkan dengan kerajaan-kerajaan

tradisional, yang merupakan pengejawantahan secara politik suku bangsa-suku bangsa yang tiada lain dikenal sebagai nation lama itu.

Sampai sekarang *historiografi* Indonesia belum banyak yang mengkaji aspek-aspek agraris, termasuk kerajaan bercorak agraris. Salah satu dari kerajaan bercorak agraris di Indonesia adalah kerajaan tradisional Surakarta. Kerajaan tersebut memiliki sejarah yang panjang dan sekaligus merupakan kerajaan yang dapat mengintegrasikan wilayahnya terutama di daerah Surakarta sekarang. Dilihat dari perkembangan sejarah Indonesia, penting sekali untuk mengkaji periode kerajaan tradisional.

### ***1.2 Permasalahan***

1. Cara Kerajaan Surakarta untuk dapat mengintegrasikan wilayahnya
2. Faktor-faktor apa yang mendukung proses integrasi itu
3. Proses perkembangan Kerajaan Surakarta dalam menghadapi persoalan internal maupun eksternal sampai masuk ke dalam kekuasaan Kolonial

Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas tentang permasalahan pokok, kiranya masalah-masalah lain yang ada kaitannya juga perlu mendapat perhatian. Seperti misalnya mengenai "benang merah" dari Kerajaan Majapahit, Demak, Pajang, Mataram sampai Surakarta; kondisi sosial ekonominya; para penguasa; hubungan antara Surakarta dan Yogyakarta yang merupakan pewaris dinasti Mataram dan juga mengenai Kerajaan Surakarta pada masa pergerakan.

### ***1.3 Tujuan***

Penulisan ini bertujuan memaparkan bentuk dan corak Kerajaan Surakarta sebagai kerajaan tradisional dan memberikan uraian mengenai kemampuannya menjawab persoalan-persoalan baik yang datang dari dalam maupun dari luar.



Studi ini bukanlah bermaksud untuk menjelaskan secara mendetail semua kejadian yang terjadi di Kerajaan Surakarta dari awal hingga masa sekarang. Akan tetapi perhatian lebih dipusatkan untuk menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi. Dan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang permasalahan yang ada, perhatian tidak cukup diarahkan pada salah satu faktor saja. Dalam hal ini penggunaan konsep-konsep ilmu sosial akan lebih memperkuat analisis dan dapat memahami lebih dalam mengenai fenomena yang akan dijelaskan.<sup>1</sup>

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penulisan sejarah tradisional Surakarta dan tidak menutup kemungkinan untuk diadakan penelitian lebih lanjut bagi semua pihak terutama sejarawan.<sup>2</sup>

#### ***1.4 Ruang Lingkup***

Ruang lingkup pembahasan berkisar dari pemaparan cikal bakal Kerajaan Surakarta dan pengaruh Islam sampai masuk ke dalam kekuasaan Hindia Belanda. Dilihat dari jangkauan periodisasi maka akan mencakup mulai sekitar abad 15 -- awal 20. Tema pembahasan akan lebih diberikan kepada aspek politik dengan tidak mengabaikan aspek sosial dan budaya.

Sampai saat ini di Surakarta ada dua pewaris dinasti Mataram, yaitu Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran. Sehubungan dengan ini, karena kemampuan penulis yang terbatas, maka penulisan akan mengambil fokus pada Kasunanan Surakarta.

### ***Catatan Bab I***

1. Taufik Abdullah, "Ke Arah Penulisan Sejarah Sosial Daerah" dalam *Penulisan Biografi dan Kesejarahan: Suatu Kumpulan Prasaran pada Berbagai Loka Karya* (Jakarta: Proyek IDSN, 1982), hal. 160-169.
2. Karena kesalahan-kesalahan atau kurang sempurnaan hasil karya penulis sejarah yang telah ada, orang perlu menulis kembali peristiwa masa lampau. Untuk lebih jelasnya lihat T. Ibrahim Alfian, "Mengapa Penulisan Sejarah Berubah", *Makalah* pada kegiatan Ilmiah Fakultas Sastra UGM (Yogyakarta, 25-26 November 1981), tanpa halaman.

## **BAB II**

### **KEADAAN UMUM DAERAH**

#### ***2.1 Lingkungan Geografis***

Kerajaan tradisional Surakarta (Kraton Surakarta) dengan ibukotanya Sala merupakan penerus kerajaan Mataram yang didirikan Oleh Susuhunan Paku Buwana II (selanjutnya disingkat Sunan PB II) pada tahun 1746. Berdirinya Kraton Surakarta ini dapat disebut sebagai pengganti Kraton Kartasura yang telah hancur sebagai akibat dari adanya gerakan bersenjata orang-orang Cina yang berhasil memberontak dan merebut kerajaan Mataram itu.

Surakarta yang dipakai sebagai nama kraton yang baru dan tempat kediaman Sunan PB II itu bernama Sala. Setelah pindah dari Kartasura. Desa Sala kemudian diganti namanya menjadi Surakarta Hadningrat. Mengapa tempat kediaman Sunan PB II yang baru itu diberi nama Surakarta Hadiningrat? Masalah ini pernah dibicarakan oleh seorang ahli filologi Belanda, J. Brandes dalam artikelnya berjudul "Yogyakarta" (1894) yang kemudian dikemukakan kembali oleh Mr. R. Koesoemadi dalam karangannya "Soerakarta Adiningrat 200 Jaar" yang termuat dalam majalah kebudayaan "Djawa tahun 1939.

Menurut J. Brandes, Nama Surakarta ternyata merupakan nama varian atau nama alias dari Jakarta yang pada masa lalu juga disebut Jayakarta. Surakarta berasal dari gabungan kata

*Sura* berarti berani, dan *karta* berarti sejahtera. Nama Surakarta yang dipakai untuk nama kraton yang baru dimaksudkan sebagai *retisi* atau imbangan dari nama Jakarta atau Jayakarta. Sebab Sunan PB II memang mendambakan pusat kerajaan nantinya setara dengan Jakarta (Batavia) yang dapat berkembang dengan pesat terutama pada saat kompeni Belanda (VOC) menjadikan Batavia sebagai pusat pemerintahan. Berdasarkan alasan itulah, maka Sunan PB II tidak lagi memakai nama Kartasura lagi bagi kratonnya yang baru itu, yang ternyata tidak banyak membawa keberuntungan, melainkan nama Surakarta sebagai imbangan nama Jakarta alias Jayakarta.<sup>1</sup>

Nama Sala juga tidak lagi dipakai oleh Sunan, sebab menurut kepercayaan rakyat konon kata Sala berasal dari perkataan *desa* dan *ala*. Jadi menunjukkan keadaan yang tidak baik dan tentu saja juga menunjukkan ketidak-beruntungan. Selain itu, nama Surakarta nampaknya tidak berbeda dengan nama Salakarta yang disebut-sebut dalam *Serat Salasilah Para leluhur ing Kadanurejan Yogya* dan *Babad Mataram Salakarta*. Dari kedua sumber itu dapat diambil kesimpulan, bahwa nama asli kraton dan kediaman PB II yang baru memang Salakarta, dan baru pada masa pemerintahan Sunan PB III nama ini menjadi Surakarta.<sup>2</sup>

Luas ibukota kerajaan Surakarta (kota Sala) adalah 24 kilometer persegi dengan ukuran 6 kilometer, membentang dari arah barat ke timur, dan 4 kilometer dari arah utara ke selatan. Kota ini berada di tanah dataran rendah di tepi sebelah barat Sungai Bengawan Sala. Menurut astronomi, kota Sala terletak pada 7°4'0" Lintang Utara -- 8°10'0" Lintang Selatan dan 110°27'0" Bujur Barat -- 111°20'0" Bujur Timur. Suhu udaranya berkisar antara 22° C sampai 32° C, dan tinggi tanahnya ± (lebih kurang) 92 meter di atas permukaan laut.<sup>3</sup>

Adapun luas wilayah kerajaan Surakarta (sekarang eks Keresidenan Surakarta) seluruhnya adalah 6.215 kilometer persegi. Separuh dari daerah itu adalah milik kasunanan,

sedang separuh lainnya masuk daerah Mangkunegaran. Pada tahun 1838 penduduk Surakarta berjumlah 358.230 orang, dan pada tahun 1920 naik menjadi 2.049.547 orang.<sup>4</sup> Penduduk Surakarta dapat dikatakan homogen, artinya masing-masing etnik terkumpul dan menempati daerah-daerah tertentu secara terpisah dengan etnik lainnya. Beberapa etnik yang mendiami di seputar wilayah ibukota kerajaan, yaitu Jawa yang jumlahnya paling besar, kemudian Cina, Arab, dan Eropa. Di pusat ibukota terdapat bangunan inti kerajaan berupa kraton yang terdiri dari kompleks bangunan yang dikelilingi tembok, tempat kediaman raja, isteri-isterinya, dan berbagai wanita terkemuka. Daerah inti ini dikelilingi oleh sepasang bangunan tembok yang tinggi, tempat masuk hanya bisa lewat gerbang dengan pintu yang tebal dan kuat. Di luar daerah inti terdapat kompleks yang lebih besar, 700 x 500 meter, yang juga dikelilingi tembok. Di tempat ini terdapat pemukiman atau tempat kediaman para pegawai, pejabat, anggota istana, dan berbagai tukang dan pekerja, yang semuanya mempunyai kaitan langsung dengan kegiatan dalam istana.

Di sebelah Utara dan Selatan dari kompleks tersebut terhampar dua lapangan yang luas, disebut alun-alun, masing-masing dengan dua pohon beringin raksasa sebagai simbol kekuasaan raja. Alun-alun utara berperan sebagai forum kraton, tempat berlangsungnya upacara-upacara yang besar. Disebelah selatan alun-alun ini terdapat *pagelaran*, sebuah pendhopo besar tempat menerima dan menunggu tamu. Lebih keselatan lagi terletak *sitinggil*, pendopo luar yang besar untuk audiensi tampak raja menampakkan dirinya kepada rakyat sewaktu ada peristiwa kenegaraan.

Di sebelah Utara Kraton terletak *kepatihan*, tempat kediaman *pepatih dalem*, sekaligus berfungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan. Istana Mangkunegaran terletak di sebelah selatan Sungai Pepe, demikian pula perkampungan orang-orang Eropa yang meliputi rumah residen, kantor-kantor, gereja, gedung pertunjukan, gedung-gedung sekolah, toko-toko, dan benteng Vastenburg sebagai pusatnya. Perkampungan

orang-orang di luar benteng itu disebut Loji Wetan, karena bangunannya berbentuk loji yang menggunakan bahan batu-bata.

Istana atau Pura Mangkunegaran yang dikelilingi oleh bangunan tembok seluas  $\pm$  10.000 meter persegi, terletak di sebelah Barat Laut Kraton Surakarta. Di dalamnya terdapat halaman untuk tempat latihan lagiun (*pamedan*) dan sebuah kompleks yang terdiri dari bangunan yang menarik dan terpelihara dengan baik berupa kantor, pendopo untuk pertemuan umum, dan tempat kediaman pangeran beserta keluarganya. Di luar kompleks adalah perkampungan dan rumah-rumah pegawai termasuk anggota lagiun.

Letak Kraton Surakarta, Istana Mangkunegaran, rumah residen, dan kepatihan tidak berjauhan. Benteng Vastenburg dibangun dekat dengan kraton dan rumah residen. Jarak antara kraton dan Istana Mangkunegaran yang menghadap ke selatan tidak berjauhan, keduanya dipisahkan oleh suatu jalan besar. Selain itu juga dapat dilihat bahwa jarak dari kepatihan ke rumah residen lebih dekat daripada jarak dari kepatihan ke kraton. Untuk mencapai kraton, *pepatih dalem* harus melewati rumah residen. Pengaturan tempat-tempat itu adalah untuk kepentingan dan keamanan pemerintahan kolonial Belanda di Surakarta.<sup>5</sup>

Jika perkampungan orang Eropa terpisah dari perkampungan etnik lain berdasarkan diskriminasi ras, maka pemukiman orang-orang Cina disebut pecinan dimaksudkan agar gerak-gerik mereka mudah diawasi. Pacinan terletak di sekitar Pasar Gede, diurus oleh seorang berpangkat mayor yang diambil dari kalangan mereka. Di kalangan penduduk, kepala etnik ini dikenal dengan sebutan Babah Mayor. Demikian pula dengan orang-orang Arab yang diberi tempat di Pasar Kliwon, kepalanya mendapat pangkat kapten.<sup>6</sup>

Penduduk pribumi, bagian terbesar adalah orang Jawa, ditemukan dalam berbagai kelompok dan kampung di seluruh kota. Perkampungan penduduk pribumi yang terpencar di

seluruh kota ini disebut menurut nama putra-putri raja atau para pangeran dan pegawai puri yang terkemuka, misalnya: Jayakusuman, Adiwijayan, Suryobraton, dan Kalitan. Sebagian lain disebut menurut kelompok *abdi dalem kriya* dengan pekerjaan sejenis, antara lain: Serengan, Undagen, Telukan, dan sebagainya. Ada juga yang disebut menurut profesi orang yang menempati daerah itu, misalnya: Carikan, Sranten, Kalangan, Punggawan, dan Sangrah; yang mengikuti nama kelompok abdi dalem prajurit, misalnya: Carangan, Wirengan, dan Tamtaman. Tempat yang khusus untuk abdi dalem dan bupati *nayaka* tidak dipakai untuk menyebut kampung, oleh sebab itu terdapat nama kampung Kepatihan, Sewu, dan Bumi

Secara administratif, Karesidenan Surakarta berbatasan dengan Karesidenan Yogyakarta, Kedu, Semarang, dan Madiun. Batas alam berupa Gunung Merapi (2.875 m) dan Merbabu 3.145 m) terletak di sebelah Barat, pegunungan Kendeng di sebelah Utara, dan Gunung Lawu (326 m) di sebelah Timur. Antara Gunung Merapi dan Merbabu dengan Gunung Lawu membentuk dataran rendah yang luas, meliputi daerah Klaten, Boyolali, dan Kartasura yang kaya sedimen vulkanis. Dari lereng Gunung Merapi mengalir sungai Opak ke Selatan, menjadi batas antara Karesidenan Surakarta dan Yogyakarta. Sungai Dengkeng menyatu dengan Bengawan Sala yang mata airnya berasal dari distrik Sembuyan, dengan nama sungai Penambangan. Di Lereng Barat Gunung Lawu mengalir sungai Samin, Colo, Wingko, dan Jenes. Sungai-sungai ini mengalir ke dataran rendah Karanganyar yang membentuk daerah persawahan.<sup>7</sup>

Di bagian Selatan membentang pegunungan Sewu yang ke arah barat memasuki daerah Pajang dan ke arah Timur Laut sampai ke distrik keduwang. Dari distrik ini bentengnya ke utara menuju Gunung Lawu, dan ke Selatan sampai di perbatasan Pacitan, daerah lereng Gunung Lawu cocok untuk perkebunan kopi. Dari kota Sala ke arah Utara membentang dataran rendah yang makin kurang subur, terbukti kapur yang berakhir ke pegunungan Kendeng. Beberapa distrik di dataran

ini merupakan perkebunan kopi, sedangkan sisanya sangat cocok untuk tanaman jati.<sup>8</sup>

Distrik Kalioso yang terletak di pinggir Bengawan Sala merupakan persawahan subur, tetapi bagian Barat distrik ini agak kurang subur, sehingga membentuk daerah *kopen* (kebun kopi) yang membentang antara daerah Karanggede (Getas) sampai Gegatan. Ke arah Barat Daya terhampar dataran rendah yang luas, yakni daerah Klaten yang kaya mata air (*water bronnen*) dan cocok untuk perkebunan tebu, sedangkan ke arah Gunung Merapi tersebar daerah perkebunan kopi.

## ***2.2 Lingkungan Fisik Kraton Surakarta***

Kraton Surakarta mulai dibangun pada masa pemerintahan Sunan PB II (1726-1749) sebagai pengganti Kraton Kartasura yang telah rusak akibat pemberontakan orang-orang Cina di bawah pimpinan Sunan Kuning, juga oleh pasukan Madura yang dipimpin Cakraningrat IV. Peristiwa pendirian kota ini dikisahkan dalam *Babat Giyanti*, sebuah babat bersajak yang ditulis kira-kira akhir abad 18 oleh pujangga kraton Yogyakarta. Mula-mula diceritakan bagaimana raja Mataram mengumpulkan para penasehat dan para pembantunya untuk memberitahukan niatnya *angalih negara* (memindahkan ibukota) yang baru saja dihancurkan oleh gerombolan Cina (*sirna binasmi dening kang mengсах Cina*).<sup>10</sup>

Raja meminta kepada ahli nujum untuk mencari lokasi yang cocok untuk itu. Dari beberapa alternatif, maka terpilih Desa Sala sebagai tempat untuk membangun kraton. Ketika Sunan PB II pindah ke Sala, nama ini kemudian diganti menjadi Surakarta Hadiningrat (1746). Bentuk istana menurut cerita tradisi meniru bentuk istana Bathara Hendra di Jonggring Saloka (Kahendran).<sup>11</sup>

Sunan PB II membangun kraton secara tergesa-gesa dan perpindahan ke Surakarta dilakukan ketika kraton baru itu masih dalam keadaan belum selesai. Tiga tahun sesudah menempati kraton baru, Sunan PB II wafat (1749), sehingga



penyelesaian pembangunan kraton ditangani oleh raja-raja yang memerintah kemudian. Meskipun sampai pemerintahan Sunan PB X bangunan kraton mengalami perkembangan secara terus menerus, namun pembagian *pelataran* atau halaman tidak mengalami perubahan. Dalam hal ini konsep konsentris (empat lingkaran) kerajaan Jawa dipakai sebagai dasar pembagian kraton. Lingkaran pertama, *kedhaton* dan sekitarnya yang dikelilingi oleh benteng pertama. Lingkaran kedua, wilayah di antara dua benteng yang disebut *baluwarti*. Ketiga, yaitu *paseban* yang terletak di halaman luar pintu masuk (*kori*) Brajanala. Dan keempat, *alun-alun* di depan *paseban*.<sup>12</sup>

### 1. Lingkaran I : Kedhaton

Kedhaton merupakan tempat yang paling keramat. Hal ini dihubungkan dengan terdapatnya Prabasuyasa, yaitu tempat penyimpanan tanda-tanda kebesaran kerajaan. Prabasuyasa adalah sebuah bangunan *dalem ageng* (rumah besar) yang terletak di belakang pendapa *sasana sewaka*. Di Prabasuyasa ini terdapat empat buah kamar pribadi raja beserta ranjang kebesarannya (*krobongan*). Salah satu dari empat buah kamar itu dipakai khusus untuk menyimpan benda-benda pusaka kerajaan. Prabasuyasa yang dibangun pada tahun 1694 Jawa selain merupakan tempat pribadi raja, juga sebagai tempat untuk menghadap para putera raja. Adapun keputren letaknya di belakang (sebelah Barat) *Prabasuyasa*.

Kedhaton luasnya  $\pm 92.230$  meter persegi, dibatasi oleh dua pintu yaitu kori kamandhungan di sebelah Utara dan Selatan, serta jalan raya baluwarti di sebelah Barat dan Timur. Untuk dapat mencapai kedhaton, dari arah Utara, orang harus melalui lima buah *kori*, yaitu *kori gladag*, *amurakan*, *brajanala* utara, *kamandhungan*, dan *sri manganti*.

*Kori gladag* letaknya paling Utara. *Gladag* artinya giring atau halau. *Digladag* artinya digiring atau dihalau, jadi *gladag* adalah tempat berlalunya binatang hasil buruan yang *digladag* ke *pamurakan* untuk disembelih (*dipurak*).

Berikutnya, kori *pamurakan*. Pamurakan adalah tempat untuk menyembelih hewan buruan, yang kemudian dagingnya dibagi-bagikan kepada para *abdi dalem* dan *kawula dalem* yang punya hak untuk menerima.<sup>13</sup> Sebelum binatang disembelih, kadang-kadang diadakan acara *rampogan* terlebih dahulu, yaitu mengadu harimau (yang merupakan binatang hasil buruan) dengan kerbau dalam suatu arena yang dibentengi atau dikelilingi oleh manusia. Biasanya bertempat di Alun-alun Utara. Setelah diadu, harimau itu dihujani senjata tajam hingga mati, dan kemudian baru disembelih, Batu landasan tempat penyembelihan hewan tersebut dengan *sela kentheng*.

Kori berikutnya adalah *brajanala*. *Braja* artinya senjata tajam atau api, *nala* artinya hati atau perasaan. Jadi *brajanala* berarti tajamnya perasaan harus ditunjukkan apabila seseorang akan masuk atau keluar dari kompleks istana agar hati-hati jangan sampai kena salah. Di kanan dan kiri pintu *brajanala* terdapat *bangsal brajanala* yang dibangun oleh Sunan PB III tahun 1708 Jawa (1782 M) bersama-sama dengan pembangunan *baluwarti* tempat benteng istana).

Kori keempat adalah *kamandhungan*. *Mandhung* berarti berhenti. Di belakang pintu *kamandhungan* ini terdapat cermin besar. Maknanya, bahwa sebelum masuk istana terlebih dahulu berhenti sejenak untuk bercermin melakukan koreksi diri. Di atas pintu terdapat lambang kerajaan Jawa berupa gambar padi kapas dan mahkota raja. Maksudnya sebagai lambang pangan, sandang dan keluhuran. Lambang raja ini disebut *sri makutha raja*. Kori *kamandhungan* dibangun tahun 1819 pada masa pemerintahan Sunan PB V.

Kori terakhir adalah *sri manganti*. *Manganti* artinya menunggu, dan *sri* artinya raja. Jadi *sri manganti* berarti menunggu perintah raja. Kori ini dibangun tahun 1718 Jawa (1792 M). Di atas kori *sri manganti* juga terdapat gambar lambang kerajaan *sri makutha raja*.<sup>14</sup>

Di dalam lingkaran tembok *kedhaton* terdapat tiga buah halaman yaitu halaman *sri manganti*, *plataran kedhaton* dan

halaman *magangan*. Halaman *sri manganti* terletak di sebelah utara *plataran kedhaton*, memiliki dua buah bangsal yang saling berhadapan, yaitu bangsal *marakata* di sebelah barat dan bangsal *marcukandha* di sebelah timur. Kedua bangsal itu berfungsi sebagai tempat *abdi dalam* yang akan menghadap raja. Bangsal *marakata* untuk *abdi dalem lebet*, sedangkan bangsal *marcukandha* untuk *abdi dalem prajurit*.

Berikutnya halaman *magangan*. Di tengah-tengah halaman *magangan* terdapat bangsal terbuka yang berfungsi untuk menyimpan berbagai macam barang seperti *made rengga*, yaitu peralatan khitan putera dan kerabat raja. Juga berfungsi untuk menyiapkan barisan prajurit yang akan bertugas, untuk menyiapkan segala sesua yang berhubungan dengan seremoni religius kraton seperti pembuatan *gunungan* dan upacara *gerebeg*, dan tempat *magang* bagi calon prajurit kraton.<sup>15</sup>

Di seputar *plataran kedhaton* terdapat kompleks bangunan yang bermacam-macam bentuknya. Halaman luas di depan *pendhapa sasana sewaka* ditanami pohon sawo manila sebagai penyejuk dan memperindah pandangan. Jumlah pohon sawo manila sebanyak 88 buah yang mengingatkan angka tahun 1888 sebagai tahun didirikannya bangunan *sasana sewaka*. Secara ringkas, bangunan-bangunan yang terdapat di kompleks istana (*kedhaton*), antara lain :

a. Di Pusat istana :

1. *Prabasuyasa*, menghadap ke Selatan. Didirikan pada tahun 1694 Jawa. Di tengahnya terdapat *krobongan* berupa rumah kecil berpagar kaca keliling dan berpintu, menghadap ke Selatan. Jumlah kamar di *prabasuyasa* ada empat. Sebelah Timur disebut kamar gading, kamar besar, dan kamar pusaka. Sedangkan di sebelah Barat terdapat kamar *prabasana* tempat untuk menghadap para putera raja.
2. *Sasana parasadya*, yaitu nama agi *paringgitan* (tempat pertunjukan wayang). Bentuk bangunan joglo *kepuhan*

*jubungan* (tanpa teras) membujur arah Utara-selatan. Tempat ini merupakan tempat duduk raja sewaktu menyaksikan pagelaran wayang kulit.

3. *Sasana sewaka*, sebutan bagi pendapa. Bentuk *joglo pangrawit*. Didirikan pada tahun 1698 Jawa (1888 M), merupakan tempat duduk raja dihadap oleh para *abdi dalem lebet*.
  4. *Sasana handrawina*, tempat pesta/makan raja beserta keluarganya. Dibangun pada masa Sunan PB VI, bentuk *limasan sinom klabangan nyander*.
  5. *Paningrat*, berupa teras dari pendapa *sasana sewaka*.
  6. *Maligi*, tempat khitan putera raja. Dibangun tahun 1882 M, letaknya di sebelah Selatan *sasana sewaka*. Bentuk *limasan, jubungan* tanpa teras, bertiang delapan tanpa *ander*.
- b. Di sebelah Timur halaman istana, terdapat tiga bangsal :
1. Bangsal *bujana*, terletak di bagian Selatan. Merupakan tempat untuk menjamu para pengiring tamu kerajaan. bentuk *jubungan limasan, Klabangan nyander*.
  2. Bangsal *pradangga kidul*, terletak di sebelah Utara bangsal *bujana*. Tempat gamelan, dibunyikan sewaktu kraton mempunyai keperluan.
  3. Bangsal *pradangga lor*, letaknya disebelah Utara bangsal *pradangga kidul*. Tempat alat-alat musik/orkestra.
- c. *Sasana prabu*, ialah tempat kantor raja. Letaknya di sebelah Selatan *parasdy*. Adapun di sebelah Utara *parasdy* sebagai tempat kantor wakil raja.
- d. Bangunan yang mengelilingi istana :
1. *Sasana - wilapa* (kantor sekretariat), terletak di sebelah Utara *sasana parasdy*. Dahulu digunakan untuk para

*abdi dalem carik kesepuhan* yang mengerjakan surat-surat raja. Sekarang berfungsi sebagai bagian muka dari keputren. Jadi untuk memperluas rumah *keputren*. Di sebelah Utaranya terdapat pintu *wiwara priya*.

2. *Panti wardaya*, kantor perbendaharaan.
  3. *Reksa handana*, kantor kas kraton.
  4. *Bale kretarta*, kantor perlengkapan.
- e. *Panggung sanggabuwana*, adalah bangunan berbentuk menara persegi delapan, bertingkat empat, dan tingginya 30 meter. Menurut kepercayaan, tempat ini digunakan untuk pertemuan antara raja dengan Ratu selatan, permaisurinya yang beristana di Prarangtritis (daerah Yogyakarta). Nama *panggung sanggabuwana* sebenarnya merupakan sengkalan angka tahun saat didirikannya bangunan itu. Ada beberapa pendapat:
- Menurut KRMH Yosodipuro,<sup>16</sup> kata *panggung* merupakan gabungan kata dari *pa* dan *agung*. *Agung* artinya besar, jadi *pa agung* berarti pa besar. Dalam huruf atau abjad Jawa ada aksara yang dinamakan *aksara murda* (huruf besar). Huruf *pa* besar bentuknya sama dengan angka Jawa yang bernilai 8. Adapun kata *sangga* (*songga*) terdiri dari *song* bernilai 9 dan *ga* (angka Jawa) bernilai 1. Kemudian *buwana* bernilai 1. Kalau dirangkai terdapat angka 8911. Karena rangkaian angka ini merupakan sengkalan, maka membacanya dari belakang (dari kanan ke kiri), sehingga menjadi 1198. Jadi *panggung sanggabuwana* didirikan pada tahun 1198 Hijrah, bertepatan dengan tahun masehi 1782 dan tahun Jawa 1708, yakni masa pemerintahan Sunan PB III.
  - Menurut Radjiman,<sup>17</sup> *panggung sanggabuwana* nama lengkapnya *panggung luhur sangga-buwana*. *Panggung* merupakan sebuah bangunan tinggi bernilai 8; *luhur* berarti tinggi, tidak ada, kosong, bernilai 0: *sangga*

adalah perkumpulan masyarakat Budhis bernilai ; dan *buwana* berarti bumi, jagad, bernilai 1. Jadi tahun 1708 Jawa.

- Menurut R.M. Ng. Tiknopranoto dan R. Mardisuwignya,<sup>18</sup> *panggung* bernilai 8, *song* (kosong) bernilai 0, *ga* (huruf Jawa) bernilai 7, dan *buwana* bernilai 1. Jadi tahun 1708 Jawa, bertepatan dengan tahun 1782 Masehi.

Tahun berdirinya *panggung sanggabuwana* dapat juga diketahui melalui sengkalan *memet* berupa gambar seekor ular naga yang sedang terbang yang dinaiki oleh manusia. Apabila dibaca, gambar tersebut berbunyi *naga muluk tinitihan janma*. Naga artinya ular raksasa bernilai 8, *muluk* artinya *mabul* atau hilang nilai 0, *tinitihan* artinya dinaiki bernilai 7, dan *janma* artinya manusia bernilai 1.

## 2. Lingkaran II : Kompleks Bangunan di Baluwarti.

Wilayah yang disebut *baluwarti* (benteng) ini terletak di luar tembok *kedhaton* di kawasan bersisi empat yang luas, yang dikelilingi oleh tembok berukuran tebal dua meter dan tinggi 3-6 meter. Ruang bertembok itu melingkari wilayah seluar 180 hektar berada di antara dua alun-alun bujur sangkar yang luas, yakni alun-alun Utara dan alun-alun Selatan. Wilayah ini mempunyai dua buah pintu masuk, yaitu *kori brajanala* Utara dan *kori brajanala* Selatan.

Kompleks bangunan di *baluwarti* merupakan kediaman para pangeran, kerabat raja, dan para *abdi dalem*. Rumah-rumah kediaman yang berada di kompleks *baluwarti* ini dapat diketahui status penghuninya antara lain dengan memperhatikan bentuk atau tipe rumah beserta alat perlengkapannya. Adapun tipe-tipe rumah dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok. Pertama, tipe rumah Jawa lengkap berbentuk *joglo* dengan pendapa, *paringgitan*, *dalem*, dan ditambah dengan deretan rumah di kanan-kiri bangunan utama. Rumah Jawa di tepi *joglo* ini biasanya didirikan di halaman yang cukup luas yang dilengkapi dengan pintu masuk

berupa regol. Kelompok kedua, tipe rumah Jawa berbentuk *limasan*. Dan ketiga, rumah *kampung* yang paling sederhana bentuknya.<sup>19</sup>

Dari ketiga tipe itu, untuk tipe pertama dan kedua biasanya dihuni oleh para bangsawan dan *priyayi* tingkat tinggi. Jumlahnya tidak banyak, hanya beberapa saja, diantaranya *Dalem Purwodiningratan* untuk bupati *nayaka* Purwo-diningrat, *Dalem Mlayakusuman* untuk Pangeran Mlayakusuma, dan *Dalem Mangkuyudan* (menantu Sunan PB X, seorang arsitek kraton). Sedangkan tipe ketiga dihuni oleh para *abdi dalem* dan penduduk lainnya yang melakukan pekerjaan bebas, misalnya berdagang. Perumahan para *abdi dalem* biasanya terkumpul dalam satu kompleks hingga membentuk sebuah perkampungan yang ada dalam *baluwarti*, antara lain :

#### 1. *Wirengan*

Letaknya di sebelah Barat daya *kedhaton* (istana). *Wirengan* berasal dari kata *wireng* yaitu penari wayang orang atau penari terian klasik. Dahulu *wirengan* merupakan tempat tinggal para *abdi dalem* dan *sentana dalem* yang mengurus soal tari menari wayang orang dan hiburan lainnya. *Wirengan* juga bisa diartikan prajurit, sebab berasal dari kata *wira-an* (*wira* berarti prajurit). Oleh karena itu sejak pemerintahan Sunan PB X 1893-1939, *abdi dalem wirengan* diberi tugas untuk menjaga keselamatan raja dan istana. Kecuali itu, prajurit *wirengan* mempunyai fungsi khusus keamanan jalannya *gunungan* pada setiap *gerebeg* yang dibawa dari *kedhaton* ke masjid agung. Prajurit ini berjalan di kanan-kiri *gunungan* dan pada saat-saat tertentu menari *tayungan* sepanjang perjalanan<sup>20</sup>

#### 2. *Lumbung*

*Lumbung* adalah tempat menyimpan bahan makanan milik istana. Letaknya di sebelah Timur *kedhaton*.

### 3. *Carangan*

Letaknya di sebelah Utara *Lumbung*, merupakan tempat tinggal *abdi dalem prajurit carangan* yang terdiri dari beberapa pasukan. Biasanya menggunakan sebutan *carangan*, misalnya prajurit Carangdiguna, Carangkartika, Carang wijaya, dan sebagainya. Tugasnya menjaga keselamatan raja dan *kedhaton* dari serangan musuh.

### 4. *Tamtaman*

Letaknya di sebelah Utara *carangan*, merupakan tempat tinggal *abdi dalem tamtama*, yaitu prajurit pengawal raja. Termasuk dalam kelompok ini adalah prajurit Jayatamantaka, Hangkragnyana.

### 5. *Ksatriyan*

Yaitu tempat *sentana dalem* yang menjadi *abdi dalem* prajurit. Tempat berkumpulnya para putera *sentara dalem* dan *abdi dalem* untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Letaknya di sebelah Barat laut Tamtaman.

### 6. *Sasanamulya*

Letaknya di sebelah Barat pintu gerbang utara (pintu gapit *supit urang* atau *brajanala utara*). Dahulu menjadi tempat berkumpulnya para putera raja beserta bawahannya untuk mengadakan upacara bersama-sama dengan raja. *Sasanamulya* pernah dipakai sebagai kantor Pusat Kesenian Jawa Tengah (PKJT) dan Akademi Seni Karawitan Indonesia (ASKI).

7. Di sebelah Timur *sasanamulya* terdapat *gedong kreta*, yaitu tempat menyimpan kereta kerajaan. Di dalam *gedong kreta* ini tersimpan sembilan buah kereta, yaitu (urut dari timur ke barat):<sup>21</sup>



- a. Kyai Retna Juwita, yaitu kereta untuk raja atau wakilnya sewaktu menghadiri undangan rapat.
  - b. Kyai Siswanta, yakni kereta untuk menjemput keluarga raja.
  - c. Kyai Maraseba, yaitu kereta yang digunakan untuk menjemput tamu dalam negeri.
  - d. Kyai Retna Pembagya, yaitu kereta yang dipakai untuk menjemput tamu asing.
  - e. Kyai Rajapeni, yaitu kereta yang digunakan oleh raja sewaktu berkeliling menikmati keindahan kota.
  - f. Kyai Retna Sewaka, yakni kereta raja untuk melayat.
  - g. Kyai Garudapura, yakni kereta untuk menjemput tamu agung seperti kepala-kepala negara, baik yang dari dalam ataupun luar negeri.
  - h. Kyai Garuda Kencana, yaitu kereta yang dipakai khusus untuk kirab guna mmperingati hari ulang tahun bertahtanya raja.
  - i. Kyai Manik Kumala, yaitu kereta yang digunakan untuk memeriksa barisan prajurit. Juga dipakai untuk putra raja setelah tujuh hari pernikahan dengan berkeliling kota.
8. Di sebelah Barat *sasanamulya* terdapat rumah-rumah tempat tinggal para pangeran, antara lain; dalam Suryahamijayan (tempat kediaman Pangeran Suryahamijaya). Dalem Purwodiningratan (tempat kediaman pangeran Purwodiningrat), dan beberapa orang bangsawan lainnya.
9. Gambuhan

Tempat *abdi dalem niyaga* istana dan ahli *gendhing*. Letaknya di sebelah Barat laut *kedhaton*.

10. Di sebelah barat *kedhaton* terdapat kompleks perumahan dari beberapa pangeran, antara lain Dalem Manguyudan, Suryanegaran, Widadaningrat (Hordenasan), dan Kastalan.

Tidak seluruh tempat pemukiman di *baluwarti* dipakai sebagai tempat kediaman secara pribadi. Ada beberapa yang diperuntukan kepentingan kraton, misalnya di sebelah Barat *kori brajanala*, di sebelah Utara terdapat rumah penjagaan *Dragunder*, masjid *Siranata*, dan tempat kereta raja. Di sebelah Timur *kori brajanala* terdapat *pasebab kedipaten*, rumah penjagaan prajurit, dan sekolah Ksatriyan.

Para bangsawan dan *abdi dalem* prajurit pun tidak semuanya tinggal di kawasan *baluwarti*, namun tersebar di banyak tempat. Misalnya Kusumadilagan (sekarang masuk Wilayah Pasar Kliwon) adalah tempat tinggal salah seorang putera Sunan PB IX yang bernama KPH Kusumadilaga. Ia ahli dalam bidang pengetahuan, antara lain kesusasteraan, pedalangan dengan mengubah cerita *Kartawiyoga Maling*, dan kesenian Jawa lainnya. Selanjutnya Jageran dan Mijipinilihan merupakan tempat pemukiman *abdi dalem* prajurit Jagasura dan Mijipinilihan. *Abdi dalem mijipinilihan* adalah *abdi dalem* yang berugas memberi tanda waktu (jam) tiap malam dengan jalan menabuh *kenthongan* atau lonceng di gapura *gladag* dan di *sasana sewaka* (pagelaran) serta di tiap-tiap gapit.

### 3. Lingkaran III : *Paseban*

*Paseban* merupakan lingkaran ketiga. Letaknya di sebelah Utara pelataran *kamandhungan*. Ada dua tempat *paseban*, yaitu *sasana sumewa* atau *tatag rambat* yang menghadap ke utara dan *sitinggil* yang terletak menyatu di belakang (sebelah Selatan) *sasana sumewa*. *Sasana sumewa* dahulu merupakan sebuah bangsal yang besar, beratap anyaman bambu (*gedheg*, bertiang bambu, berlantaikan pasir). Tempat ini dinamakan *tatag rambat*. Setelah Sunan PB X genap berusia enam *windhu* atau 48 tahun, yakni tahun, yakni tahun 1843 Jawa (1913 M),

*tratag rambat* kemudian dibangun dan diberi nama baru *pagelaran* atau *sasana sumewa* sebagai tempat (*sasana*) patih, *abdi dalem* bupati, dan *abdi dalem* yang lain menghadap raja (*sumewa* atau *seba*). *Pagelaran* ini setelah dibangun beratapkan seng, tiang pilar berjumlah 48 buah sebagai peringatan bahwa ketika dibangun bertepatan dengan usia Sunan PB X yang ke 48 tahun.

Di depan *sasana sumewa* diletakkan tiga buah meriam. Meriam-meriam tersebut berjajar dari Timur ke Barat, masing-masing bernama Kyai Pancawarna, Kyai Brasta, dan Kyai Segara Wana. Nama Kyai Pancawarna diambil dan singkatan sengkalan tahun Jawa *Pandhita carem wuruking ratu* (1567). Dibuat pada masa pemerintahan. Sultan Agung di Mataram. Oleh karena meriam ini bentuknya paling besar di antara meriam-meriam yang ada di kraton, maka masyarakat menamakan meriam itu dengan sebutan *Kyai Sapujagat*.<sup>22</sup>

Di seputar *pagelaran* terdapat beberapa bangsal, yaitu:

1. Di sebelah barat dan timur agak kedepan dari *pagelaran* disebut bangsal *pamandhangan* yang setiap hari besar agama Islam digunakan untuk kandang kuda kenaikan raja dengan pakaian lengkap. Di dekatnya terdapat bangsal *paretan*, yaitu tempat parkir kereta raja atau tamu agung. Sekarang bangsal ini telah dibongkar, sebab terkena pelebaran jalan. Di sebelah Timur bangsal *paretan* terdapat bangsal *patalon* tempat memukul gamelan tiap hari sabtu (*patalon* dari kata *talun* artinya pembukaan).
2. Di sebelah Timur *pagelaran*, terdapat bangsal *pacekaton*, tempat para *abdi dalem* akan menerima hadiah dari raja. Sebagai imbalan, disebelah Barat *pagelaran* terdapat bangsal *pacikoran*, yaitu tempat pemberhentian *abdi dalem* yang akan menerima hukuman. Di sebelah Tenggara *pagelaran* terdapat bangsal *martalulut* tempat *abdi dalem* martalulut yang bertugas mengadili perkara. Dan sebelah Barat daya *pagelaran* terdapat bangsal *singanegara*, sebagai tempat *abdi dalem* singanegara yang bertugas memutuskan perkara.

3. Di tengah-tengah pagelaran terdapat bangsal *pangrawit*. Di dalamnya terdapat *dampar* yaitu tempat duduk raja apabila ingin memberi hadiah, memutuskan perkara, dan sebagainya. Bangsal ini dibawa langsung dari Istana Kartasura sewaktu perpindahan kraton tahun 1746 dari Kartasura ke Surakarta.

Selanjutnya *sitinggil* (siti artinya tanah, inggil artinya tinggi), merupakan tempat yang tinggi dan keramat. Nama lengkapnya siti hinggil binata warata, di bangun pada tahun *siti hinggil palenggahaning ratu* (1701 Jawa atau 1774 M) oleh Sunan PB III. Sebagai *paseban*, *sitinggil* terletak disebelah selatan dan menyatu dengan *tatag rambat*, tetapi *sitinggil* letaknya lebih tinggi daripada *tatag rambat* (pagelaran). Antara pagelaran dengan *sitinggil* dihunungkan dengan tangga berjumlah delapan buah dan dua buah pintu, yaitu *kori wijil I* dan *kori wilil II*. Di tengah-tengah antara pagelaran dengan *sitinggil* terdapat sebuah tempat bernama *sela pemecat* yang konon menurut cerita digunakan untuk memenggal kepala bagi orang yang mendapat hukuman mati. Sekarang tempat tersebut masih dianggap keramat.

Bangunan *sitinggil* dikelilingi oleh pagar besi (*pancak suji*). Tempat ini merupakan tempat menghadap para pejabat tinggi dan bangsawan tinggi istana. Di seputar *sitinggil* terdapat beberapa bangsal, yaitu:

1. Bangsal *sewayana*, dibangun oleh Sunan PB X tahun 1813 Jawa atau 1913 M. Letaknya di tengah-tengah halaman *sitihinggil*. Fungsinya sebagai tempat bagi para tamu undangan, para bangsawan, dan kerabat *dalem* serta *abdi dalem lebet* yang hendak menghadap raja.
2. Bangsal *manguntur tangkil* yaitu tempat duduk raja pada hari-hari besar agama, seperti *gerebeg Mulud*, *gerebeg Pasa* (Idul Fitri) dan *gerebeg Besar* (Idul Adha). Sedangkan untuk keperluan lain, raja duduk di bangsal *pangrawit* di pagelaran. Letak bangsal *manguntur tangkil* di tengah bangsal *sewayana*.

3. Bangsal *witana*, yaitu tempat para abdi dalem pembawa benda-benda upacara pada waktu Idul Fitri, Idul Adha. Letaknya di belakang (sebelah Selatan) bangsal *sewayana*.
4. Bangsal *manguneng*, tempat menaruh meriam Nyai Setomi. Letaknya di dalam bangsal *witana*.
5. Bangsal *ngangun-angun* (ngalun-alun), yaitu tempat memukul gamelan setiap hari-hari besar Islam. Letaknya di sisi Tenggara bangsal *sewayana*.
6. Bangsal *gandhek tengen*, yaitu tempat memukul gamelan dengan *gending kodhok ngorek* pada hari-hari besar agama. Letaknya di sisi Timur laut bangsal *sewayana*.
7. Bangsal *balebang*, yaitu tempat menyimpan gamelan. Letaknya di sisi barat daya bangsal *sewayana*. gamelan yang disimpan ini ialah: gamelan Kyai Singakrura, Kyai Pamedharsih, Kyai Banjit. Di dalam kamar bangsal *balebang* tersimpan pula *bendhe* Kyai Samparan, Kyai Dewadenda, *gong* Kyai Surak, *gong* kyai Kanigara, *gong* Kyai Kunitir, *gong* Kyai Bajraherawana.<sup>23</sup>
8. bangsal *gandhek kiwa*, yaitu tempat untuk menyediakan hidangan pada hari raya Islam. Letaknya di sisi Barat laut bangsal *sewayana*.

Jadi bangsal *sewayana* yang terletak di tengah halaman sitinggil itu dikelilingi oleh empat bangunan yang terletak di sisi barat laut (bangsal *gandhek kiwa*), barat daya (bangsal *balebang*). Timur laut (bangsal *gandhek tengen*), dan tenggara (bangsal *ngangun-angun*).

Di tepi halaman depan dari sitinggil diletakan delapan buah meriam (urut dari Barat ke Timur) yaitu: meriam Kyai Bringsing. Kyai Bagus, Kyai Nangkula, Kyai Kumbara, Kyai kumbarawi, Kyai Sadewa, Kyai Alus, dan Kyai kadhal buntung (Kyai Pamecut/Kyai Maesakumali).<sup>24</sup> Selanjutnya antara sitinggil dengan kompleks istana dipisahkan oleh kori renteng atau kori mangu (artinya ragu-ragu), dan dibatasi oleh jala supit urang.

#### 4. Lingkaran IV : *Alun-alun*

Alun-alun (lapangan) merupakan lingkaran keempat. Ada dua buah lapangan, yakni alun-alun lor (Utara) dan alun-alun kidul (Selatan). Alun-alun lor yang merupakan halaman depan kraton, berbentuk segi empat, berukuran 300 meter tiap-tiap sisinya. Di tempat masuk alun-alun lor sebelah Utara berdiri dua patung raksasa, Cingkrabala dan Balaupata yang juga dikenal sebagai penjaga masuk khayangan.<sup>25</sup> Di tengah alun-alun terdapat dua pohon beringin, Jayandaru dan Dewandaru, diapit oleh dua pasang pohon beringin yang lebih kecil yakni sepasang di depan pagelaran dan sepasang lainnya di sebelah Utara alun-alun di dekat kori pamurakan, dikenal dengan nama *ringin wak* dan *ringin jenggot*.<sup>26</sup>

Pohon beringin Jayandaru dan Dewandaru diberi pagar besi bersegi delapan. Oleh karena disebut *waringin kurung sakembaran*.<sup>27</sup> Pohon beringin itu dibawa dari Kartasura sewaktu terjadi perpindahan kraton di Surakarta. Di antara kedua pohon tersebut dipakai jalan untuk menuju istana. Pohon beringin di sebelah Timur bernama Jayandaru, artinya keluhuran.<sup>28</sup> Kedua pohon beringin tersebut melambangkan *loroning atunggal*, artinya dua unsur yang berjarak namun merupakan kesatuan yang sulit dipisahkan.<sup>29</sup>

Di seputar alun-alun lor yakni di sebelah Utara, di sebelah Timur dan Barat terdapat deretan bangunan yang disebut dengan *kapalan*. Fungsinya sebagai tempat istirahat bagi para abdi dalem setelah melakukan *gladhen watangan* (latihan perang-perangan). Setelah tradisi *gladhen watangan* tidak ada, yakni sejak Sunan PB XI, maka kapalan digunakan sebagai tempat istirahat para abdi dalem yang akan menghadap raja ke istana. Oleh karena itu nama kapalan kemudian disebut *paseban*.<sup>30</sup>

Sebagai pasangan dari alun-alun lor adalah alun-alun kidul yang berperan sebagai alun-alun *pengkeran* (belakang), terletak dalam lingkup tembok kraton. Alun-alun kidul ini dalam segala

hal keadaannya lebih sederhana bila dibandingkan dengan alun-alun lor. Hal itu dapat dilihat dengan adanya bangunan sitinggil yang tidak dilengkapi dengan pagelaran. Sepasang pohon beringin yang berada di tengah alun-alun pun tidak diberi nama dan tidak diapit oleh dua pohon beringin lainnya. Adapun pintu terluar sebagai pintu masuk dari arah selatan hanya terdiri dari satu kori saja, yakni kori *gadhing*. Sedangkan pintu masuk dari arah utara di alun-alun lor, terdapat dua buah kori, yaitu kori gladag dan kori pamurakan.

Perlu ditambahkan, bahwa disisi Barat alun-alun lor masih ada sebuah bangunan yang cukup penting yakni Masjid Agung, yang sebenarnya menurut konsep konsentris pembagian kraton terletak di luar daerah istana yang sebenarnya. Masjid ini terbuat untuk umum dan berada di bawah wewenang seorang pemuka agama yang relatif mandiri, yaitu seorang *pengulu* yang lazim dipilih di antara keluarga daerah *kauman*. Kauman adalah daerah pemukiman kaum muslim yang taat beribadah yang terletak di sekeliling masjid.<sup>31</sup>

Demikian sekilas tentang lingkungan fisik kraton Surakarta yang hingga kini berusia  $\pm$  250 tahun. Di dalam kompleks kraton terdapat ratusan bangunan dengan aneka macam bentuk, disesuaikan dengan fungsi bangunan itu. Mengingat kedudukan kraton sebagai pusat jagat raya, maka pengaturan bangunan di dalam kraton tidak terlepas dari usaha raja untuk menyelaras-kan kehidupan warga komunitas kraton dengan jagat raya itu. Dengan demikian pengaturan bangunan yang didasarkan pada pola konsentris tersebut menempatkan bangunan yang terletak di pusat (paling tengah) merupakan bangunan yang terletak di pusat (paling tengah) merupakan bangunan yang paling sakral.

### ***2.3 Stratifikasi Sosial Masyarakat***

Anggota/masyarakat/komunitas kraton Surakarta tersusun secara hirarki dan secara tradisional dibagi dalam tiga kelompok sosial, yaitu :

1. Raja dan keluarga raja (*sentana dalem*)
2. Pegawai dan pejabat kerajaan (*abdi dalem*)
3. Rakyat biasa (*kawula dalem*)

Untuk menentukan posisi seseorang berada dalam kelompok tertentu, diperlukan dua kriteria. Pertama, prinsip kebangsawanan yang ditentukan oleh hubungan darah seorang dengan penguasa. Kedua, posisi seseorang dalam hirarki birokrasi. Seseorang yang mempunyai kriteria-kriteria tersebut dianggap termasuk golongan elite. Sedangkan mereka yang diluar golongan itu dianggap sebagai rakyat kebanyakan.<sup>33</sup>

#### 1. Raja dan keluarga (*sentana dalem*)

Raja berada pada tingkatan paling atas dalam hirarki kerajaan mempunyai kedudukan yang sangat istimewa di dalam masyarakat, khususnya masyarakat Jawa. Raja adalah raja pertama dan satu-satunya yang berkuasa di suatu kerajaan (negara). Ia pemimpin negara dan rakyatnya dengan kekuasaan absolut atau mutlak. Maka sabda raja berarti undang-undang, ini tercermin dari ungkapan Jawa "Sabda Pandita Ratu", yang artinya setiap ucapan raja (sabda raja) harus terlaksana.

Ditinjau dari segi bahasa, istilah raja berasal dari bahasa Sansekerta: *raj*, *rajya* yang berarti pemerintahan atau kerajaan. Dengan demikian raja adalah penguasa kerajaan. di Jawa, konsep mengenai raja dan kekuasaan dipengaruhi oleh konsep spiritual yang berasal dari kultur India, yaitu kepercayaan adanya kesejajaran antara makrokosmos dan mikrokosmos, antara jagat raya dan dunia manusia. Menurut kepercayaan itu, manusia selalu berada di bawah pengaruh tenaga-tenaga yang bersumber pada penjuru mata angin, pada bintang-bintang, dan pada planit-planit. Tenaga-tenaga itu dapat menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan, tetapi juga sebaliknya dapat membawa kehancuran. Hasil yang diperoleh itu sangat tergantung



pada kemampuan atau tidaknya individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, terutama sekali raja, dalam menyelaraskan kehidupan dan kegiatan mereka dengan jagat raya. Keselarasan antara kerajaan itu sebagai jagat raya (makrokosmos) dapat dicapai dengan cara menyusun kerajaan sebagai jagat raya dalam bentuk kecil (mikrokosmos).<sup>34</sup>

Ibukota kerajaan atau kota istana tidak hanya merupakan pusat politik dan kebudayaan, tetapi juga sebagai pusat magi bagi kerajaan. Berhubung jagat raya yang menurut kosmologi Brahman atau Budhis berpusat di Gunung Meru, maka kerajaan yang merupakan jagat kecil harus pula memiliki Gunung Meru pada pusat kotanya, dan Gunung Meru di pusat kota ini akan menjadi pusat magi bagi kerajaan.<sup>35</sup> Dengan demikian sebuah kerajaan tidak lepas dari unsur-unsur yang melengkapinya. Bagaikan dunia kecil, kerajaan merupakan gambaran alam semesta yang lengkap dengan zat supranatural, dewa yang khalik dan umat manusia, serta alam beserta sisinya. Konsep kosmologi ini diterapkan pada susunan penguasa atau raja sebagai titik sentralnya.

Adapun peran raja yang utama adalah untuk melindungi kerajaan dan rakyatnya dengan menjadi perantara antara dunia manusia dengan dunia dewa-dewa. Raja harus memiliki kekuasaan dan wibawa yang setara dengan dewa-dewa. Hubungan antara raja dengan rakyatnya ini merupakan suatu ikatan antara *kawula-gusti* atau abdi-tuan yang merupakan kaitan erat. Akrab, saling menghormati dan bertanggung-jawab. Rakyat sebagai *kawula* menyerahkan segala nya termasuk jiwanya jika raja menginginkannya. Seseorang yang menjadi raja tentunya tidak sembarang orang, ia harus berasal dari keluarga yang agung, *trahing kusuma, remembering madu, wijining atapa, tedaking andana warih*, yang artinya turunan bunga, titisan madu, benih pertapa, turunan mulia.<sup>36</sup> Sehingga raja adalah orang yang terpilih karena kesucian, kesaktian, dan masih keturunan raja.

Menurut pemikiran tradisional Jawa, ada tiga konsep utama yang mengatur hubungan *kawula gusti* tersebut :

1. Suatu hubungan pribadi yang erat disertai dengan rasa saling mencintai dan menghormati yang dianggap sebagai pola atau model baku dalam komunikasi sosial.
2. Nasib menentukan kedudukan seseorang dalam masyarakat, apakah ia lahir sebagai hamba atau sebagai tuan. Akibatnya adalah bahwa manusia tidak punya pilihan melainkan harus memikul kewajibannya seperti yang telah ditentukan oleh nasibnya.
3. Raja dan pegawainya, dalam hal politik pemerintahan harus memperhatikan rakyatnya sebagaimana seorang ayah harus mengasuh anaknya. Jadi raja sebenarnya mengambil sikap sebagai maha pelindung, dan rakyatnya bersikap tunduk dan menerima.<sup>37</sup>

Ketika agama Islam mulai berkembang di Indonesia (Jawa), antara abad 11-15, maka proses akulturasi tidak dapat dihindarkan. Lambat laun agama Islam tersebut merasuk ke dalam pola pikir masyarakat yang kemudian dipeluknya. Ketika itu kerajaan yang bersifat Hinduistis masih berdiri. Dengan masuknya agama Islam, berarti merupakan tantangan yang serius terhadap raja-raja Mataram. Suatu usaha untuk menghadapi tantangan ini dengan memakai gelar *susuhunan* atau *sultan*, juga menarik pemimpin-pemimpin agama Islam ke dalam istana dan lambat laun mengubah tatacara istana sesuai dengan ajaran yang baru.

Dipakai gelar *susuhunan* menunjukkan bahwa pemakainya, dengan dihiasi gelar yang paling tinggi, adalah utusan Tuhan. Dengan gelar ini, sifat kedewaan dari raja-raja Hindu-Jawa dihidupkan kembali walaupun dengan

nama yang baru dan dalam bentuk yang lain. Maka raja yang suci dalam bentuk candi mendapat penggantinya dalam *pasarean* (pekuburan) yang kudus di Puncak Imogiri.<sup>38</sup>

Gelar susuhunan pertama kali dipakai oleh raja Mataram ketiga, Anyakrakusuma, sesudah berhasil menguasai daerah yang luas dan menaklukkan pulau Madura tahun 1624. Sebelumnya, peletak dasar wangsa Mataram menggunakan gelar *penembahan*.<sup>39</sup> Gelar susuhunan menunjukkan kedudukan yang amat tinggi. Hal ini terlihat dari asal kata susuhunan *suhu* (*pundhi* atau *sunggi*) yang berarti diletakkan di atas kepala. Jadi susuhunan (*pepundhen*) artinya orang yang dijunjung tinggi, sangat dihormati.<sup>40</sup>

Tahun 1641 Susuhunan Anyakrakusuma melepaskan gelar susuhunan dan kemudian menerima gelar sultan ini dari tanah Mekah. Penerimaan gelar sultan ini dilatarbelakangi oleh adanya rasa iri hati terhadap pangeran Banten yang telah menerima nama sultan dan sebuah bendera yang dikirim kepadanya oleh ulama besar dari Mekah.<sup>41</sup> Namun penggantinya, Amangkurat I (1615-1677) tidak melestarikan pemakaian gelar sultan kembali pada sebutan susuhunan. Hal ini disebabkan Amangkurat I sangat menentang islamisasi Jawa dan melawan tantangan yang bersifat sakral dan politis terhadap pemerintahannya. Ia memutuskan untuk mematahkan kekuatan mereka (pemimpin agama) sekaligus dengan mengadakan pembunuhan massal. Kemudian ia tidak lagi menggunakan gelar sultan, dan sejak saat itu semua raja Mataram disebut susuhunan atau singkatnya sunan, atau sinuwum.<sup>42</sup>

Dengan memakai kembali gelar susuhunan ini, dilihat dari sudut pandang kosmologis yang absolut, maka kekuasaan sakral dan sekuler (duniawi) kembali bekerja di satu tangan dan tidak akan dilepaskan raja, sedangkan ulama kembali menjadi bagian dari aparat pemerintahan.

Selanjutnya raja merupakan perantara tunggal antara Tuhan dengan manusia, dan sebagai juru bicara Tuhan, titahnya dianggap sebagai Sabda Illahi.<sup>43</sup>

Sesudah kerajaan Mataram pecah menjadi dua (1755), gelar susuhunan dipakai oleh raja-raja Surakarta, sedangkan raja-raja Yogyakarta memakai gelar sultan, ditambah dengan predikat *kalifatullah* di belakang nama. Dengan demikian, maka sebutan bagi raja-raja Surakarta adalah *Sampeyan Dalem Inkgang Sinuwun Kanjeng Susuhunan Paku Buwana Senapati Ing Alaga Abdur Rahman Sayidin Panatagama*. Adapun gelar raja Yogyakarta adalah *Sampeyan Dalem Inkgang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengku Buwana Senapati Ing Alaga Rahman Sayidin Panatagama Kalifatullah*.<sup>44</sup> Dari nama gelar atau sebutan yang disandang raja tampak bahwa kekuasaan raja mencakup unsur pemerintahan, militer dan agama, sehingga menempatkan kedudukan seorang raja dalam status sosial yang tertinggi dalam kerajaan.

Melihat begitu besar kekuasaan raja, maka para pujangga menyebutnya *gung binanthara bahu dhenda nyakrawati* (besar laksana kekuasaan dewa, pemelihara hukum dan penguasa dunia). Maka dari itu raja dikatakan *wenang wisesa ing sanagari* (berkuasa di seluruh negeri). Menurut ajaran, dokrin atau konsep kekuasaan Jawa, raja berkuasa mutlak. Tetapi dibalik itu terdapat tanggung-jawab yang besar juga, sebagai imbangan atas kekuasaannya yang besar itu. Maka para pujangga menyebut kewajiban raja itu sebagai *ber budi bawa leksana, ambeg para marta* (berwatak budi luhur, dan bersikap adil terhadap sesama). Kecuali itu, raja harus dapat *anjaga tata tentreming praja* (menjaga supaya kehidupan teratur, sementara rakyat dapat hidup tenteram dan sejahtera)<sup>45</sup>.

Sesudah posisi raja sebagai penguasa tertinggi, maka kerabat raja (*sentana dalem*) seperti putera-putera dan menantu atau ipar dari raja yang sedang memerintah juga

termasuk dalam golongan yang mempunyai status sosial yang tinggi. Hubungan-hubungan yang berasal dari raja-raja yang lebih dahulu dianggap tingkatannya lebih rendah. Sistem tingkat kebangsawanan yang menurun itu sangatlah luas. Di mata rakyat, seorang bangsawan selalu dihargai menurut kemurnian pertalian darahnya dengan raja dari pihak ibu menurut jauh dekatnya hubungan ibu itu dengan raja.

Tingkat-tingkat kerajaan itu sangat luas, setiap orang yang dapat menunjukkan setiap hubungan dengan setiap raja pernah memerintah boleh memakai gelar sebagai tanda kebangsawannya. Deretan gelar-gelar menunjukkan adanya hubungan bangsawan-bangsawan dengan raja. Tingkat-tingkat itu mengatur tata prioritas pada semua kesempatan, seorang anak dari tingkat yang lebih tinggi lebih mempunyai prioritas daripada sanak saudaranya yang lebih tua dari tingkat yang lebih rendah.<sup>46</sup>

Jumlah patokan gelar tingkat dan nama pada masyarakat Jawa sangat banyak. Gelar tertinggi di antara kaum bangsawan adalah *pangeran*, yang dianugerahkan kepada putera-putera raja dan sulung dari putera raja. Gelar ini dapat juga diberitakan kepada kerabat raja atau kepada para pejabat-pejabat menurut jasa atau karena ikatan-ikatan sanak dengan penguasa. Ketiga macam *pangeran* ini dibedakan dengan nama gelar *pangeran putra*, *pangeran sentana*, dan *pangeran sengan*. Tingkat tertinggi diantara *pangeran* itu adalah putera mahkota, yaitu dengan gelar *pangeran adipati anom*. Cucu raja yang sudah dewasa boleh memakai *raden mas aria*, sedangkan keturunan laki-laki dari generasi selanjutnya sampai generasi kelima mempunyai hak memakai gelar *raden mas*. Kemudian gelar *raden* diberikan kepada semua orang yang dapat menyusur galur genealoginya sampai kepada seorang raja pada masa-masa dahulu. *Mas* adalah gelar dari orang-orang yang sedikit banyak mempunyai hubungan dengan kaum bangsawan dan tidak termasuk sebagai rakyat kebanyakan.<sup>47</sup> Di samping gelar-gelar yang menunjukkan

adanya tali kekerabatan dengan raja, ada juga gelar *raden* yang diberikan kepada anak keturunan para wali, yaitu penyebar-penyebarkan agama Islam yang pertama-tama di Jawa.<sup>48</sup>

Yang tidak kalah menarik dalam membicarakan status sosial dari kerabat raja selain yang telah disebut, adalah tentang isteri raja. Pada zaman Mataram dan kerajaan-kerajaan penerusnya, isteri raja (*permaisuri/prameswari*) umumnya bergelar *ratu*. Dalam sejarah terbukti bahwa sunan atau sultan biasanya mempunyai dua *prameswari*. Yang pertama, yang lebih tinggi kedudukannya disebut *ratu kulon*, sedangkan yang kedua, yang kedudukannya lebih rendah bergeralar *ratu wetan*. Dinamakan demikian mungkin berdasarkan letak tempat kediamannya di dalam kraton. *Kraton kulon* lebih tinggi kedudukannya daripada *ratu wetan* dapat diketahui dari kenyataan bahwa puteranyalah yang menjadi putera mahkota.<sup>49</sup> Biasanya permaisuri pertama mendapat nama baru atau nama kehormatan *kencana (emas)*, sebagai bentuk pemuliaan dari puteri tersebut yang disesuaikan dengan kedudukan mulianya.

Di samping permaisuri, raja juga mempunyai isteri yang lain yaitu *selir*, yang disebut pula dengan istilah *gerwa ampeyan, garwa pangrambe, garwa paminggir*, atau *priyantun dalem*. Status sosial *selir* ini kedudukannya lebih rendah daripada permaisuri. Dari sekian banyak isteri raja yang ada, maka siapa saja yang berhak menyandang gelar permaisuri semuanya tergantung kepada kehendak raja. Tidak peduli apakah wanita darah bangsawan atau tidak. Tetapi seseorang raja yang bijaksana akan selalu memperhatikan faktor *trah* (keturunan), prestise atau *social backing* puteri itu. Sehingga pada umumnya kecil sekali kesempatan yang ada pada wanita keturunan orang kebanyakan untuk menjadi permaisuri.

Selain faktor *trah*, faktor *social backing* (dukungan sosial) dari keluarga puteri yang akan dijadikan permaisuri

juga sangat besar pengaruhnya. Jika kekuatan pihak keluarganya besar serta dapat diharapkan kesetiannya, maka tidak mustahil puteri itu akan terpilih menjadi permaisuri. Apabila seorang puteri telah terpilih menjadi permaisuri bukan berarti kedudukannya akan tetap kokoh tiada tergoyahkan, namun bisa saja kedudukan itu digeser atau bahkan hilang sama sekali. Ada tiga sebab seorang permaisuri bisa kehilangan kedudukannya:<sup>50</sup>

Pertama, pertimbangan bobot prestise. Sebagai contoh, penggeseran terhadap permaisuri Sultan Agung. Semula yang menjadi permaisuri pertama (*ratu kulon*) adalah puteri Panembahan Cirebon, yang menjadi Ibu Raden Mas Syahwawrat. Tetapi kemudian kedudukannya sebagai *ratu kulon* digeser oleh Puteri Batang, yaitu keturunan Ki Juru Martani, yang kemudian menurunkan Raden Mas Sayidin Nantinya Raden Mas Sayidin menggantikan kedudukan Sultan Agung sebagai raja Mataram bergelar Amangkurat I.

Kedua, pertimbangan faktor kesetiaan. Contohnya, pemecatan permaisuri pada masa Amangkurat III. Permaisuri yang pertama semula adalah Ratu Impun, puteri pangeran Puger. Tetapi Pangeran Puger dinilai sebagai tidak setia kepada raja, karena itu puterinya kemudian dikembalikan kepadanya dan kedudukannya sebagai permaisuri kemudian digantikan oleh seorang gadis dusun dari Desa Onje (Banyumas). Tindakan Amangkurat III ini sebenarnya bertentangan dengan prinsip *trahing kusuma*, *rembesing madu*, dan karena itu berakibat fatal baginya.

Ketiga, pertimbangan faktor etis. Pernah pula terjadi bahwa seorang permaisuri kehilangan kedudukannya karena puteranya dianggap melanggar etika kraton. Contohnya, Sultan Agung menggeser permaisuri pertama (*ratu kulon*) yang berasal dari Pati (ia adalah saudara Adipati Pragola dari Pati yang memberontak) karena puteranya *amurang nitikrama*, melanggar tata krama. Perlu diketahui, bagi raja dan keluarga kraton, etika



merupakan hal yang sangat penting untuk mempertahankan kemuliaan mereka. Karena itu seorang permaisuri atau putera-putera raja haruslah mentaati betul etika kraton.

Selanjutnya isteri raja yang disebut *selir* adalah seorang wanita yang telah diikat oleh tali kekeluargaan, tetapi tidak berstatus sebagai isteri dalam pengertian yang umum. Statusnya di bawah isteri (*ampeyan*) dan tugasnya membuat raja itu selalu senang (*klangenan*). Jadi *selir* dapat diartikan sebagai isteri yang tidak dinikah. Karena itu laki-laki (raja, bangsawan) yang mempunyai selir saja dianggap masih berstatus *jaka* (perjaka), yaitu laki-laki dewasa tapi belum kawin. Jika bangsawan tadi menurunkan anak dari seorang selir, ia akan dinikahi secara simbolis, yaitu pernikahan dengan simbol atau pusaka yang menjadi simbol dari bangsawan tadi. Ini tidak berakibat bahwa wanita atau selir itu lalu menjadi isteri, melainkan hanya menjamin status hukum dari anak yang dikandungnya, menjadi anak bangsawan tadi. Sehingga kelak anak itu berhak mempergunakan titel kebangsawanan dan memperoleh hak warisan lainnya. Jadi yang menentukan status sosial anak tadi adalah ayahnya, bukan ibunya.

Dalam cerita rakyat Jawa, seorang raja meskipun sudah dikatakan *gung binatara*, *sugih banda*, *sugih bala*, *sugih jajahan*, *sugih selir*, masih dianggap belum lengkap atau masih mempunyai kekurangan bila belum mempunyai permaisuri. Fungsi permaisuri seolah-olah hanya semacam mahkota di atas kepala raja, jadi hanya merupakan pelengkap saja, yang nasibnya tergantung pada si pemakai. Dengan kata lain, seorang permaisuri bisa kehilangan kedudukannya. Bahkan seorang permaisuri itu bisa dipecat. Orang Jawa menyebut pemecatan itu dengan istilah *di pun kebonaken* atau *dipun kandhangaken*. Kedua pengertian itu mirip, Keduanya mengandung arti dikeluarkan dari istana.



## 2. Pegawai dan Pejabat Kerajaan (*Abdi Dalem*)

Sudah jelas, bahwa raja beserta kerabatnya (*sentana dalem*) menempati struktur sosial yang paling tinggi. Di bawah kelompok ini terdapat kelompok *abdi dalem* atau *priyayi*, yaitu seluruh pegawai raja dan kerajaan. Kelompok *abdi dalem* ini umumnya memegang jabatan-jabatan dalam pemerintahan dan birokrasi kerajaan. Untuk menunjukkan status jabatan seseorang dalam sistem administrasi/ birokrasi kerajaan selain memakai gelar jabatan juga nama resmi dari jabatan yang dipangkunya. Misalnya gelar *adipati* diberikan kepada patih, *tumenggung* diberikan kepada pejabat-pejabat setingkat bupati atau kepala daerah, *ngabehi* diberikan kepada pejabat-pejabat di bawah bupati sampai mantri, dan *panji* diberikan kepada perwira-perwira perang.

Pembesar istana yang tertinggi tingkatannya terdiri atas delapan orang bupati, yaitu *bupati nayaka*. Mereka merupakan dewan kerajaan. Keempat orang di antara mereka itu disebut *bupati njero* (bupati dalam) dan yang empat orang lainnya *bupati njaba* (bupati luar). Fungsi *bupati njero* terbagi sebagai berikut : *Bupati keparak kiwa* dan *bupati keparak tengen* adalah bupati-bupati kepala rumah tangga dalam arti sempit dan disamping itu juga pengawal istana, polisi dan pengadilan. *Bupati gedong kiwa* adalah bendaharawan dan *bupati gedong tengen* adalah kepala urusan keluar istana. Keempat bupati tersebut kedudukannya langsung di bawah kendali patih yang merupakan pejabat tertinggi dalam hirarki birokrasi.<sup>51</sup>

Setelah *bupati njero*, menyusul empat orang *bupati njaba*, yaitu *bupati gede* dan *bupati sewu* sebagai "bupati kanan", kemudian *bupati penumping*, dan *bupati bumi* sebagai "bupati kiri". Bupati-bupati ini mengepalai administrasi dari berbagai propinsi kerajaan diluar ibukota. Kemudian menyusul lima orang bupati dari tingkat tiga: pembesar mahkamah pengadilan atau *bupati pangrembe*, *bupati kadipaten anom* yaitu kepala rumah tangga putera

mahkota, *bupati kalang* adalah pengawas tertinggi gedung dan bangunan-bangunan istana, *bupati gladag* adalah pengawas tertinggi alat-alat pengangkutan, dan *bupati jaksa* pengawas tertinggi pengadilan.<sup>52</sup> Di bawah bupati masih ada lima jabatan birokrasi lainnya, yaitu *kaliwon*, *panewu*, *mantri*, *lurah*, dan *jajar*.

Para pejabat pemerintahan dari tingkatan tertinggi sampai ke tingkat terendah oleh raja diberlakukan sesuatu aturan yang dapat membedakan tinggi rendahnya status seseorang, yaitu digunakannya lambang-lambang status dari masing-masing kelompok sosial tersebut. Adapun ujud dari lambang-lambang itu dapat berupa: rumah tempat tinggal, pakaian, tanda kehormatan, gelar (kebangsawanan dan jabatan), lingkungan tempat tinggal, pekerjaan atau profesi, bahasa yang digunakan, dan penghasil yang bersangkutan. Latar belakang penggunaan lambang status tersebut ialah tuntutan kesetian dari raja.<sup>53</sup>

Contoh dalam hal rumah tinggal. Bentuk bangunan rumah yang digunakan oleh raja dalam bangunan istana harus ditiru oleh para *sentana* dan *abdi dalem*. Bentuk yang digunakan ialah: *joglo*, *limasan*, *sinoman*, *semar tinandhu*, dan segala bentuk perubahannya, sedangkan bagi *kawula dalem* dan orang-orang yang tidak menjabat, hanya diperbolehkan menggunakan bentuk rumah kampung, *dara gepak*, *gedang selirang*, *panggang pe*, dan sebagainya.<sup>54</sup>

Tinggi rendahnya status sosial juga dapat dilihat dari pakaian dan tanda kehormatan (misalnya payung dan atribut lain) yang dipakai. Pakaian dan tanda kehormatan tersebut merupakan pakai kebesaran yang terdiri dari: *kuluk*, *dodot*, *bebed*, *epek*, *celana*, dan payung serta benda-benda pusaka yang bersangkutan. Masing-masing pakaian kebesaran itu bagi tiap derajat tingkatan berbeda, baik bagi patih, bupati, panewu, mantri, atau jajaran memiliki pakaian kebesaran sendiri-sendiri. Pakaian kebesaran itu dipakai pada waktu mengikuti upacara-upacara resmi.<sup>55</sup>

Gelar, baik gelar kebangsawanan maupun jabatan juga turut menentukan status seseorang. Untuk gelar-gelar kebangsawanan di bawah raja berturut-turut seperti berikut:

1. Putera dan puteri raja disebut *gusti*.
2. Cucu (*wayah*) raja disebut *bandara*.
3. Cicit (*buyut*) raja disebut *sentana*.
4. *Canggah* raja disebut *abdi sentana*.
5. *Wareng* raja disebut *abdi kulawarga*.

Di bawah *wareng* sudah dimasukkan ke dalam kelompok *kawula dalem*. Di samping itu, gelar kebangsawanan masih ditambah dengan *kangjeng*, *pangeran*, *harya*, dan sebagainya. Misalnya *Kangjeng Gusti Pangeran Harya, Bandara Harya*, dan sebagainya.

Untuk gelar jabatan pun diatur sedemikian rupa. Gelar jabatan diperuntukkan bagi para *abdi dalem sentaran* yaitu kerabat raja yang menjabat, maupun *abdi dalem* biasa yaitu pejabat yang berasal dari *wong cilik*. Dalam kelompok *abdi dalem* ini terdapat gelar-gelar: *adipati*, *Arya*, *panji*, *tumenggung*, *ngabehi*, *lurah*, dan *rangga*. *Adipati* diperuntukkan untuk patih dan bupati mancanegara maupun bupati pesisir; *arya* dan *panji* untuk *abdi dalem* prajurit; *tumenggung* untuk jabatan bupati; *ngabehi* untuk penewu dan mantri; *lurah* untuk lurah, dan *rangga* untuk pejabat setingkat demang dan mantri.

Kecuali rumah tempat tinggal, pakaian, tanda kehormatan, dan gelar, status seseorang juga dapat dilihat dari bahasa yang dipergunakan dalam pergaulan sehari-hari. Penggunaan bahasa ini berhubungan erat dengan tata krama atau sopan santun pergaulan, dalam hal tata krama, sopan santun, atau *unggah-ungguh*, maka bagi kelompok sosial yang berstatus lebih tinggi pasti memperoleh

kehormatan berupa sembah dari kelompok di bawahnya menurut golongan dan pangkatnya

1. Pangeran adipati anom memperoleh sembah (penghormatan) dari *pangeran putra*, *pangeran riya* yang lebih muda beserta bawahannya.
2. Panembahan memperoleh sembah dari *pangeran riya sentana* yang lebih muda beserta bawahannya.
3. Pangeran adipati hanya memperoleh sembah dari para *sentana* yang lebih muda beserta bawahannya.
4. Pangeran putra dan pangeran memperoleh sembah dari para *sentana* yang lebih muda beserta bawahannya.
5. Adipati memperoleh sembah dari *pangeran riya sentana* yang lebih muda beserta bawahannya.
6. Pengulu diberi salam dari bawahannya.

Begitu seterusnya sampai bentuk penghormatan itu dilakukan oleh para *kawula dalem* (rakyat kebanyakan).

Tradisi sembah atau penghormatan tersebut sengaja diatur pelaksanaannya, agar tata susunan masyarakat feodal lebih tertib dan mantap. Pelanggaran terhadap tata tertib tersebut akan mendapatkan teguran dari atasannya bahkan dari masyarakat, sebab hal itu dianggapnya telah menjadi milik masyarakat yang harus dipatuhi dan dilaksanakan.

Selanjutnya dalam hal berbahasa, *para sentana dalem*, *abdi dalem patih*, bupati sampai dengan lurah apabila datang menghadap raja, bahasa yang digunakan adalah bahasa *bagongan* yaitu bahasa yang dipakai di dalam istana (bahasa *kedhaton*) atau diistilahkan dengan *ukara mantra*. Untuk raja biasanya didahului dengan kata-kata: *wiyosing pangandika dalem*, *ingsun* (bagi raja), *sira* (untuk orang lain). Bagi patih menyebut dirinya *mantra*, kepada

orang lain *pakenira*, *Abdi dalem*, misalnya *wedana* diajak bicara dengan atasannya, menyebut dirinya *ulun* atau *kula*.<sup>56</sup>

Pemakaian sopan santun berbahasa (*unggah-ungguh basa*) sebenarnya merupakan akibat dari adanya stratifikasi sosial. Akan tetapi *unggah-ungguh basa* juga merupakan hasil atau produk dari kehidupan sosial itu sendiri. Dengan kata lain bahwa struktur bahasa merupakan pantulan dari struktur masyarakat. Struktur bahasa yang mengenal *unggah-ungguh basa* merupakan pantulan dari struktur masyarakat yang mengenal tingkatan-tingkatan sosial atau stratifikasi sosial. Makin rumit *unggah-ungguh basa*, pasti makin rumit jugalah stratifikasi sosialnya karena yang disebut dahulu merupakan pantulan dari yang disebut kemudian.<sup>57</sup>

Dilihat dari besar kecilnya tanah lungguh (*apanage*), status sosial seseorang juga dapat diketahui, misalnya:

1. Kelompok *sentana dalem* (keluarga raja) yang memperoleh *apanage*, yaitu:
  - a. Ratu eyang      1000 cacah/karya
  - b. Ratu ibu        1000 cacah
  - c. Ratu kencana   1000 cacah.
  - d. Adipati anom    8000 cacah.
2. Kelompok *abdi dalem*, terdiri dari:
  - a. Para abdi dalem yang dekat dengan raja, seperti *patih lebet* dan *patih jawi* masing-masing memperoleh lungguh 20.000 cacah.
  - b. Kaum elite birokrat menengah, terutama para bupati yang status dan fungsinya menjadi bawahan patih, seperti *bupati (wedana)* *keparak kiwa-tengen* dan *bupati (wedana)*

*gedong kiwa-tengen* masing-masing memperoleh lungguh 5000 cacah.

- c. Kaum elite birokrat rendah, seperti jabatan *kliwon* memperoleh tanah lungguh sebanyak 2000 cacah, *penewu* 1000 cacah, *rangga* 250 cacah, *demang* 200 cacah, dan seterusnya.

Dari tanah yang diperoleh dari raja itu menunjukkan status orang yang menerimanya, juga tingkat ekonominya. Sebab dari tanah yang diterimanya itu, dia berhak untuk memungut hasilnya dari para cacah atau kepala keluarga.

### 3. Rakyat Biasa (*Wong Cilik, Kawula Dalem*).

Dalam budaya Jawa, penduduk dikenal sebagai *kawula dalem* (hamba raja, pelayan raja atau *wong cilik*). Mereka adalah manusia milik raja seperti kuda, gajah atau burung perkutut milik raja. Raja berwenang untuk menentukan nasib *kawula dalem* seperti menentukan nasib kuda, gajah, atau burung perkututnya. Oleh karena itu sikap penduduk Jawa biasanya sangat sopan, rendah hati, sabar, dan *nrima*. Akan tetapi ada kalanya mereka juga dapat naik temperamennya jika perasaannya sudah tidak dapat ditahan karena tekanan atau penghinaan. Inilah gambaran sosok *wong cilik* atau *kawula delem* yang merupakan lapisan terendah dalam struktur sosial masyarakat.

Kalau golongan penguasa (*sentana dalem* dan *abdi dalem*) adalah pendukung kebudayaan besar yang bersumber pada istana, maka *wong cilik* yang sebagian besar terdiri dari petani adalah pendukung kebudayaan kecil yang bersumber di pedesaan.<sup>58</sup> Lingkungan pedesaan menciptakan budaya *wong cilik* yang polos tanpa dibuat kembang-kembang, bahkan tingkah laku dan budaya kasar sangat mendominasi.

Di dalam menjalankan pemerintahannya, penguasa dibantu oleh oleh seperangkat pejabat dan keluarganya, dan sebagai imbalannya mereka diberi tanah *apanage* atau *lungguh*, sehingga tanah *apanage* merupakan tanah jabatan. Pemegang tanah *apanage* disebut *patuh*. *Patuh* yang memperoleh tanah *apanage* ini berhak mendapat layanan kerja dan sebagian hasil dari tanah-tanah *apanage*. Oleh karena *patuh* tidak mengerjakan langsung tanah *apanagenya*, ia kemudian mengangkat seorang *bekel* untuk mengurusnya. *Bekel* selain mewakili *patuh* dan berfungsi sebagai penebas pajak atau memungut hasil bumi dari petani, ia juga mendapat sebagian dari hasil tanah itu atau sebagian dari pajak. Oleh karena itu meskipun *patuh* membebani *bekel* dengan berbagai tugas dan kewajiban, tugas itu dikerjakan dengan baik karena ia dengan mudah mengarahkan petani di *kebekelannya*.<sup>59</sup>

Petani adalah tenaga kerja yang direkrut oleh *bekel* di desanya. Mereka sangat tergantung dari kemauan dan pilihan *bekel* untuk diangkat menjadi *sikep* (kuli penggarap tanah) yang mendapat tanah garapan. Secara tradisional, pembagian hasil sawah yang digarap petani ditentukan sebagai berikut:  $\frac{2}{5}$  *patuh*,  $\frac{2}{5}$  petani, dan  $\frac{1}{5}$  *bekel*. Cara membagi hasil sawah itu disebut dengan *maro*. Tampaknya *patuh* mendapat bagian sama dengan petani, tetapi karena ia mempunyai beberapa bidang *lungguh* maka akan diperoleh bagian yang lebih banyak. Sebaliknya petani hanya mempunyai hasil dari sawah itu dan masih harus dikurangi pajak. Selain pajak, petani masih harus membayar *pundhutan* dan berbagai sumbangan untuk *patuh*. Dengan kata lain, petani mendapat beban rangkap dari penguasa-penguasa di atasnya.<sup>60</sup>

Golongan bawah atau *wong cilik* dalam masyarakat Jawa sebenarnya sangat heterogen. Mereka terbagi dalam beberapa lapisan sosial berdasarkan tinggi

rendahnya pembayaran pajak. Lapisan paling atas adalah *sikep* atau *kuli kencang*, yaitu lapisan yang menguasai tanah, pembagian pajak tanah, kerja wajib pada *patuh* ataupun raja. *Kuli kenceng*, selain diberi wewenang untuk mengerjakan sawah, juga berhak mendiami rumah dan pekarangan. Di bawah *kuli kenceng* adalah *kuli setengah kenceng* atau *kuli indung* yang menempati rumah dipekarangan orang lain. Dan lapisan terakhir adalah *kuli tlosor* yang tidak punya apa-apa dan hidupnya menumpang pada petani lain.

*Kuli indung* dan *kuli tlosor* tidak dikenakan pajak, tetapi tenaga kerjanya dimanfaatkan oleh *kuli kencang* yang menanggung makan dan tempat tinggal mereka. Dengan demikian di desa ada *sikep* yang besar pengaruhnya dapat diukur dari banyaknya *kuli indung* atau *kuli tlosor*. Kuli-kuli ini dapat digunakan oleh *sikep* untuk membuka tanah-tanah desa. Hal ini wajar karena *sikep* yang menanggung beban pajak yang berat menggunakan tenaga kerja kuli-kulinya. *Sikep* yang tidak dapat membayar pajak meninggalkan desa, ikut *sikep* lain, atau sama sekali menjadi *wong angin* (tuna wisma).<sup>61</sup>

Seperti telah disinggung, bahwa raja adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Menurut Anderson, sebagai pusat kekuasaan, raja digambarkan sebagai sumber cahaya yang memancar ke daerah sekelilingnya. Semakin jauh dari sumbernya, cahaya itu berangsur-angsur meredup secara tidak terputus-putus.<sup>62</sup> Perumpamaan konsepsi Jawa ini bukan hanya mengenai struktur negara saja, tetapi juga mengenai hubungan pusat-daerah dan mengenai kedaulatan teritorial.

Berdasarkan konsep kekuasaan tersebut, maka negara dianggap sebagai suatu rangkaian dari beberapa lingkaran konsentris dengan raja di tengah-tengahnya. Raja adalah sumber satu-satunya dari segenap



kekuatan dan kekuasaan, dan dialah pemilik segala sesuatu di dalam kerajaan. Kehormatan dan prestise, keadilan dan kekuasaan, kebijaksanaan dan kemakmuran semuanya terletak padanya. Tetapi harus ada suatu sistem yang teratur untuk menyalurkan semua kebajikan ini kepada rakyat. Sistem itu ialah kerajaan.<sup>63</sup>

Paling dekat dengan raja adalah lingkaran pertama atau lingkaran dalam, yaitu istana atau kraton yang kadang-kadang disebut juga *negara*. Istana raja dan tempat kediaman yang dihuni bersama keluarganya, beserta bangunan-bangunan tempat pengeran dan bangsawan bekerja, termasuk dalam pusat negara yang dianggap magis religius. Pusat ini diurus oleh "pemerintahan dalam" yang disebut dengan *paprentahan lebet* yang dibantu oleh empat orang pegawai utama (*wedana lebet*). Para *wedana lebet* yang masih keturunan raja bergelar *tumenggung* atau *pangeran*. Masing-masing *wedana lebet* dibantu seorang *kliwon*, seorang *kebayan* dan empat puluh orang *mantri jajar*.<sup>64</sup>

Keliling istana atau kraton adalah lingkungan kedua, yaitu ibukota yang disebut *kutanegara* atau disingkat *kutagara*. Untuk mengurus pemerintahan di *kutagara*, raja mengangkat dua orang tumenggung yang menguasai tanah milik raja. Di *kutagara* ini tinggal kaum bangsawan serta *priyayi* tingkat tinggi.<sup>65</sup>

Lingkaran ketiga yang mengitari *kutagara* disebut *negara agung* (disingkat *negaragung*) yang pada zaman Sultan Agung dibagi menjadi delapan bagian, yang masing-masing bagian dikepalai oleh seorang *wedana jawi*. Delapan *wedana jawi* tersebut dikoordinasikan oleh seorang *patih jawi*. Secara administratif lingkungan *negaragung* terdiri dari wilayah-wilayah desa yang dibagi-bagi kepada para *patuh* keluarga raja dan para pegawai sebagai tanah *lungguh* (*apanage*). Pemegang *lungguh* (*patuh*) diharuskan bertempat

tinggal diibukota (*kutagara*), sedangkan urusan lungguh dipercayakan kepada seorang wakil (*bekel*) untuk mengelolanya. Sebagian kecil dari tanah yang ada di *negaragung* ada yang tidak diberikan sebagai tanah *lungguh* tetapi diurus secara langsung oleh istana sebagai tanah mahkota (*narawita*)<sup>66</sup>

Lingkaran keempat yang melingkari *negaragung* disebut *mancanegara* (negeri/propinsi luar), yaitu *mancanegara wetan* dan *mancanegara kulon*, masing-masing dikepalai oleh seorang *wedana bupati*. *Wedana bupati* mengkoordinasikan beberapa bupati yang langsung mengepalai daerah-daerah. Bupati kepala daerah ini biasanya bergelar *tumenggung* atau *raden aria*. Jumlah bupati yang mengepalai tiap-tiap daerah tidak sama, tergantung dari luas daerah yang diurusnya. Pada masa pemerintahan Sunan PB II (1726-1749), daerah Kediri yang meliputi tanah *cacah* seluas 4000 *karya* cukup dikepalai oleh seorang bupati. Sebaliknya daerah Madiun yang meliputi tanah *cacah* 16000 *karya* dikepalai oleh dua orang bupati ialah Raden Tumenggung Martalaya dan Raden Saputra.<sup>67</sup>

Kalau *negaragung* dibagi dalam beribu-ribu tanah *lungguh* kecil dan sebagian kecil tanah mahkota yang langsung mengirim hasilnya kepada pejabat-pejabat di ibukota, *mancanegara* tidak dikaitkan secara langsung di istana tetapi dikuasai oleh jaringan pegawai regional dengan berbagai macam gelar dan status yang oleh Belanda umumnya disebut *regent* (bupati). Pegawai-pegawai ini yang sebagian besar merupakan pemimpin lokal dan sebagian lagi pengurus yang diangkat (istana), memelihara ketertiban dan mengumpulkan pajak dan hasil bumi untuk menghidupkan dirinya sendiri dan mengirimkan sebagian tertentu dari pendapatnya ke ibukota.

Wilayah kerajaan, selain kraton/negara, *kutagara*, *negaragung* dan *mancanegara*, masih ada wilayah

pantai Utara Jawa yaitu *pasisir wetan* dan *pasisir kulon*. Juga ada daerah yang disebut dengan *tanah sabrang* (di seberang lautan) yang merupakan negara-negara vasal.

## ***Catatan Bab II***

1. Koesoemadi, "Soerakarta Adiningrat 200 Jaa", *Djawa* No. 3, Mei 1939, halaman 131.
2. Amen Budiman, "Solo Lahir Berkat Juru Nujum". *Suara Merdeka*, 14 Februari 1992.
3. Pemda Kodia Tingkat II Surakarta, *Kenangan Emas 50 Tahun Surakarta* (Surakarta: Murni Grafika dan STSI, 1997), halaman 21.
4. Suhartono, *Apanage dan Bekel, Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1991), halaman 23.
5. Darsiti Soeratman, *Kehidupan Dunia Kraton Surakarta 1830-1939* (Yogyakarta: Taman Siswa, 1989), halaman 3.
6. *Ibid.*
7. Suhartono, *Op. Cit.*, halaman 24.
8. *Ibid.*, halaman 25.
9. *Ibid.*
10. Dany's Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya; Kajian Sejarah Terpadu Bagian III: Warisan Kerajaan-kerajaan Konsentris* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), halaman 108.

11. Tiknopranoto dan Mardisuwignya, *Sejarah Kutha Sala* (Solo: Pelajar, Tanpa Tahun), halaman 66.
12. Darsiti Soeratman, *Op. Cit.*, halaman 25-26.
13. Tirtopranoto dan Mardisuwignya, *Loc. Cit.*
14. *Ibid.*, halaman 73.
15. Darsiti, *Op. Cit.*, halaman 27.

*Gunungan* adalah tiruan gunung, berupa rangkaian macam-macam sayuran, buah-buahan dan makanan kering, ditambah dengan nasi serta-pauknya untuk upacara *garebeg* di kraton.

*Garebeg* adalah upacara besar yang bersifat keagamaan di dalam kraton, dilangsungkan pada hari besar bulan *Besar*, *Sawal*, dan *Mulud*, Pada hari itu raja keluar dari *kedhaton* menuju ke *setinggal* diikuti oleh ratusan pengiring.

16. Yosodipuro, *Karaton Surakarta Hadiningrat* (Solo: Microdata, 1994), halaman 8.
17. Radjiman, *Sejarah Surakarta I* (Surakarta: Fax. Sastra UNS, 1987), halaman 83.
18. Tiknopranoto dan Mardisuwignya *Op. Cit.*, halaman 76.
19. Darsiti Soeratman, *op. cit.*, halaman 36.
20. *Serat Nitik Kaprajan* (Surakarta: Radyapustaka, 1957), halaman 156-157.
21. Tiknopranoto dan Mardisuwignya, *Loc. Cit.*
22. *Ibid.*, halaman 68.
23. *Ibid.*, halaman 71
24. *Ibid.*, halaman 70
25. Danys Lombard, *Op. Cit.*, halaman 78.

26. Tiknopranoto dan Mardisuwignya, *op. cit.*, halaman 67.
27. Radjiman, *Op. Cit.*, halaman 78.
28. Tiknopranoto dan Mardisuwignya, *Loc. cit.*
29. Darsiti Soeratman, *Op. Cit.*, halaman 39.
30. Tiknopanoto dan Mardisuwignya, *Loc. cit.*
31. Danys Lombard, *Op. Cit.*, halaman 116.
32. George D. Larson, *Masa Menjelang Revolusi, Kraton dan Kehidupan Politik di Surakarta 1912-1942* (Gajah Mada University Press, Yogyakarta: 1990), halaman 23.
33. Sartono Kartodirdjo, "Struktur Sosial dari Masyarakat Tradisional dan kolonial", *Lembaran Sedjarah* No. 4 (Yogyakarta: Fak. Sasdaya, 1969), halaman 26.
34. Darsiti Soeratman, *Loc. Cit.*
35. *Ibid.*, halaman 4.
36. Soemarsaid Moertono, *Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau, Studi Tentang Mataram II, Abad XVI Sampai XIX* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), halaman 62.
37. *Ibid*, halaman 31-32.
38. George D. Larson, *Op. Cit.*, halaman 13.
39. Darsiti Soeratman, *Op. Cit.*, halaman 45.
40. CF Winter dan Ranggawarsita, *Kamus Kawi-Jawa* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1986), halaman 253-261.
41. HJ de Graaf, *Puncak Kekuasaan Mataram, Politik Ekspansi Sultan Agung* (Jakarta: Grafiti Pers, 1986), halaman 272.

42. George D. Larson, *Op. Cit.*, halaman 12.
43. *Ibid.*, halaman 11
44. Darsiti Soeratman, *Loc. Cit.*
45. Moedjanto, "Kepemimpin dan Kekuasaan dalam Budaya Jawa, Suatu Tinjauan Historis", *Makalah Seminar*, diselenggarakan oleh BKSNT dan Lembaga Javanologi Yogyakarta, tanggal 23 Desember 1987, halaman 4.
46. Sartono Kartodirdjo, *Op. Cit.*, halaman 27.
47. *Ibid.*
48. *Ibid.*
49. Moedjanto, *Perseliran dalam Budaya Jawa* (Yogyakarta: Lembaga Javanologi, 1987), halaman 3.
50. *Ibid.*, halaman 5-7.
51. Sartono Kartodirdjo, *Op. Cit.*, halaman 28.
52. *Ibid.*
53. Radjiman, *Sejarah Surakarta II* (Surakarta: Fax. Sastra UNS, 1988), halaman 45.
54. *Ibid.*
55. *Kabar Paprentahan* (Surakarta, 1925), halaman 5-6.
56. Radjiman, 1988, *Loc. Cit.*
57. Moedjanto, *Konsolidasi Kedudukan Dinasti Mataram Lewat Pengembangan Bahasa Jawa* (Yogyakarta: Lembaga Javanologi, 1985), halaman 25.
58. Suhartono, *Bandit-bandit Pedesaan di Jawa, Studi Historis 1850-1942* (Yogyakarta: Aditya Media, 1995), halaman 41.
59. Suhartono, 1991, *Op. Cit.*, halaman 30.

60. *Ibid.*, halaman 27-28.
61. *Ibid.*, halaman 34-35.
62. Benedict ROG Anderson, "Gagasan Tentang Kekuasaan dalam Budaya Jawa", dalam Meriam Budiardjo, *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa* (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), halaman 69.
63. Selo Sumarjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1981), halaman 28.
64. Sartono Kartodirdjo, dkk., *Sejarah Nasional IV* (Jakarta Pn Balai Pustaka, 1977), halaman 2-4.
65. *Ibid.*
66. George D. Larson, *Op. Cit.*, halaman 14.
67. Sartono Kartodirdjo, dkk., *Op. Cit.*, halaman 5.



### BAB III

#### KERAJAAN MATARAM SURAKARTA

##### ***3.1 Hubungan Kerajaan Majapahit-Demak-Pajang-Mataram***

Pada pertengahan pertama abad 16, Kerajaan Majapahit yang bersifat Hindu mengalami keruntuhan. Runtuhnya Majapahit ditandai dengan terjadinya disintegrasi wilayah. Terbukti banyak daerah-daerah Islam tidak mau tunduk lagi terhadap majapahit yang beragama Hindu itu. Oleh penulis *babad*, tanda-tanda runtuhnya Majapahit dilukiskan dengan kata-kata *Sinar Ilang Kertaning Bumi*, yaitu sebagai pertanda tidak ada kemakmuran dan ketenteraman negara. Kata-kata itu sebenarnya merupakan sangkalan yang menunjuk angka tahun 1400 saka atau tahun 1478 Masehi.

Runtuhn Majapahit kemudian diikuti dengan munculnya dinasti baru, Kerajaan Demak di bawah pimpinan Raden Patah, seorang keturunan Majapahit yang telah memeluk Agama Islam. Daerah-daerah Islam di pantai utara Jawa, di bawah dominasi *Bintara* Demak, berusaha melakukan suksesi terhadap Majapahit. Ketika terjadi penyerbuan oleh pasukan Demak, raja Majapahit terakhir Prabu Brawijaya (Bhre Kertabumi) berhasil lolos meninggalkan istana. Bersamaan dengan itu, terlihatlah cahaya memancar terang muncul dari istana Majapahit, naik ke atas dan terbang ke arah barat, jatuh di *Bintara* Demak.

‘Kala meratipun Prabu Brawijaya wau, ing sakala wonten ingkang katingal kados ndaru medal saking kedhaton, kados kilat, swaranipun gumludug nggegirisi, dhawah ing Bintara”.<sup>1</sup>

(Bersama dengan hilangnya raja Brawijaya, pada saat itu terlihat sesuatu bagaikan andaru/cahaya terang yang keluar dari kraton, nampak seperti kilat, suaranya bagaikan guntur yang menakutkan, lalu jatuh di Bintara)

Bagi masyarakat Jawa, berpindahnya kedudukan raja dari Majapahit ke Demak yang ditandai dengan munculnya *andaru* itu merupakan cara atau bentuk pengesahan (legitimasi) yang paling meyakinkan. *Andaru* dianggapnya sebagai sebuah *wahyu* yang mempunyai kekuatan dan kemampuan yang besar. Siapapun jika mendapat wahyu dari Tuhan berupa pulang kraton atau kekuatan suci, maka orang itu akan memimpin tanah Jawa dan akan mewarisi pula tahta kerajaan. Dengan demikian ia akan dapat menguasai tanah Jawa.

Dalam bentuk asalnya, bahasa Arab, wahyu berarti petunjuk, pancaran atau penerangan dari Tuhan. Namun orang Jawa menganggapnya sebagai rahmat atau karunia bagi kedudukan raja (*wahyu kedhaton* atau *cahaya nurbuah*), bagi pujangga (*wahyu kepujangan*), perwira, (*wahyu kaprajuritan*), dan lain-lain. Wahyu digambarkan dengan berbagai bentuk dan rupa, biasanya terlihat seperti bola yang memancarkan cahaya biru, hijau atau putih yang menyilaukan, melintasi angkasa malam, dan masuk ke dalam tubuh manusia yang memperoleh wahyu itu.

Keberadaan Kasultanan Demak, tidak lama, hanya sekitar 40 tahun. Sesudah Raden Patah, keadaan tidak tenang lagi. Raja Demak terakhir, Sunan Prawata dibunuh oleh kemenakannya, Aria Penangsang kira-kira pada tahun 1549. Aria Penangsang memerintah Jipang sebagai raja bawahan. Tujuannya ialah membalas dendam atas kematian ayahnya yang telah dibunuh atas perintah Sunan Prawata. Mungkin

juga Aria Penangsang berwenang menduduki tahta Demak. Akan tetapi pada saat hendak menduduki tampuk kekuasaan, gugurlah dia. Ia terbunuh dalam pertempuran melawan laskar Jaka Tingkir (penguasa Pajang) yang dibantu oleh Ki Penjawi dan Ki Pemanahan. Jaka Tingkir bertindak sebagai pembalas atas kematian Pangeran Hadiri (Kyai Kalinyamat) dari Jepara, ipar Sunan Prawata yang telah menemui ajalnya juga karena ulah Aria Penangsang.<sup>2</sup>

Jaka Tingkir adalah bekas kepala pengawal sekaligus menantu Sultan Prawata. Ia berasal dari Pengging di Selatan Gunung Merapi. Oleh karena lahir di Desa Tingkir, dekat Salatiga, maka ia dinamakan *Jejaka* dari *Tingkir*. Sebagai pewaris kerajaan Demak, Jaka Tingkir kemudian bergelar Sultan Hadiwijaya dan mendirikan kraton di Pajang. Ia memerintah di Pajang selama hampir 20 tahun (1568-1586).<sup>3</sup>

Sultan Hadiwijaya sebagai pewaris kerajaan Demak sebenarnya bukan keturunan langsung dari pendahulunya atau bukan putra mahkota dari raja pendahulunya. Tampilnya Hadiwijaya sebagai raja dirasa tidak melalui prosedur yang biasa. Untuk itu, raja melalui penulis *babad* perlu membuat berbagai upaya legitimasi agar tidak menimbulkan keraguan pada rakyat yang diperintahnya. Di antara bentuk-bentuk legitimasi itu antara lain berupa mitos-mitos keajaiban. Misalnya, Hadiwijaya digambarkan mampu mengalahkan 40 buaya (*bajul*) yang kemudian dengan taatnya mendorong rakit sampai ke Demak. Tanda-tanda akan datangnya raja besar yang nampak pada diri Jaka Tingkir pernah pula diramal oleh Sunan Kalijaga, Katanya:

"Sira enggal ngawulan ing Demak, sebab sira bakal raja, mengku ing tanah Jawa".<sup>4</sup>

(Segeralah engkau mengabdikan kepada Demak, sebab kelak kau akan menjadi raja besar yang berkuasa di tanah Jawa).

Usaha Pengkultusan itu terus dilakukan untuk memperkuat posisi Jaka Tingkir sebagai calon pemangku tahta Demak. hal

ini dibuktikan oleh kata-kata Ki Buyut Banyubiru kepada Ki Mas Manca putera angkatnya:

"Bakal ratumu meh teka ing kene ....., yen wis ana telung sasi nggone ana Banyubiru kena, iku wis ndungkap jumanenging nata. Besuk bakal kekutha ing Pajang, Ratu iku ngluwihi sekti, kineringan ing mungsuh. Karatone angker. Iya iku turuning Dipati Dayaningrat ing Pengging, kowe kang bakal patihe ....."<sup>5</sup>

(Calon rajamu akan datang kemari ....., Kelak setelah tiga bulan lamanya berada di Banyubiru ini, itu sebagai pertanda mulai bertahtanya raja. Raja itu sangat sakti, musuhpun enggan. Kratonnya megah. Dialah keturunan Dipati Dayaningrat dari Pengging, engkaulah yang akan menjadi patihnya .....

Selanjutnya ketika Jaka Tingkir bersama dengan Ki Wila dan Ki Wuragil naik *gethek* (sampan, terbuat dari bambu) hendak ke Demak, ia beristirahat di Butuh. Pada waktu itulah wahyu kraton turun kepadanya.

"Ing wanci tengah dalu Ki Ageng Butuh medal saking griyanipun kaget ninggali pulung kraton cumlorot saking ler kilen, dhawah wonten ing lepen, penggenanipun sare Ki Jaka..... Ki Ageng Butuh murugi dhawahing pulung lan boten samar bilih ingkang sare punika Ki Jaka. Pramila enggal nggigah, "thole tangia, aja turu. Pulung kraton Demak wis ngalih marang sira".<sup>6</sup>

(Ketika pada tengah malam. Ki Ageng Butuh keluar rumah tiba-tiba terlihat di angkasa sebuah cahaya terang (pulung kraton) dari arah barat daya, dan jatuh ke sebuah sungai tempat istirahat Ki Jaka .....Ki ageng Butuh lalu mendatangi tempat itu dan tidak ragu lagi bahwa yang sedang beristirahat adalah Ki Jaka. Kemudian dibangunlah orang itu, "anak muda, bangunlah. *Pulung kraton* sudah beralih kepadamu".

Secara historis, perpindahan pusat kerajaan, baik dari Majapahit maupun dari Demak ke Pajang bukan semata-mata berdasarkan *pulung* atau wahyu belaka, tetapi memang kenyataannya terdapat usaha dari yang bersangkutan untuk mempergunakan haknya sebagai penerus tahta. Hal ini terlihat dari daftar silsilah yang termuat dalam *Babad Tanah Jawi*, sebagai berikut:

1. Prabu Brawijaya penghabisan berputra Raden Patah, Sultan Demak pertama.
2. Prabu Brawijaya penghabisan berputra seorang puteri yang menjadi isteri Jaka Sengara (Adipati Dayaningrat di Pengging), berputera Kyai Kebo Kenanga, berputera Mas Karebet (Jaka Tingkir), Sultan Pajang pertama.

Dari daftar silsilah tersebut terlihat, bahwa Demak dan Pajang sama-sama berasal dari satu dinasti, yaitu Majapahit. Maka tidaklah mengherankan apabila perang batin dan perebutan mahkota selalu terjadi. Demikian pula perebutan kekuasaan berulang kembali pada masa akhir Pajang dan awal Mataram.

Seperti telah disebut, bahwa usaha Aria Penangsang untuk merebut tahta kerajaan Demak dapat digagalkan oleh Jaka Tingkir yang dibantu oleh Ki Penjawi dan Ki Pemanahan. Sebagai hadiah atas jasa-jasa itu, Ki Penjawi dianugerahi tanah di daerah Pati oleh raja Pajang, dan Ki Pemanahan memperoleh daerah Mataram.<sup>7</sup> Ki Pemanahan kemudian membuka daerah Mataram yang semula masih berupa hutan. Ki Pemanahan selanjutnya mengubah nama dirinya menjadi Ki Ageng Mataram.

Semakin lama daerah Mataram tumbuh menjadi daerah yang besar dan berpengaruh. Hal ini menimbulkan kekha-watiran Sultan Hadiwijaya, sebab bisa mengancam eksistensi kerajaan. Bagi Sultan Hadiwijaya Ki Ageng Mataram itu sebagai keturunan Majapahit tentu berusaha agar keturunannya dapat menjadi raja dan menguasai tanah Jawa. Selain itu Sunan Giri pun telah meramalkan bahwa kelak di

Mataram akan bertahta seorang raja besar. Karena merasa gelisah, Sultan Hadiwijaya segera menemui Sunan Kalijaga yang kemudian meminta Ki Ageng Mataram untuk berjanji tidak akan menjadi raja Mataram dan tidak akan mengalahkan Pajang. Namun bila sampai kepada keturunannya, sepenuhnya diserahkan atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa.<sup>8</sup>

Suatu ketika Ki Ageng Mataram pergi ke Gunungkidul, menemui sahabat karibnya Ki Ageng Giring yang juga disebut Ki Ageng Paderesan. Ia mendapat panggilan itu karena pekerjaannya *nderes*, untuk dijadikan gula merah. Ketika Ki Ageng Giring memasang *bumbung* (tempat menampung getah nira/aren) terdengar suara dari pohon kelapa yang berbuah sebuah dan masih muda (*dawegan*):

"Ki Ageng Giring, sapa kang ngombe banyu dawegan iki, yen kongsi entek, iku saturun-turune bakal dadi ratu ge e mengku ing tanah Jawa".<sup>9</sup>

(Ki Ageng Giring barang siapa meminum air kelapa ini sampai habis, seluruh keturunannya akan menjadi raja menguasai tanah Jawa).

Setelah mendengar suara itu Ki Ageng Giring segera turun dari pohon kelapa meletakkan perlengkapan *nderes*, lalu kemudian memanjat pohon kepala yang berbuah sebuah tadi. Kelapa muda itu dipetik, kemudian turun dan segera pulang. Sampai di rumah, kelapa muda itu dipanasi dan diletakkan di dapur. Tidak langsung diminum, tetapi akan diminum sepulang kerja di hutan. Ketika Ki Ageng Pemanahan tiba di rumah Ki Ageng Giring, ia bertanya kepada Nyi Ageng Giring kemana perginya sang suami. Di jawab olehnya, kalau suaminya sedang ke hutan. Karena sudah sering dan terbiasa di rumah Ki Ageng Giring langsung merasa kehausan Ki Ageng Mataram yang masuk ke dapur dan menemukan kelapa muda, maka terus diminum airnya sampai habis tanpa menghiraukan peringatan Nyi Ageng Giring. Sewaktu Ki Ageng Giring sampai kembali di rumah (pulang), ia mendapatkan kelapa muda (*dawegan*) itu airnya sudah habis. Nyi Ageng Giring segera memberitahukan

kalau air kelapa itu habis diminum Ki Ageng Mataram. Semula Ki Ageng Giring gusar juga hatinya. Namun setelah menyadari bahwa itu merupakan kehendak Tuhan, maka diberitahukanlah kepada Ki Ageng Mataram tentang apa yang pernah di dengarnya mengenai suara yang datang dari pohon kelapa yang hanya berbuah satu itu. Dengan demikian *wahyu kraton* jatuh kepada Ki Ageng Mataram.

Meskipun wahyu kraton telah jatuh ke tangan Ki Ageng Mataram, tetapi karena pernah berjanji kepada Sultan Hadiwijaya untuk tidak menjadi raja di Mataram, maka selama hidupnya ia selalu taat kepada raja Pajang sebagai bawahannya. Pada tahun 1583 Ki Ageng Mataram meninggal.<sup>10</sup> Sultan Pajang kemudian menunjuk Sutawijaya (anak Ki Ageng Mataram yang diambil anak angkat oleh Sultan Hadiwijaya) sebagai pengganti Ki Ageng Mataram. Sewaktu diangkat menjadi penguasa Mataram, Sutawijaya diberi gelar *Senapati ing Alaga* oleh raja Pajang. Gelar ini selanjutnya merupakan bagian tetap dari nama raja-raja Mataram.<sup>11</sup>

Senapati yang masih muda itu pada tahun 1584 mulai mengadakan persiapan untuk memerdekakan tanah warisannya. Yang paling mencolok dari kegiatannya itu ialah pembangunan tembok keliling istananya di Kotagede. Ini dilakukannya atas nasihat dan petunjuk salah seorang dari para wali Islam, Sunan Kalijaga seorang ulama besar dari Kadilangu. Selain itu, pada permulaan pemerintahan Senapati, para penguasa bawahan Pajang seperti Adipati Kedu dan Bagelan yang wajib memberi upeti telah terbujuk untuk membangkang terhadap Pajang.<sup>12</sup>

Senapati Mataram pun mengabaikan kewajibannya terhadap raja Pajang. Ia tidak *seba* atau menghadap raja di kraton Pajang untuk memberi penghormatan tahunan. Ia juga menggagalkan pelaksanaan hukuman yang harus dilakukan atas perintah raja terhadap keluarga Tumenggung Mayang. Tumenggung Mayang adalah ipar Senapati Mataram. Seharusnya Tumenggung Mayang dihukum karena pelanggaran yang dilakukan oleh anaknya, Raden Pabelan. Namun Senapati telah memberikan perlindungan kepada tumenggung itu.



Tindakan membangkang yang dilakukan oleh Senapati itu menjadikan raja Pajang Marah dan hendak menindak dengan kekuatan senjata terhadap Mataram. Sebelum terjadi penyerbuan, di dekat Prambanan, ternyata pasukan Pajang telah pecah, lari cerai berai sebagai akibat letusan gunung Merapi dan meluapnya Sungai Opak. Melihat kenyataan itu, Sultan Pajang urung menyerang Mataram. Kemudian Sultan Pajang bersama-sama sisa-sisa pasukannya mundur dan bermukim di Tembayat (daerah Klaten). Selama bermukim di Tembayat, Sultan merasa bahwa kerajaannya telah berakhir dan akan diganti oleh dinasti Mataram yang akan memerintah seluruh Jawa.

Setelah kembali ke kotapraja Pajang, Sultan Hadiwijaya jatuh sakit, dan pada tahun 1578 akhirnya meninggal dunia.<sup>13</sup> Ia dimakamkan di Desa Butuh, sebuah tempat yang tidak jauh di sebelah barat taman kerajaan Pajang yang sekarang dikenal dengan nama kampung Makam haji. Dengan meninggalnya raja Pajang itu, maka wahyu kraton pun *oncat* (beralih) dari Pajang pindah ke Mataram.

Sutawijaya, setelah berhasil menggeser kedudukannya Pajang, menyatakan keinginannya untuk tetap di Mataram. Sejak saat itu ia bergelar Panembahan Senapati.<sup>14</sup> Adapun kekuasaan atas Pajang dipercayakan kepada salah seorang pangeran muda dari Mataram bernama Gagak Bening.<sup>15</sup>

Panembahan Senapati sebagai raja Mataram pertama, karena merasa sebagai pengganti sultan yang sah, berkeinginan menguasai raja yang semula menjadi bawahan Pajang. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Panembahan Senapati telah dapat menguasai daerah-daerah terpenting di Jawa Tengah, baik di pedalaman maupun sepanjang pantai utara, seperti Kedu, Bagelen, Jipang, Demak, Kudus, Pati, dan Jepara serta Madiun di Jawa Timur. Kota Karta dipakai sebagai pusat kerajaan Mataram. Pada tahun 1599, setelah dapat menguasai Jepara, Panembahan Senapati wafat dan dimakamkan di Kotagede dekat makam ayahnya. Penggantinya adalah Raden Mas Jolang, anak satu-satunya dari permaisuri yang masih



hidup, bergelar Susuhunan Adiprabu Anyakrawati Senapati ing Alaga Mataram dan setelah meninggal lebih dikenal dengan sebutan Panembahan Seda Krapyak.<sup>16</sup> Dari gelar kehormatan yang diberikan kepadanya dapat disimpulkan bahwa ia wafat di lapangan pemburu (*krapyak*), jadi mungkin meninggal sewaktu berburu. Ia raja Mataram terakhir yang dimakamkan dekat masjid Kotagede di sebelah bawah makam ayahnya.<sup>17</sup>

Panembahan Seda Krapyak memegang pemerintahan kerajaan Mataram selama ± 12 tahun (1601-1613). Kedudukan raja Mataram kemudian digantikan oleh puteranya, Raden Mas Rangsang yang bergelar Sultan Agung Senapati ing Alaga Ngabdur Rachman.<sup>18</sup> Dalam sejarah, Sultan Agung adalah raja terbesar Mataram yang mempunyai wilayah kekuasaan yang sangat luas, antara lain meliputi seluruh wilayah pantai utara yang terbentang dari Karawang, di sebelah barat sampai Pasuruan di sebelah Timur. Ditambah daerah *mancanegara*, meliputi Priangan Timur, Banyumas, Madiun, Jipan (sebelah barat daya Surabaya), Jipang (sebelah tenggara Rembang), dan Grobogan. Untuk mempertahankan kekuasaan kerajaan Mataram atas wilayah yang telah ditaklukkan, Sultan Agung mewajibkan penguasa-penguasa daerah (para adipati) untuk tinggal di kompleks kraton beberapa bulan dalam setahun. Kalau penguasa daerah itu pulang, ia diwajibkan untuk meninggalkan salah satu anggota keluarga dekatnya sebagai "sandra" di kraton.<sup>19</sup>

Cara lain untuk memperkukuh kekuasaan adalah dengan menerapkan politik perkawinan. Sesudah menang perang, raja dan pengikut utamanya lazimnya menikahi puteri-puteri atau saudara-saudara perempuan dari raja yang kalah. Surabaya yang ditaklukkan Sultan Agung pada tahun 1625, mengharuskan Pangeran Pekik yang dikalahkannya untuk menetap langsung di bawah pengawasannya di ibukota. Pangeran Pekik kemudian dijodohkan dengan adik Sultan Agung sendiri, Ratu Pandan Sari. Selanjutnya ketika anak Sultan Agung yang kelak menjadi Amangkurat I menikah, diambilnya salah satu puteri Pangeran Pekik sebagai isteri.

Dengan sistem perkawinan politik seperti itu, maka para bangsawan saling menganggap sebagai anggota suatu keluarga besar.<sup>20</sup>

Cara berikutnya yang dipakai untuk memantapkan kekuasaan adalah dengan pembentukan sejenis polisi negara yang berada langsung di bawah perintah raja. Fungsinya antara lain sebagai petugas pengadilan dan pengawasan terhadap penguasa-penguasa yang tersebar di seluruh negeri. Kelompok polisi negara ini oleh raja dikendalikan secara ketat agar dapat menguasai wilayah yang luas.<sup>21</sup>

Sultan Agung, raja Mataram yang akbar itu, mempunyai kraton yang sangat besar dan indah di kota Karta. Kraton itu mulai dibangun secara besar-besaran pada tahun 1625, dua belas tahun setelah Sultan Agung naik tahta. Sebelumnya, kraton Sultan Agung masih sangat sederhana. Menurut Jan Vons, duta VOC yang pada tahun 1624 mengunjungi Mataram, keseluruhan kompleks bangunannya masih terbuat dari kayu. Bagian *sitinggilnya* juga belum ada.<sup>22</sup>

Menurut naskah *Babad ing sangkala*, pembangunan bagian kraton tempat penghadapan ini (*sitinggil*) terjadi pada tahun 1547 Saka yang jatuh antara bulan Maret 1625 sampai bulan Februari 1626, ditandai dengan candrasengkala *kuda awarna yaksa*.<sup>23</sup> Pekerjaan ini ternyata merupakan sebuah karya besar, sebab Sultan Agung telah mengerahkan banyak sekali tenaga kerja dari berbagai penjuru daerah untuk menyelesaikannya.<sup>24</sup>

Betapa hebatnya pembangunan kompleks kraton Sultan Agung tersebut dapat disimpulkan dari beberapa berita dalam sumber-sumber sejarah Belanda dan telah disebutkan oleh HJ de Graaf, "rakyatnya tidak pernah lagi dapat beristirahat, oleh karena yang satu belum selesai masih ada lagi yang harus dikerjakan. Akibatnya, setiap hari banyak orang melarikan diri karena tidak kuasa menanggung kesengsaraan dan meninggal karena kelaparan. Oleh karenanya, Sultan Agung harus bertindak dengan kekerasan untuk tetap menahan mereka.

Sekalipun demikian, masih sering juga para penduduk di daerah-daerah pantai melarikan diri".<sup>25</sup>

Anehnya, setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1646 dan digantikan oleh puteranya, Sunan Amangkurat I, raja Mataram yang baru ini ternyata tidak mau menempati kraton ayahnya. Malahan justru memindahkan pusat kerajaan dan mendirikan kraton yang baru di Pleret. Diduga kraton Karta telah rusak sebagai akibat bencana kebakaran yang cukup meluas pada kompleks kraton Karta. Lokasi kraton pleret letaknya tidak begitu jauh dari Karta.<sup>26</sup>

Pembangunan kraton Pleret oleh Sunan Amangkurat I tidak kalah megahnya bila dibandingkan dengan Sultan Agung ketika membangun kota Karta. Satu-satunya proyek yang paling banyak menyita waktu dan tenaga kerja sedemikian besar adalah pembuatan telaga buatan yang sangat besar dan pembuatan bendungan-bendungan. Raja Mataram terkenal itu sangat mengidamkan mempunyai sebuah kraton di sebuah pulau buatan. Oleh karena itulah ia membangun telaga buatan yang sedemikian besar dan bendungan-bendungan tersebut. Cita-citanya memang terkabul. Ketika utusan VOC Abraham Verspreeet pada tanggal 16 Oktober 1668 berkunjung ke istana Pleret, diceritakan bahwa ia telah melewati jembatan di atas parit yang mengelilingi kraton dan baru kemudian tiba di alun-alun. Dengan demikian Sunan Amangkurat I bagaikan tinggal di atas sebuah pulau kecil.<sup>27</sup>

Kejayaan kraton Sunan Amangkurat I yang megah itu tidak berlangsung lama. Pada tanggal 2 Juli 1677 para prajurit Madura di bawah pimpinan Trunajaya telah menyerang kratonnya. Serangan itu berhasil dengan baik, kraton Pleret jauh ke tangan mereka. Akan tetapi Sunan Amangkurat I masih beruntung dapat meloloskan diri ke arah barat. Dalam pelariannya, ia jatuh sakit dan meninggal. Jenazahnya dimakamkan di Tegalarum, beberapa kilometer sebelah selatan Tegal. Oleh karenanya ia juga dikenal dengan nama Sunan Amangkurat Telagarum.<sup>28</sup>

Sebelum Sunan Amangkurat I menutup mata untuk selama-lamanya, ia telah menyerahkan pusaka-pusaka lambang kebesaran kerajaan Mataram kepada Pangeran Adipati Anom yang menggantikannya sebagai Sunan Amangkurat II. Pasukan Trunajaya kemudian dapat dikalahkan berkat bantuan pasukan Kompeni Belanda (VOC) di bawah pimpinan Cornelis Speelman. Dan Mahkota kerajaan Mataram yang dirampas musuh dapat kembali diserahkan kepada sunan yang baru. Sunan Amangkurat II lalu kembali menuju Pleret. Akan tetapi keadaan kraton dan sekitarnya sangat menyedihkan. Bangunan-bangunannya banyak yang rusak dan terlantar tidak terpelihara, dan taman-taman ditumbuhi rumput-rumput liar Jacop Couper, pembesar Kompeni di Jepara menulis, "Ibukota Mataram lebih menyerupai hutan belantara daripada sebuah pusat kerajaan".<sup>29</sup>

Sunan Amangkurat II yang mengetahui keadaan kraton Pleret rusak berat, menyebabkan sunan tidak mau lagi bertahta di tempat itu. Lebih-lebih menurut kepercayaan Jawa, sebuah kraton yang pernah diduduki musuh berarti telah tercemar, sehingga sunan memutuskan untuk memindahkan ibukota dan kraton ke daerah lain.

Sebelum pembangunan kraton baru itu dilaksanakan, terlebih diadakan pembicaraan dengan patih dan para adipati mengenai tempat yang baik untuk lokasi bakal kraton. Sebagian Adipati mengusulkan sebaiknya kraton itu didirikan di daerah Tingkir (dekat Salatiga), namun sebagian lagi mengusulkan daerah Logender. Kedua usul tadi ternyata menjadikan sunan tidak begitu berkenan. Kemudian Adipati Urawan mengusulkan sebaiknya jika daerah Wanakerta dijadikan tempat mendirikan istana, karena tanahnya luas dan rata. Di samping itu, Adipati Urawan juga mengemukakan alasan atau latar belakangnya kenapa memilih Wanakerta. Diceritakan oleh Adipati Urawan, bahwa kakek dari Sunan Amangkurat II, yaitu Pangeran Pekik yang bertempat tinggal di Sembuyan pernah menerima *wisik* ketika berada di Butuh di tengah perjalanannya menuju Mataram.

"He Pekik, wruhanana, kowe besu duwe putu lanang, jumeneng ratu, kedhatone ing alas Wanakerta, kaprenah sakuloning Pajang".<sup>30</sup>

(Hai Pekik, ketahuilah. Di belakang hari cucu laki-lakimu akan menjadi raja. Istananya di hutan Wanakerta, di sebelah barat Pajang).

Begitu mendengar perkataan Adipati Urawan, Sunan Amangkurat II teramat senang hatinya karena sejalan dengan kehendaknya yang ingin memindahkan istananya ke sebelah timur, yaitu ke Wanakerta yang letaknya di daerah Pajang. Kemudian raja memerintahkan kepada Pangeran Nerangkusuma untuk menebas hutan Wanakerta untuk dibangun istana. Setelah selesai, Sunan Amangkurat II menempati istananya yang baru itu pada tanggal 11 September 1680 dan mengganti nama Wanakerta menjadi Kartasura Hadiningrat. Tentang perpindahan pusat kerajaan Mataram di Pleret Wanakerta ini diceritakan cukup padat dalam Babad Tanah Jawi, sebagai berikut:

".....Sang Prabu inggih sampun bidal saking Samawis lan sabalanipun sadaya tuwin Amral sa-Kumpeni-nipun, lampahipun sang prabu sampun dumugi ing Wanakerta, lajeng angedhaton pinuju ing dinten Rebo Pon tanggal ping pitulikur wulan Ruwah ing tahun Alip angka 1603. Ing Wanakerta kaelih namanipun kanamekaken negari ing Kartasura Hadiningrat ....."<sup>31</sup>

(Sri Baginda telah berangkat dari Semarang dengan semua bala prajuritnya bersama Amral dengan semua bala Kumpeninya. Perjalanan Sri Baginda telah sampai di Wanakerta, lalu bertempat tinggal di istana, itu terjadi pada hari Rabu Pon tanggal 27 bulan Ruwah tahun Alip 1603. Wanakerta kemudian diganti namanya menjadi negeri Kartasura Hadiningrat .....).

Menurut Babad Tanah Jawi tersebut dapat diketahui bahwa lahirnya kraton Kartasura terjadi pada saat perpindahannya

dari kraton Pleret pada tanggal 27 Ruwah 1603 yang bertepatan dengan tanggal 11 September 1680.

### ***3.2. Perpindahan Pusat Kerajaan Mataram Kartasura ke Surakarta***

#### **1. Sebab-sebab Perpindahan: *Geger Pacinan***

Keadaan kerajaan Mataram Kartasura yang berdiri selama kurang lebih 60 tahun (1680-1746) mengalami pasang surut. Sejak Sunan Amangkurat II menduduki tahta, ia pun bersengketa dengan adiknya, Pangeran Puger. Bahkan setelah Sunan Amangkurat III (putra Sunan Amangkurat II) menjadi raja, Pangeran Puger dapat merebut tahta kerajaan. Ini terjadi pada tahun 1709. Pangeran Puger kemudian bergelar Sunan Paku Buwana I.

Keberhasilan Pangeran Puger menguasai tahta kerajaan Mataram, ternyata disokong oleh adanya campur tangan dari Kompeni Belanda. Belanda berhasil menangkap Sunan Mas (Amangkurat III) dan membuangnya ke Srilangka. Campur tangan Kompeni Belanda dalam urusan intern kerajaan Mataram ini sebenarnya telah berlangsung sejak akhir masa pemerintahan Sunan Amangkurat I (1645-1677) ketika beliau sedang menghadapi kehancuran sebagai akibat dari perang Trunajaya.<sup>32</sup> Perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh Pangeran Puger terhadap Sunan Amangkurat III, dalam sejarah tradisional tercatat sebagai Perang Suksesi Jawa Pertama.

Kemudian Perang Suksesi kedua, terjadi ketika Sunan PB I meninggal dunia pada tahun 1719. Salah seorang puteranya, Pangeran Mangkunegara dengan dukungan Kompeni yang sudah mempunyai garnisun di Kartasura, menggantikan kedudukan Sunan PB I sebagai raja baru bergelar Susuhunan Amangkurat IV. Namun dua saudaranya, yakni Pangeran Purbaya dan Pangeran Blitar berusaha untuk merebut kekuasaan. Kedua pangeran itu pindah ke Karta dan menghidupkan kembali kraton yang lama yang telah ditinggalkan semasa Sultan Agung. Saudaranya yang lain,

Pangeran Diponegara pergi ke Jawa Timur dan bergabung dengan pemberontak dari daerah Surabaya. Diponegara menamakan dirinya dengan sebutan *Erucakra* yaitu sebuah nama untuk *Ratu Adil*.

Keadaan menjadi semakin rumit, ketika saudara Sunan PB I bernama Pangeran Arya Mataram mengungsi ke Pati dan mengaku dirinya sebagai sunan sebagaimana kedua saudara Amangkurat IV. Perselisihan antara Pangeran Arya Mataram, Pangeran Purbaya, Pangeran Blitar, dan Pangeran Diponegara dengan Sunan Amangkurat IV berakhir ketika keempat pangeran itu berhasil ditangkap dan kemudian dibuang ke Srilangka. Sunan Amangkurat IV meninggal dunia pada tahun 1727. Ia diganti tanpa kesulitan oleh puteranya bergelar Susuhunan Paku Buwana II (1727-1749).

Pada masa pemerintahan Sunan PB II, terjadi perpecahan lagi dalam istana, terutama dua saudara Sunan PB II, yaitu Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Mangkunegara terlibat dalam pertarungan terbuka. Kecuali itu, juga diwarnai dengan pecahnya perang Cina tahun 1740. Perang Cina (*Geger Pacina*) itu semula bersumber di Batavia (sekarang Jakarta) dan menjalar sampai ke seluruh pulau Jawa. Penyebabnya adalah pembunuhan massal yang dilakukan Kompeni Belanda di Batavia terhadap orang-orang Cina. Sebagai akibat beratnya tekanan dari pemerintah Belanda di bawah Gubernur Jenderal Valkenier, orang-orang Cina lalu mengadakan pemberontakan. Kaum pemberontak Cina di bawah pimpinan Tai Wan Sui berhasil membunuh seorang pimpinan pasukan Belanda bernama Van Velsen.<sup>33</sup>

Semula pemberontakan Cina berusaha diredam oleh Sunan PB II dengan menunjuk patih Adipati Natakusuma beserta Tumenggung Martapura dan Tumenggung Mangunhoneng untuk membujuk Belanda agar mengurangi tekanan atau memberi keringanan kepada orang-orang Cina dalam membayar pajak. Namun usaha sunan tidak membuahkan hasil, bahkan Patih Natakusuma dianggap sebagai musuh Belanda yang paling kuat. Oleh karena itu Gubernur Semarang, TF Tell-



ing membujuk sunan agar Patih Natakusuma segera disingkirkan dari kraton, jangan sampai membantu pemberontakan Cina. Patih Natakusuma lalu dipecat dan diasingkan ke Ngakap.<sup>34</sup> Sunan PB II kemudian menunjuk pengganti Patih Natakusuma, yaitu Tumenggung Cakrawijaya (menantu Sunan Amangkurat IV) dan bergelar Raden Adipati Pringgalaya.<sup>35</sup>

Oleh karena Sunan PB II lebih berpihak kepada Kompeni landa daripada orang-orang Cina, dan bahkan memecat Patih Natakusuma, menimbulkan kemarahan yang mendalam di kalangan kaum pemberontak Cina itu. Pengikut-pengikut Patih Natakusuma dan orang-orang Cina ternyata mendapat dukungan dan simpati dari para bupati pesisir utara Jawa, antara lain Jepara, Juwana, Demak, Rembang, tegal, Semarang, dan Surabaya. Di kota-kota itu terjadi bentrokan-bentrokan berdarah dengan orang-orang Kompeni, bahkan kota Semarang sudah terkepung oleh pasukan Cina.<sup>36</sup>

Suatu perasaan anti Kompeni menjalar pula di kalangan istana. Terbunuhnya salah satu komandan garnisun Belanda, Van Velsen pada tanggal 10 Juli 1741 menunjukkan betapa beratnya tekanan balik yang dilancarkan oleh orang-orang Cina itu kepada pasukan Belanda. Oleh karena orang-orang Belanda merasa terancam keselamatannya, akhirnya mereka memutuskan untuk meminta bantuan pada Pangeran Cakraningrat dari Sampang, Madura. Sebab pasukan bantuan yang diharapkan datang dari Jakarta Tidak kunjung tiba. Pangeran Madura ini memang sejak lama mempunyai hasrat untuk melepaskan diri dari kraton Mataram dan ingin mendirikan sebuah kerajaan baru di bagiantimur pulau Jawa.<sup>37</sup>

Perasaan permusuhan dari Pangeran Cakraningrat terhadap Mataram tersebut dimanfaatkan oleh Kompeni Belanda sebaik mungkin, dan mereka senantiasa berusaha untuk memperuncing hubungan Pangeran Sampang dengan kraton Kartasura. Pangeran Cakraningrat menjanjikan bantuannya, asalkan diperbolehkan melepaskan diri dari Kartasura. Kompeni Belanda pun membiarkan Pangeran



Cakraningrat menduduki beberapa daerah Jawa Timur, seperti Gresik, Lamongan, dan Tuban.

Sunan PB II yang melihat sepak terjang Pangeran Cakraningrat diliputi perasaan cemas. Dalam keadaan kalut, Sunan PB II akhirnya terpaksa meminta bantuan Kompeni dengan menjanjikan kerjasama, asalkan Pangeran Madura itu dicegah dalam usahanya melepaskan diri dari Kartasura. Kesempatan ini dipakai Belanda dengan sebaik-baiknya. Ketika duta dari Kartasura bernama Tumenggung Tirtawiguna diutus ke Semarang untuk meminta bantuan Kompeni, para komisaris Belanda mengabulkan permintaan itu dan mengirimkan Kapten Joan Andries van Hohendorff ke Kartasura. Ia didampingi seorang vaandrig bernama Hogewith, seorang asisten bernama Tontlemonde yang menguasai bahasa Jawa, beberapa serdadu, dan seorang kopral.<sup>38</sup> Kedatangan Van Hohendorff ke Kartasura pada bulan Maret 1743 ternyata dapat mengambil hati sunan, karena ketika ia tiba Sang Prabu sedang diliputi kecemasan dan ketakutan.<sup>39</sup>

Pada tanggal 30 Juni 1742, pasukan gabungan pemberontak yang terdiri dari orang-orang Cina, Kapitan Sepanjang, Bupati Pati (Tumenggung Mangunoneng), Bupati Grobogan (Raden Adipati Martapura/Adipati Sujanapura), salah seorang cucu Sunan Amangkurat II, dan putera Pangeran Tepasana yang bernama Raden Mas Garendi berhasil merebut kraton Kartasura, hingga memaksa Sunan PB II menyingkir keluar istana.<sup>40</sup>

Raden Mas Garendi, karena dipandang paling berjasa dalam memimpin pemberontakan, oleh orang-orang Cina kemudian diangkat menjadi raja baru di Kartasura (sebagai raja tandingan) menggantikan Sunan PB II yang melarikan diri. Sebagai raja, Raden Mas Garendi menggunakan gelar Susuhunan Amangkurat Amral atau yang lebih dikenal dengan Susuhunan Amangkurat Prabu Kuning (Sunan Kuning).<sup>41</sup> Sementara itu, Sunan PB II dalam usahanya meloloskan diri dari kraton untuk mencari keselamatan, menuju ke daerah Ponorogo. Ia didampingi oleh Pangeran Adipati Anom dan

Mayor van Hohendorff. Lolosnya Sunan dari istana Kartasura terjadi pada hari Sabtu Wage, 27 Rabingulakhir tahun Alip 1667 dengan sengkalan *swara karungu obahing bumi* (1667 Jawa atau 1742 Masehi).<sup>42</sup>

Gubernur Jenderal di Batavia Valkenier setelah mengetahui peristiwa penyerbuan kraton Kartasura oleh kaum pemberontak Cina, segera memerintahkan kepada pasukan Kompeni supaya mengadakan persiapan guna membantu Sunan merebut kembali kraton Kartasura. Namun ketika pasukan Kompeni bersiap-siap untuk menghalau kaum pemberontak, diluar dugaan Pangeran Cakraningrat telah berhasil memukul mundur musuh dan bahkan dapat menduduki kembali kraton Kartasura. Hal ini sebenarnya diluar rencana Belanda, yang merasa terancam juga oleh tindakan berani Pangeran Sampang itu. Maka Belanda mengirimkan pembesar mereka di Surabaya, Raynier de Klerk untuk membujuk Pangeran Cakraningrat kembali ke Madura dan menyerahkan kraton kepada Kompeni.<sup>43</sup>

Sunan Kuning yang sempat bertahta di Kraton Kartasura kemudian dapat ditangkap dan diserahkan pada Gubernur Belanda di Semarang. Sedangkan para pangeran yang membantu kaum pemberontak, seperti Pangeran Wijil dan Tumenggung Mangunoneng disingkirkan ke Batavia. Namun Pangeran Prangwadana (Raden Mas Said/Raden Suryakusuma) dapat meloloskan diri, kemudian pergi ke Gumantar dan menjadi raja dengan gelar Sunan Hadi Prakosa. Pangeran Harya Buminata yang juga berhasil lolos, pergi ke Gunungkidul dan menjadi raja dengan gelar Sultan Dandun Martengsari.<sup>44</sup>

Tepat pada tanggal 24 Desember 1742, Sunan PB II dapat memasuki kembali istana Kartasura, disambut dengan bunyi genderang dan tembakan salvo oleh sepuluh orang serdadu VOC.<sup>45</sup> Kembalinya Sunan PB II dari Ponorogo ini terjadi pada hari Rabu Legi, 22 Sawal, tahun Alip 1667, ditandai dengan Candrasengkala *kontap karungu rengganing praja* (1667 Jawa atau 1742 Masehi).<sup>46</sup>

Perlu ditambahkan, bahwa dalam masa pelarian di Ponorogo, Sunan PB II menggunakan gelar Panembahan Brawijaya. Ini berarti bahwa secara tidak langsung Sunan menganggap dirinya sebagai keturunan Sunan Lawu (Raden Guntur atau Raden Gugur), putra Prabu Brawijaya penghabisan dari Majapahit.<sup>47</sup> Selanjutnya setelah dapat kembali ke Kartasura, Sunan tidak dapat tenang lagi duduk di atas singgasana istana. Sebab mendapatkan istananya dalam keadaan rusak berat sehingga tidak mungkin untuk dibangun kembali. Oleh karena itulah Sunan PB II memutuskan untuk mendirikan kraton baru di tempat lain.

## **2. Pemilihan Lokasi Pusat Kerajaan Surakarta**

Akibat rusaknya bangunan istana Kartasura oleh pemberontakan Cina, maka Sunan berkehendak untuk membangun istana di tempat lain. Sunan PB II menginginkan agar kratonnya yang baru nanti didirikan di sebuah tempat lebih ke timur dari Kartasura. Untuk itu Sunan memerintahkan kepada kedua orang patihnya, Pringgalaya dan Sindureja melakukan penelitian bersama komandan VOC, Mayor van Hohendorff. Bersama mereka turut pula ahli nujum Kyai Tumenggung Honggowongso, Raden Tumenggung Puspanagara, Raden Tumenggung Mangkuyuda. Mereka diperintahkan mencari tempat yang baik untuk dibangun istana.

Setelah beberapa lama berjalan, mereka menemukan tiga tempat yang cocok untuk tempat pembangunan istana, yaitu:<sup>48</sup>

- a. Desa Kadipala. Daerahnya rata, subur, tanahnya bersih, Patih dengan Mayor Hohendorff menyetujuinya, tetapi para ahli rujum kurang setuju, sebab walaupun kerajaan nanti dapat adil dan makmur, namun cepat rusak, banyak perang saudara.
- b. Desa Sala. Menurut Tumenggung Honggowongso, walaupun daerahnya penuh dengan rawa, namun sangat baik untuk pusat kerajaan. Sebab nantinya akan menjadi kerajaan besar, panjang umur, aman dan makmur, tidak ada perang,

berwibawa. Tetapi Mayor Hohendorff tidak menyetujuinya melihat daerahnya tidak rata, penuh rawa serta dekat dengan *bengawan* (sungai).

- c. Desa Sanasewu. Daerahnya rata, namun menurut Raden Tumenggung Honggowongso tempat itu kurang cocok sebab kerajaan akan berumur pendek, banyak perang besar, dan rakyat akan kembali ke zaman Budha.

Dari ketiga lokasi alternatif yang akan dipakai sebagai tempat pembangunan istana, akhirnya semua utusan sepakat untuk memilih Desa Sala. Hasil permusyawaratan tersebut kemudian diberitahukan kepada Sunan di Kartasura. Setelah menerima laporan, agaknya Sunan PB II masih belum mantap untuk memutuskan memilih Desa Sala. Oleh karena itu Sunan masih merasa perlu mengirim utusan lagi untuk melakukan penelitian dan pengecekan lebih lanjut. Empat orang pejabat istana yang ditunjuk untuk melakukan penelitian lanjutan di Desa Sala, adalah Pangeran Wijil, Seorang *abdi dalem suranata* (urusan keagamaan) bernama Kyai Kalipah Buyut, Mas Pengulu Fakih Ibrahim, dan pujangga kraton Raden Tumenggung Tirtawiguna.

Keesokan harinya keempat orang *abdi dalem* itu berangkat menunaikan tugasnya. Setelah menjelajah kawasan di sebelah Timur Kartasura, mereka menjumpai sebidang tanah yang bagus dan berbau *wangi* (harum) yang letaknya di sebelah timur laut Desa Sala. Sesuai dengan keadaan yang berbau *wangi* (harum), maka desa tersebut dinamakan Desa talawangi (sekarang menjadi kampung Yasadipuran dan Wirapaten). Setelah tanah tersebut diukur untuk membuat pancangan bangunan istana, ternyata kurang luas. Maka selanjutnya para utusan melakukan *semedi* (bertapa mati raga) beberapa hari lamanya di tepian *kedhungkol* (rawa) untuk mendapatkan *wisik* (ilham) dari Tuhan.

Pangeran Wijil dan Tumenggung Tirtawiguna akhirnya dapat menyelesaikan tugas mereka. Mereka telah berhasil mendapatkan ilham, bahwa dari semula Desa Sala memang telah ditakdirkan menjadi sebuah kerajaan besar. Akan tetapi

untuk mengetahui sejarah asal-usulnya, mereka harus berbicara dengan sesepuh Desa Sala, Kyai Gede Sala. Mereka kemudian pergi ke Desa Sala untuk mendapatkan penjelasan dari Kyai Gede Sala tentang *cikal-bakal* atau sejarah Desa Sala.<sup>49</sup>

Menurut penuturan Kyai Gede Sala, pada masa kerajaan Pajang, seorang putera dari Tumenggung Mayang bernama Raden Pabelan telah dibunuh. Sebab tertangkap basah masuk ke dalam kraton dengan sembunyi-sembunyi dan ketahuan bermain asmara dengan puteri *sekar kadhaton* Ratu Emas, putera Sultan Hadiwijaya. Selanjutnya mayat Raden Pabelan dihanyutkan di Sungai Laweyan (Sungai Braja). Akhirnya terdampar di pinggir sungai di sebelah timur Desa Sala

Pada waktu itu yang menjadi penguasa di Desa Sala adalah Bekel Kyai Sala. Pada suatu malam. Bekel Kyai Sala pergi ke sungai dan tiba-tiba melihat mayat Jaka Pabelan terapung di tepi sungai. Ia berusaha mendorong mayat itu ke tengah aliran sungai dengan harapan agar hanyut dibawa arus air. namun esok harinya, sangat mengherankan, mayat tersebut kembali lagi berada di tempat yang sama. Bekel Kyai Sala berusaha pula mendorong ke tengah sungai lagi. Begitulah peristiwa itu terjadi sampai tiga kali, mayat itu tetap tidak mau hanyut. Secara tidak terduga, tiba-tiba Bekel Kyai Sala memperoleh *wangsit* yang meminta agar mayat Jaka Pabelan dikebumikan di tempat itu, di sebelah barat Desa Sala. Sebab di belakang hari tempat itu akan berubah menjadi sebuah kerajaan besar dan sejahtera. Oleh karena Bekel Kyai Saka tidak tahu nama diri mayat itu, maka disebutnya Kyai Bathang.<sup>50</sup>

Empat orang utusan Sunan, setelah mendapatkan penjelasan dari Kyai Gede Sala, mereka segera mengunjungi makam Kyai Bathang. Dilihatnya kawasan tempat pemakaman itu ternyata benar-benar sebuah kawasan yang indah dan luas. Satu-satunya kekurangan adalah terletak dekat rawa yang lebar dan dalam. Keadaan ini kemudian dilaporkan kepada Sunan oleh para utusan. Selanjutnya Sunan memanggil Kyai Tohjaya dan Kyai Yosodipuro serta Raden Tumenggung Padmanagara untuk diminta pertimbangan dan saran.<sup>51</sup>

Sebelum mereka memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Sunan, terlebih dahulu mereka pergi ke Desa Sala untuk melihat keadaan. Setelah berjalan mengitari seputar rawa Desa Sala, akhirnya ditemukanlah sumber mata air dari rawa itu (*tirta kamandanu*). Dengan demikian telah mantaplah mereka untuk memilih Desa Sala sebagai tempat pembangunan kraton yang baru. menurut catatan Elzo Sterrenberg, seorang komandan Kompeni di Pantai Jawa Timur, menyebutkan bahwa terpilihnya Desa Sala sebagai bakal tempat didirikannya istana terjadi kira-kira pada bulan September 1744 saat mayor dan Hohendorff berada di Kartasura.<sup>52</sup>

Setelah melalui pembicaraan-pembicaraan dengan semua petinggi kerajaan, sunan memerintahkan kepada para adipati *mancanagara* untuk menyerahkan balok-balok kayu, sesuai dengan kemampuan masing-masing, yang akan digunakan untuk menutup seluruh rawa Desa Sala. Setelah balok-balok kayu itu terkumpul, segera dimasukkan ke dalam rawa sampai penuh. Akan tetapi, sumber mata air di rawa itu ternyata tidak dapat tersumbat sama sekali, bahkan airnya bertambah meluap.

“Sanadyan kalebetana sela utawi balok ingkang ageng-ageng ngantos pintin-pinten ewu, meksa boten saget pampet, malah wedal ing toya saya ageng ambalabar pindha laut’.<sup>53</sup>

(Meskipun beribu-ribu batu dan balok dimasukkan ke dalam rawa, akan tetapi sumber mata air itu belum bisa tersumbat, malahan airnya semakin membesar menjadi seperti lautan)

Mantra-mantra maupun berbagai sesaji yang diberikan Pangeran Wijil, Kyai Kalipah Buyut dan Kyai Pengulu Pekik Ibrahim tidak berhasil menghentikan mata air rawa tersebut. Bahkan mengherankan dari sumber air rawa muncul ikan-ikan yang biasa hidup di laut. Melihat kenyataan ini, Pangeran Wajil dan Kyai Yosodipuro memutuskan untuk bersamadi (bertapa), mengheningkan cipta dan memusatkan kekuatan adi

kodratinya di sebelah timur rawa itu, tepat di sebelah selatan *kedhungkol* (sekarang menjadi kampung Yasadipuran).<sup>54</sup>

Sesudah tujuh hari tujuh malam bertafakur dan bertapa mati raga di tempat itu, tanpa makan dan minum, akhirnya terdengarlah wisik (suara gaib) sebagai berikut:

“Heh kang padha mangun pujabrata, wruhanira, telenging rawa iki ora bisa mampet, amargadadi tembusaning samodra kidul. Ewadene yen bisa ngudi pampete, kang dadi sarenane tambaken Gong Kyai Sekar Delima, godhong lumbu lawan sirah tledek, ing kono bisa pampet ponang teleng”.<sup>55</sup>

(He, kalian yang sedang bertapa, Ketahuilah, bahwa sumber air rawa itu tidak bisa kering, karena merupakan tembusan Samudera Selatan. Kalau kalian menginginkan keringnya rawa, tutuplah dengan Gong Kyai Sekar Delima, daun lumbu, serta kepala penari (*tledek*). itulah sarananya agar sumber air itu berhenti mengalir)

Saat Pangeran Wijil dan Kyai Yosodipuro menerima wangsit terjadi pada malam *Anggara Kasih* (hari Selasa Kliwon) tanggal 29 bulan Sapar, tahun Jimawal 1669 (1743 M).<sup>56</sup>

Setelah berulang kali memikirkan wangsit yang diterima Pangeran Wijil dan Kyai Yosodipuro, Sunan PB II mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya *wangsit* itu merupakan sebuah perlambang. Oleh karena itu harus di tafsirkan maknanya, terutama perkataan *gong* dan *tledek*. *Gong* adalah merupakan simbol bibir, yaitu sumbernya suara. Secara utuh Gong Sekar Kyai Delima maksudnya melalui bibir yang menceritakan asal mulanya Desa Sala, yaitu Kyai Gede Sala. Kemudian *tledek* adalah nama lain dari *ringgit*, yang berarti uang. Dengan demikian jelas, bahwa Kyai Gede Sala menghendaki uang sebagai ganti rugi atas tanah hak miliknya yang akan di gunakan untuk kraton.<sup>57</sup> Maka Sunan PB II segera memberikan uang sebanyak 10.000 ringgit kepada Kyai Gede Sala sebagai konsesi atas penyerahan tanah di kawasan Desa Sala.<sup>58</sup>



Kyai Gede Sala setelah menerima dana, kemudian minta izin untuk segera bekerja menutup sumber air rawa. Setelah bertafakur di makam Kyai Bathang, ia menemukan sarana lainnya berupa bunga delima dan daun lumbu yang kemudian digunakan untuk menutup sumber mata air itu. Akhirnya sumber mata air dapat tersumbat dan berhenti mengalir.<sup>59</sup>

Setelah semua kelihatan kering dan merata tanahnya, dan kelihatan luas, kemudian Sunan memerintahkan agar melakukan pengukuran terhadap tanah yang akan dipakai untuk mendirikan istana. Yang diberi tugas mengukur adalah Patih Adipati Pringgalaya dengan disaksikan Mayor van Hohendorff, Kyai Tumenggung Puspanegara, Kyai Tumenggung Honggowongso, Kyai Tumenggung Honggowongso, dan Kyai Tumenggung Tirtawiguna. Pengukuran terhadap lurusnya kraton sejajar dengan kraton Kartasura dilakukan oleh Pangeran Wijil dan Kyai Kalipah Buyut. Sedangkan pengukuran dari segi estetik atau keindahan kraton (*adu manisnya*) diserahkan kepada Kyai Yosodipuro dan Kyai Tohjaya,<sup>60</sup>

Setelah selesai rancangannya, selanjutnya Sunan memerintahkan mengambil tanah dari Desa Talawangi dan Sanasewu untuk mempertinggi Desa Sala. Para tukang dikerahkan untuk membangun istana. Lurah *undhagi* (tukang kayu) dipimpin oleh Kyai Prabasena, dibantu Kyai Karyasena, Kyai Ragegpura, Kyai Srikuning, ditambah tenaga dari *mancanegara*. Sebagai penanggung-jawab pembangunan, Patih Raden Adipati Pringalaya dengan para *bupati jawi* dan *lebet*.

Pembangunan Istana raja di Desa Sala pada tahap awal telah berhasil diselesaikan, namun pagar keliling kraton untuk sementara masih terbuat dari *bethek* (anyaman bambu), bukan dari bahan batu bata.<sup>61</sup> Sebagai peringatan selesainya pembangunan istana itu, di tandai dengan sengkalan *swarga sapta hamayang bawana* (1670 Jawa atau 1745 Masehi).<sup>62</sup>

Pada akhir tahun 1745 Sunan PB II terlihat sibuk sekali mengadakan persiapan guna perpindahan kraton. Dan baru pada tanggal 17 Februari 1746 Sunan PB II dapat menempati



kratonnya yang baru di Desa Sala,<sup>63</sup> setelah sebelumnya mendapatkan surat persetujuan dari Gubernur Jenderal William van Imhoff di Jakarta tertanggal 27 Juli 1745.<sup>64</sup>

### 3. Prosesi Perpindahan Istana Mataram Kartasura ke Surakarta

Ketika Patih Pringgalaya dan Sindureja menyatakan bahwa pekerjaan pembuatan kraton di Desa Sala telah selesai, maka Sunan PB II segera memanggil pujangga Kyai Yosodipuro dan Pangeran Wijil untuk mendapatkan penjelasan dan kepastian bagaimana syarat-syaratnya untuk memindah pusat istana. Kepada Sunan PB II, Kyai Yosodipuro dan Pangeran Wijil menjelaskan, bahwa perpindahan pusat istana kerajaan itu harus mengikuti adat yang sudah lazim dilakukan seperti para raja pada zaman dahulu dalam mendiami kraton yang baru. Dicontohkan oleh Kyai Yosodipuro dan Pangeran Wijil, bahwa:

- a. Ketika Raja Parasara memindahkan kerajaannya ke Hastina, memakai syarat atau sarana sesajian buah-buahan pala (palakirna, pala kasimpar, pala gumantung, pala andheg) beserta macam-macam bunga yang wangi di taruh di tengah istana. Para pendeta dan resi diperintahkan berdoa semalam suntuk. Setelah selesai barulah perpindahan dilakukan.
- b. Prabu Pamasa di Kediri pindah ke Witardya. Syaratnya sama seperti yang dilakukan Raja Parasara (Prabu Yudayaka). Hanya ditambah *tumpang rerajegan*, yaitu tumpang sejumlah seribu ditambah daging dari hewan berkaki empat, ikan darat, ikan sungai, ikan rawa, dan daging dari hewan yang dapat terbang, macam-macam sayuran, serta beberapa potong kain.
- c. Prabu Dewatacengkar di Medangkamulan Barat pindah ke Medangkamulan Timur, syaratnya sama dengan di atas, ditambah *gecok mentah* yang ditempatkan di setiap sudut istana serta perempatan jalan besar atau gang-gang kecil.

- d. Prabu Banjaransari di Pajajaran pindah ke Galuh. Syaratnya juga sama dengan raja-raja yang lain, ditambah raja dan permaisuri memakai *kaligasan* (pakaian pengantin lengkap dengan perhiasan). Para *abdi dalem* beserta isteri juga memakai pakaian pengantin yang disesuaikan dengan kedudukannya masing-masing.

Segala kegiatan perpindahan tersebut seluruhnya selalu diakhiri dengan *bujana handrawina* (makan besar bersama-sama).<sup>65</sup>

Penjelasan-penjelasan yang dikemukakan pujangga kraton Kyai Yosodipuro dan Pangeran Wijil itu nampaknya disambut gembira oleh Sunan PB II.

"Heh tetuwarningsun karone. Kang dadi lupiyaning pindah kadhaton warna papat mau, saka karsaningsun bakal ingsun tulad kabeh. Kajaba iku, ingsun wuwuhi bumbu-bumbu reracikan utawa rarajungan"<sup>66</sup>

(He kyai kedua-duanya, seperti contoh dari perpindahan keempat kerajaan tadi, atas kehendakku akan aku tiru semua. Kecuali itu akan saya tambah dengan bumbu-bumbu racikan atau rerajungan)

Kemudian diaturkan rancangan perpindahan pusat istana tersebut. Lebih dahulu yang dipindahkan adalah :

1. Beras dan padi.
2. Perlengkapan dapur dan segala macam bumbu masak.
3. *Sato iwen* (binatang: ayam, itik, dan sejenisnya).
4. Binatang ternak berkaki empat.
5. Perlengkapan-perengkapan lainnya.<sup>67</sup>

Sedangkan ujud sesaji yang diadakan ialah: Gecok kecapa, bekakak ikan, bumbu sedapur penyon atau robyongan: bunga, sirih lengkap dengan rokok, boreh. Jenis tumpeng: megana,

kendit, urubing damar, sasrah, rapoh, rarajengan, rukmi, kelut, lulut, giling. Di samping itu masih ada pula sayuran, ikan, daging, dan segala macam jenang: jenang abang, putih, salaka, mangkur, timbul, monggul, grendul, sungsum, laham, pathi, kalop kiringan, ngangrang, dodol, alot, bani, baning, lemu koleh, kalong, wajik pundhak pondhoh, jadah, ketan mancawarna atau pala kirna. Juga pala gumantung, pala kasimpar, pala kapendhem, pala adeg. Kemudian berbagai macam telur ayam, itik, burung, ikan, dan sebagainya. Benang berbagai macam, kain batik, selendang, kain lurik, dan berbagai macam corak kain panjang (jarik), juga emas dan perak, binatang hidup lainnya, dan masih banyak lagi jenis sajian lainnya.<sup>68</sup>

Setelah sarana sesajian dan perlengkapan lainnya dirasa cukup, tibalah saatnya Sunan beserta keluarganya pindah tempat dari Kartasura ke Desa Sala. Pindahnya kraton Kartasura ke Desa Sala itu merupakan *bedhol kraton* secara total atau menyeluruh. Perpindahan dilakukan pada hari Rabu Paing, 17 Sura, tahun Je 1670 ditandai dengan sengkalan *kombuling pudyakapyarsi ing nata* (1670), bertepatan dengan tanggal 17 Februari 1746.<sup>69</sup>

Sunan PB II yang berangkat dari Kartasura menuju Desa Sala diiringi oleh bunyi tembakan meriam sebanyak tiga kali, suara-suara tembakan penghormatan, suara musik dan gamelan. Rombongan yang mengikuti Sunan PB II sangat panjang, tidak kurang sebanyak 50.000 orang.<sup>70</sup> Adapun susunan barisan tersusun sebagai berikut:

1. Kelompok *abdi dalem* pembawa sepasang pohon beringin Dewandaru dan jayandaru, yang dibungkus kain sutera untuk ditanam di tengah alun-alun utara.
2. Kelompok abdi dalem pengusung *bangsalpangrawit*, tempat duduk raja dalam pertemuan agung. Kelompok ini disebut *kalang* dan *gosong*. Begitu tiba di kraton baru, maka bangsal pengrawit itu langsung didirikan untuk pertemuan raja dengan para *nayaka* (petinggi kraton) dan para abdi dalem. Termasuk yang ikut digiring bersama

pindah kraton itu ialah beberapa ekor gajah milik kraton yang dikandangkan di Gajahan.

3. Bupati *nayaka Kiwa-tengen*, *penamping*, lengkap dengan seribu prajurit pengawal, dalam kelompok *kliwon*, *penewu*, *mantri*, semuanya menunggang kuda.
4. Bupati *anon-anon* (anon dari kata *anu*, maksudnya bupati yang berasal dari luar kerabat kraton) disertai para mantri yang terdiri dari ahli kemasam, *gerji* (penjahit), *pandhe* (pengerer besi/logam), *sayang* (tukang pembuat barang dari kaleng: dandang, panci). Semua pejabat dengan tingkat kedudukannya masing-masing, berada di barisan depan menunggang kuda. Para wedana, lurah, carik pembawa stempel (cap kerajaan), naik kuda.
5. Kedua patih, yakni Pringgalaya dan Sindureja disertai abdi dalem pembawa upacara.
6. Lima unit pasukan Kompeni VOC yang dipimpin oleh Komandannya mayor van Hohendorff menunggang kuda.
7. Putara mahkota yang menunggang kuda dengan pengiringnya di kanan dan kiri. Di belakangnya adalah patih putra mahkota, yaitu Tumenggung Wirareja.
8. Prajurit *sarageni* dan *priyantaka* dengan diikuti oleh kelompok abdi dalem pembawa kelengkapan upacara, kotak, tombak, dan lain-lain. Dari kalangan pimpinan agama Islam yaitu khotib, penghulu, dengan naik kuda di sertai dengan abdi dalem pengusung bedug. Kelompok *kebayan* yang ditugasi membawa alat pengukur jarak yang disebut *Kyai Baladewa* (cengkal).
9. Rombongan para *arya* dan pangeran-pangeran putera yang menunggang kuda bersama pengikutnya.
10. Pasukan pengawal keamanan pembawa kelengkapan upacara, bersenjatakan tombak. *Banyak dhalang sawunggaling*, kelengkapan upacara itu dibawa oleh para

mantri muda, disusul kelompok abdi dalem pembawa pusaka kraton (gong kecil yang digunakan untuk mengumpulkan massa yang akan diberi pengumuman). Lalu diikuti pejabat yang ditugasi membawa *carak Kyai Nakula* dan *Sadewa* dan mereka disebut *Gajah Mati*; serta pembawa *cemethi* raja. Di bagian tengah adalah kelompok keluarga raja termasuk Sunan PB II bersama permaisuri yang naik kereta *Kyai Garuda Kencana*, disertai kelompok bangsawan pembawa kelengkapan upacara dan dikawal oleh 200 prajurit yang bersenjatakan tombak, baik di sisi kanan maupun di sisi kiri. Mereka ini disebut *tamtama*. Di belakang raja adalah *abdi dalem marcalulut* dan *singanagara*, pejabat pembawa pusaka kraton yang berupa *wedung* (seperti pisau) milik raja yang disebut *Kyai Pangarap-arap* dan *Kyai Buat mancak*, yang dibungkus kain sutera putih. Kemudian rombongan putera-puteri kraton yang dipimpin oleh bupati puteri Nyai Tumenggung dan seorang lurah dari *keparak kiwa* dan *tengen*. Diikuti lagi oleh kerabat kraton, mantri puteri, wedana puteri yang duduk di atas usungan (*tandhu*).

11. Pembawa barang pusaka milik raja yang disimpan dalam peti kayu, termasuk buku perpustakaan Sana Pustaka Kraton. Barang-barang pusaka ini dikawal prajurit pengaman.
12. Rombongan abdi dalem juru masak kraton yang membawa pusaka Dandang Kyai Duda, Kyai Blawong, Kyai Mrico, dan lain-lain.
13. Rombongan abdi dalem pembawa pohon beringin yang akan ditanam di alun-alun selatan. Juga rombongan *niyaga* atau pengrawit yang selama perjalanan pindahnya kraton dari Kartasura itu menabuh gamelan tiada hentinya untuk memeriahkan suasana.
14. Rombongan rakyat yang bekerja sebagai nelayan, pemburu binatang liar, petani, dan lain-lain.

15. Binatang *klangenan* (kesenangan) raja yang terdiri dari harimau (dalam kerangkeng), kijang, singa, kuda, dan lain-lain dibawa serta.
16. Bupati-bupati pesisir juga mengirim abdi dalem untuk membantu pindahnya kraton dari Kartasura ke Desa Sala. Tidak ketinggalan meriam buatan VOC, bernama Kyai Setomi diusung pula. Meriam Nyai Setomi buatan Portugis itu kemudian setibanya di kraton yang baru lalu ditempatkan di belakang sitinggil utara dan disimpan dalam kerobong.<sup>71</sup>

Sampai di desa Sala, sebuah bangunan kecil yang disebut bangsal *pangrawit* lalu ditempatkan di pagelaran yang telah dipersiapkan. Di bangsal pangrawit, yang dibawa langsung dari Kartasura, inilah Sunan duduk di *dampar kencana* (singgasana). Sementara komandan dan para opsir Kompeni berdiri disebelah kanannya, sedangkan para prajurit Kompeni berkumpul di alun-alun. Setelah dilakukan pengaturan seperlunya dan semuanya telah siap, diadakanlah *pasamuhan agung* (pertemuan besar) yang pertama kali dilakukan di kraton yang baru itu. Di hadapan para *nyaka* kraton, kerabat kraton, dan para pejabat serta *abdi dalem*, bersabdalah Sunan PB II:

"Heh kawulaningsun, kabeh padha ana miyarsakna pangandikaningsun, ingsun kersa ing mengko wiwit dina iki, desa ing Sala ingsun pundhut jenenge, ingsun tetepake dadi negaraningsun, ingsun paringi jeneng negara Surakarta Hadiningrat. Sira padha angestokna sakawulaningsun ing nusa jawa kabeh".<sup>72</sup>

(Rakyatku semuanya, dengarkanlah pernyataanku, mulai hari ini Desa Sala aku tetapkan sebagai ibukota kerajaan, diubah namanya menjadi Surakarta Hadiningrat. Berikanlah restu dan sebarluaskan kepada semua orang di seluruh tanah Jawa).

Pengulu dan para katib kemudian memanjatkan doa bagi keselamatan kraton yang baru itu. Sunan PB II selanjutnya

memerintahkan menanam pohon beringin kembar (*waringin kurung sakembaran*) di alun-alun utara oleh kedua orang patih Sunan, yakni Patih Pringgalaya dan Patih Sindureja, para bupati, bekel dan nayaka. Pohon beringin itu diberi nama Jayandaru dan Dewandaru. Sedangkan pohon beringin yang ditanam di alun-alun selatan dilakukan oleh para bupati mancanegara.

Selanjutnya senapan pun dibunyikan, disusul dengan bunyi tembakan meriam, sedangkan musik Belanda juga kembali terdengar dimainkan. Sunan PB II kemudian masuk ke dalam kraton, sedang orang-orang Belanda dipersilakan menempati sebuah kawasan di sebelah timur alun-alun dan sebelah utara kraton sebagai tempat kediaman mereka. Setelah diadakan selamatan, selesai pula upacara pemindahan pusat kerajaan Mataram Kartasura ke Surakarta Hadiningrat. Selama kurang lebih satu bulan seluruh warga diperkenankan untuk mengadakan pesta di rumah masing-masing atau bersama-sama dengan para pembesar mereka.

### **3.3 Palihan Nagari (Perjanjian Giyanti)**

Setelah pusat istana Mataram pindah dari Kartasura ke Surakarta, pembangunan kota terus dilanjutkan. Di samping tetap meneruskan pembangunan kota, Sunan PB II juga masih memikirkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan ketenteraman kerajaan. Seperti diketahui, bahwa sewaktu ibukota kerajaan Mataram berada di Kartasura, telah terjadi perpecahan dalam istana. Masih banyak *sentana dalem*, bahkan adik-adik Sunan sendiri masih memberontak, belum mau kembali ke kota. Mereka itu antara lain: <sup>73</sup>

1. Pangeran Harya Buminata di Sembuyan (adik Sunan).
2. Pangeran Harya Singasari di Kaduwang (adik Sunan).
3. Pangeran Prangwadana (Raden Mas Said) di Nglaroh.
4. Penambahan Puger atau Radan Tumenggung Sujanapura di Porwodadi.

Perpecahan dalam istana dan perang siksesi atau perebutan tahta di Mataram itu dapat diatasi berkat bantuan Kompeni Belanda (VOC). Untuk bantuan semacam itu, kerajaan Mataram membayar amat mahal. Sunan PB II di Surakarta menandatangani *acte van afstand en overgave* (penyerahan dan pengalihan kekuasaan) seluruh kerajaan Mataram ke pada VOC pada tanggal 11 Desember 1649. Sejak itu raja Mataram disebut *vasal, leeman* atau pemimjam. Ikatan-ikatan perjanjian disebut *politiek contract*, dan setiap pergantian raja selalu diperbaharui. Yang juga dirasakan cukup berat dan mengikat adalah soal *pepatih dalem* yang berkedudukan ganda, sebagai pegawai Belanda dan pegawai raja. Patih menerima gaji dari kedua belah pihak. Namun apabila terjadi perselisihan antara raja dengan komponi Belanda, maka patih harus memihak Belanda. Ketentuan ini bersifat tetap dan tidak pernah berubah.<sup>74</sup>

Sebenarnya campur tangan Komponi Belanda (VOC) dalam urusan intern Kerajaan Mataram mulai terlihat intensif pada akhir masa pemerintahan Sunan Amangkurat I (1645-1677) ketika ketika kerajaan ini sedang menghadapi kehancuran yang diakibatkan oleh berbagai karusuhan dalam peristiwa yang dinamakan *persekongkolan Kajoran* tahun 1672-1667.<sup>75</sup> Kerusuhan-kerusuhan tersebut dapat diatasi oleh Mataram setelah intervensi VOC yang memaksakan dua perjanjian (bulan Agustus dan September 1646) yang memberi kepada VOC konsensi penting dalam hal ekonomi dan teritorial. Sejarah Mataram setelah itu diwarni oleh pertikaian dalam Istana, pemberontakan vasal, dan campuran tangan lebih banyak oleh VOC yang mengakibatkan konsesi-konsesi ekonomi dan teritorial yang lebih luas lagi.<sup>76</sup>

Kemerosotan kekuasaan raja Mataram yang diikuti oleh penyusutan wilayah kerajaan, pada umumnya terjadi sebagai imbalan intervensi Belanda dalam pertentangan-pertentangan intern diantara bangsawan kerajaan Mataram. Intervensi itu memang disengaja dengan harapan agar memperoleh konsesi-konsesi politik dan ekonomi yang menguntungkan. Ricklefs



menyatakan bahwa setiap peranan Belanda dalam menjaga kedudukan pewaris kerajaan (tahta) Mataram cenderung menambah dorongan untuk timbulnya pemberontakan atau kekacauan baru di dalam kraton.<sup>77</sup>

Sampai dengan tahun 1709, wilayah Mataram masih cukup luas. Selain *kutagara*, *negaragung* dan *mancanegara*, Mataram juga menguasai daerah-daerah pesisiran, baik pesisiran barat maupun pesisiran timur. Pesisiran barat meliputi Demak, Kaliwungu, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Wiradesa, Tegal, dan Brebes. Sedangkan pesisiran timur, meliputi Jepara, Kudus, Pati, Juwana, Tuban, Sedayu, Gresik Lasem, Surabaya, dan Cengkal Sewu.<sup>78</sup>

Daerah pesisiran itu antara tahun 1743 dan 1746 secara berangsur-angsur diambil-alih oleh Kompeni. Sesudah *Geger Pacinan*, oleh karena Kompeni Belanda telah membantu Sunan PB II dalam usaha merebut kembali istana Kartasura dari tangan Sunan kuning, hampir seluruh wilayah pesisiran diserahkan kepada Kompeni. Penyerahan wilayah itu terjadi melalui perjanjian 11 November 1743 dan 18 Mei 1746 antara Sunan PB II dengan Kompeni Belanda.<sup>79</sup>

Perjanjian tanggal 11 November 1743 itu terdiri dari 23 pasal, antara lain berisi:

1. Papatih dan para bupati pesisir, sebelum memegang kekuasaannya, harus sepengetahuan dan mendapat persetujuan Kompeni (Pasal 3).
2. Sunan menyerahkan Madura, Sumenep, Pamekasan (Pasal 6).
3. Sunan menyerahkan Sedayu kepada salah seorang keturunan Pangeran Cakraningrat dari Madura, dan Sedayu selanjutnya berada di bawah kuasa Kompeni (Pasal 7).
4. Sunan menyerahkan daerah-daerah *Bang Wetan*, yaitu Gresik, Panarukan dan sekitarnya, Surabaya, Rembang, dan Semarang (Pasal 10).

5. Sunan memberi gaji kepada prajurit Kompeni 400 orang yang bertugas menjaga keamanan di Kartasura sebesar 24.000 reyal batu setahun; 10.000 reyal dan 1000 koyan beras kepada Kompeni, juga 500 koyan kacang-kacangan.
6. Sunan memberikan hak monopoli dagang di daerah Mataram kepada Kompeni.<sup>80</sup>

Berdasarkan isi perjanjian 11 November 1743 itu jelas, bahwa daerah-daerah pesisiran yang antara lain meliputi Pasuruan, Pelabuhan Semarang, dan Madura diserahkan sepenuhnya kepada Kompeni. Surat perjanjian yang pada prinsipnya merugikan Mataram itu ditandatangani oleh Sunan PB II, Pangeran Adinegara, Raden Adipati Pringgalaya, Tumenggung Tirtawiguna, Raden Harya Mlayakusuma, dan Tumenggung Natapraja. Dari pihak Kompeni: Mayor Hohendorff, Hagemann van Zabelijn Seliur, dan Totlomonde.<sup>81</sup>

Kemudian pada tanggal 18 Mei 1746 ketika Gubernur Jenderal Baron van Imhoff datang ke Surakarta berhasil mendesak Sunan PB II untuk memperbaharui perjanjian yang sudah ditandatangani pada tanggal 11 November 1743 lalu. Surat perjanjian 18 Mei itu mensyaratkan permintaan Belanda untuk menguasai seluruh daerah pesisir Jawa. Daerah-daerah tersebut adalah: Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Demak, Juwana, Kudus, Pati, Tuban, Sedayu, Gresik, Lamongan, Sidoharjo, Bangil, Pasuruan, Seperempat daerah Malang, Semarang, Jepara, Rembang, Surabaya, dan Madura.<sup>82</sup>

Suatu peristiwa yang cukup tragis adalah penandatanganan surat kontrak mengenai penyerahan seluruh wilayah kerajaan Mataram oleh Sunan PB II kepada Kompeni pada tahun 1749. Kejadian ini tepatnya berlangsung pada tanggal 11 Desember 1749 ketika Sunan PB II dalam keadaan sakit keras. Dengan ikhlas, Sunan PB II telah menyerahkan seluruh wilayah kerajaannya kepada Kompeni tanpa disertai suatu konsesi apapun. Kompeni juga hak untuk menetapkan siapa yang akan menjadi penggantinya. Surat kontrak tanggal 11 Desember 1749 itu diterimakan kepada Gubernur van Hohendorff yang pada

waktu itu datang ke Sala atas nama VOC. Selanjutnya surat kontrak inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum bagi Kompeni untuk menyatakan kedaulatannya atas Mataram yang selanjutnya disusul dengan tindakan-tindakannya memecah-belah Mataram.<sup>83</sup>

Pangeran Mangkubumi yang mengetahui kelicikan Kompeni tidak mempercayai dan mengakui penyerahan itu, sehingga ia pergi meninggalkan istana dan menyatakan dirinya sebagai susuhunan atas nama PB II. Di samping itu memang ada alasan yang lain sehingga Mangkubumi lolos dari istana dan mengadakan perlawanan terhadap Kompeni. Alasan pertama, adalah rasa iri dan tidak senang di antara para pangeran atas pengangkatan putera Sunan PB II sebagai putera mahkota pada tahun 1743 dengan bantuan dan pengakuan Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Dua orang yang merasa berhak juga atas tahta, yaitu Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi (Saudara kandung Sunan PB II), meskipun secara terpisah, akhirnya melakukan perlawanan terhadap Kompeni. Alasan kedua, adalah perselisihan antara patih Mataram, Adipati Pringgalaya dengan Pangeran Mangkubumi, mengenai persoalan tanah di Sukawati. Seperti dikisahkan oleh Prof. Dr. Soekanto dalam bukunya "Sekitar Yogyakarta 1755-1825" (1952), kira-kira pada akhir tahun 1754 Sunan PB II pernah mengadakan sayembara. Barang siapa dapat meredam pemberontakan Raden Mas Said dan Tumenggung Martapura akan diberi hadiah tanah Sukawati.

Adapun orang yang beruntung memenangkan sayembara itu ternyata Pangeran Mangkubumi, saudara Sunan PB II sendiri. Akan tetapi Patih Pringgalaya merasa sangat iri terhadap keberuntungan Pangeran Mangkubumi itu. Sebab tanah Sukawati yang diberikan kepada Pangeran Mangkubumi itu sebelumnya adalah tanah apanage milik Patih Pringgalaya. keadaan inilah yang membuat tidak senangnya Patih Pringgalaya terhadap Pangeran Mangkubumi. Lalu Patih Pringgalaya pun berhasil membujuk sejumlah orang bupati untuk bersama-sama menghadap Sunan PB II untuk

membicarakan masalah penyerahan daerah Sukawati tersebut. Menurut Patih Pringgalaya, pemberian hadiah daerah Sukawati itu akan memperbesar iri hati di kalangan para pangeran dan pasti juga akan menimbulkan keberatan di kalangan priyayi-priyayi yang masih bekerja. Tanah lungguh (apanage) Pangeran Mangkubumi ialah daerah Sukawati seluas 3000 karya, padahal tanah lungguh para pangeran yang lainnya rata-rata 1000 karya.

Sunan PB II ternyata terbujuk juga oleh hasutan Patih Pringgalaya itu. Sunan akhirnya meminta kembali daerah Sukawati yang telah diberikan kepada Pangeran Mangkubumi. Sebagai penggantinya, pangeran Mangkubumi hanya diberi 1000 karya. Bisa dipahami betapa kecewanya Pangeran Mangkubumi atas keputusan Sunan itu. Akhirnya Pangeran Mangkubumi mengambil keputusan pula untuk meninggalkan istana dan bergabung dengan Raden Mas Said dan Tumenggung Martapura yang dahulu pernah menjadi lawannya. Mereka kemudian bersama-sama melawan Sunan PB II dan Kompeni Belanda.

Keputusan Pangeran Mangkubumi meninggalkan istana untuk bergabung dengan Raden Mas Said dan Tumenggung Pringgalaya itu menjadikan keadaan kerajaan bertambah kacau. Apalagi semakin banyak para abdi dalem dan sentana dalem mengikuti jejak Pangeran Mangkubumi. Seperti GPH Buminata (Sultan Dandung Martengsari) di Sembuyan, GPH Singasari (GPH Prabu Jaka) di Kaduwang, Tumenggung Jayawinata (Tumenggung Jayaningrat) di Mataram, dan BPH Hadiwijaya di Mataram.<sup>84</sup> Peristiwa ini oleh Soekanto dijadikan alasan sebagai awal meletusnya Perang Mangkubumi (Perang Suksesi Jawa III tahun 1749-1755).

Seperinggal Pangeran Mangkubumi, pada akhir tahun 1749 Sunan PB II jatuh sakit dan kecil sekali kemungkinannya untuk dapatsehat kembali. Dalam keadaan sakit inilah Sunan PB II menandatangani sebuah surat kontrak yang sangat merugikan itu pada tanggal 11 Desember 1749. Sembilan hari kemudian,

yakni tanggal 20 Desember 1749, Sunan PB II meninggal dunia.<sup>85</sup> Penggantinya, Pangeran Adipati Anom dinobatkan menjadi Sunan PB III pada hari Senin Wage, 4 Sura, tahun Alip 1675 (1749 M), sebagai "wakil" Kompeni memerintah kerajaan Mataram. Setelah dinobatkan, Sunan PB III segera menandatangani surat kontrak dihadapan Gubernur van Hohendorff, yang isinya:

1. Sunan mengakui bahwa kekuasaannya diperoleh atas kebaikan hati pemerintah Kompeni.
2. Segala isi perjanjian yang dibuat oleh leluhur Sunan tahun 1709, 1743, 1746, dan 1749 tetap berlaku.<sup>86</sup>

Selanjutnya untuk menghadapi Perang Mangkubumi, Hohendorff melaksanakan politik *divide et impera* dan berhasil memisahkan perjuangan Pangeran Mangkubumi dengan Raden Mas Said. Perlawanan Pangeran Mangkubumi baru berakhir setelah ditandatanganinya Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 di Desa Giyanti yang letaknya tiga kilometer sebelah selatan jalan antara Karanganyar dan Karangpandan.<sup>87</sup> Sebelum menandatangani perjanjian, Pangeran Mangkubumi mengajukan beberapa persyaratan, antara lain:

1. Mau berunding asal Kompeni selalu menepati janji dan mentaati isi perjanjian.
2. Pangeran Mangkubumi (Sunan Kabanaran) minta separuh wilayah Mataram.
3. Hak raja disesuaikan dengan bentuk perjanjian-perjanjian zaman Sunan PB I (Pangeran Puger) tahun 1709.
4. Daerah pesisir dikembalikan kepada Sunan.<sup>88</sup>

Setelah diadakan pembicaraan-pembicaraan tentang usul itu, akhirnya pada hari Kamis Kliwon, 29 Rabingulakhir, tahun Be 1680 atau 13 Februari 1755 diadakan perjanjian di Desa Giyanti, berisi:

1. Gelar raja Kabanaran ialah Sultan Hamengkubuwana I.
2. Kerajaan yang baru itu akan berpusat di kota Yogyakarta Hadiningrat, di Desa Beringharja, wilayah Mataram.
3. Masing-masing kerajaan menguasai separuh tanah Jawa (Mataram).<sup>89</sup>

Dalam perjanjian itu Kompeni meminta agar pesisir dan Madura tidak dibagi, sebab sudah diserahkan kepada Kompeni berdasarkan perjanjian dengan Sunan PB II ataupun dengan Sunan PB III.

Dengan perjanjian Giyanti, kerajaan Mataram dibagi sama rata antara Sunan PB III dengan Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan HB I. Dengan kata lain, bahwa luas wilayah Surakarta *sapangiwa* (kekiri) dan Yogyakarta *sapanengen* (ke kanan) adalah sama, istilahnya *palihan nagari sesigar semangka*. Adapun ketentuan pembagian wilayah itu diatur sebagai berikut: untuk wilayah *negaragung*, baik Sunan maupun Sultan memperoleh bagian sebanyak 53.100 cacah. Yang dimaksud *negaragung* dalam ketentuan itu adalah daerah-daerah yang menjadi tanah lungguh (apanage) milik para pangeran, yakni:

1. Mataram asli, kira-kira seluas Yogyakarta sekarang.
2. Pajang, di sebelah tenggara Surakarta
3. Bang Wetan atau Sukawati, di sebelah timur laut Surakarta.
4. Bagelen.
5. Kedu.
6. Bumi Gede atau Siti Ageng di sebelah barat laut Surakarta sampai kedungjati.<sup>90</sup>

Untuk wilayah *mancanegara*, pihak Sultan memperoleh bagian seluas 333.950 cacah, sedangkan Sunan seluas 332.350 cacah. Namun demikian perlu ditambahkan, bahwa pembagian

wilayah itu terutama di wilayah *negaragung* adalah pembagian menurut cacah, yaitu orang-orang atau petani yang menjadi pengikut para pemilik tanah apanage. Dengan demikian pembagian itu tanpa dengan pembuatan batas teritorial yang tegas.<sup>91</sup> Tidak adanya pengaturan perolehan wilayah yang nyata ketika ditandatanganinya Perjanjian Giyanti menyebabkan wilayah Sunan dan Sultan bercampur-baur. Sehingga penduduknya pun tersebar di wilayah yang terpencar-pencar.

Kemudian berdasarkan hasil-hasil perundingan lanjutan antara Raden adipati Mangkupraja I. Tumenggung Wirodigdo, dan Tumenggung Arungbinang sebagai wakil Sunan PB III dengan Raden Adipati Danureja I, Pangeran Natakusuma, dan Tumenggung Sawunggaling sebagai wakil Sultan HB I diperoleh kesepakatan, bahwa dari *mancanegara* yang diterima Sultan HB I meliputi:

1. Daerah Madiun, yakni Madiun asli, Magetan, Caruban, dan separuh Pacitan.
2. Daerah Kediri: Kertosono, Kalangbret, dan Ngrowo (Tulungagung).
3. Daerah Surabaya: Japan (Mojokerto).
4. Daerah Rembang: Jipang (Bojonegoro) dan Tras Karas (Ngawen).
5. Daerah Semarang: Sela, di mana terletak makam Ki Ageng Sela dan para leluhur Mataram, Warung (Kuwu, Wirosari), dan Grobogan.
6. Daerah di sebelah barat *negaragung*, yaitu Roma atau Rema (sekarang Karanganyar).<sup>92</sup>

Sedangkan Sunan PB III memperoleh daerah-daerah *mancanegara*, meliputi :

1. Daerah Madiun: Jogorogo, Ponorogo, dan separuh Pacitan.
2. Daerah Kediri: Kediri asli, Blitar, Srengat, Lodoyo, dan Pace (Nganjuk dan Berbek).

3. Daerah Surabaya : Wirosobo (Mojoagung).
4. Daerah Rembang : Blora.
5. Daerah Banyumas : Banyumas asli, Pamerden (Banyumas timur), dan Jayaluhur (Banyumas barat laut)
6. Daerah Surakarta : Kedawang.<sup>93</sup>

Penentuan pembagian wilayah mancanegara tersebut kemudian dibukukan dalam sebuah buku yang dibuat *Boek van Klepu* (Buku Klepu), karena dibuat di Desa Klepu yang terletak antara Klaten dan Delanggu di tepi jalan Sala-Yogya pada hari Senin, 11 Sura tahun Alip 1683 atau tanggal 26 September 1757 oleh para wakil Sunan PB III dengan para wakil Sultan HB I.<sup>94</sup>

Demikianlah, *palihan nagari* Mataram antara Sunan PB III dengan Sultan HB I telah terlaksana. Dan pengaruh administrasi kolonial semakin terasa di kalangan kerajaan. Dengan demikian, tujuan Kompeni untuk mengurangi kekuasaan dan kekuatan raja-raja Jawa sebagian telah terlaksana.

Selanjutnya, setelah diadakannya Perjanjian Giyanti bukan berarti keadaan kerajaan Mataram menjadi aman, namun masih saja terjadi pergolakan, antara lain Raden Mas Said yang terus melanjutkan perang melawan Kompeni dan Sunan PB III beserta Sultan HB I. Raden Mas Said adalah seorang yang berkpribadian dinamis dan seorang prajurit yang tangguh, adalah kemenakan dan menantu Pangeran Mangkubumi (sebelum menjadi Sultan HB I) dan pernah menjadi wazirnya, bergelar Pangeran Adipati Mangunegara pada masa awal pemberontakan. Konflik kepribadian dan ambisi antara mereka nampaknya mengubah hubungan persahabatan menjadi permusuhan yang pahit, hal mana telah mendorong Pangeran Mangkubumi untuk berdamai dengan Sunan PB III dan VOC, Kekuatan gabungan dari Sunan, Sultan, dan Kompeni ternyata terlalu kuat bagi Raden Mas Said. Dalam pertempuran di daerah Kuwu (Warung), prajurit Raden Mas Said mengalami kekalahan dan menyingkir ke Desa Lawang, kemudian berpindah ke Desa Gumantar (Sukawati).<sup>95</sup>



Pada waktu di Sukawati, Raden Mas Said kedatangan utusan Sunan untuk meminta damai dan meminta agar Raden Mas Said pulang saja ke Surakarta. Para utusan itu adalah: Nyai Tumenggung Satyawati dan Raden Tumenggung Mangun Nagara. Melalui wakilnya, yakni Pangeran Mangkudiningrat, Pangeran Adipati Mangkunegara mau kembali ke Surakarta dengan syarat:

1. Minta agar gelar Raden Mas Said, Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara.
2. Minta semua daerah yang pernah dikuasainya menjadi daerah miliknya.
3. Minta rumah kepatihan Sindurejan (sekarang istana Mangkunegaran) sebagai tempat tinggalnya.<sup>96</sup>

Semua syarat yang diajukan Raden Mas Said disetujui oleh Sunan PB III. Dan pada hari Kamis, 24 Februari 1757 Raden Mas Said atas kemauannya sendiri datang menghadap Sunan PB III di Desa Grogol yang letaknya ± 7 kilometer di sebelah selatan Sala.

Kemudian dengan perantaraan Gubernur Nicolas Hartingh, pada tanggal 17 Maret 1757 di Salatiga diadakan perundingan antara Raden Mas Said dengan Sunan PB III, disaksikan oleh Raden Adipati Danurejo sebagai wakil Sultan HB I. Dalam perundingan itu ditentukan kedudukan dan tanah lungguh (apanage) Raden Mas Said. Raden Mas Said diangkat menjadi *Pangeran Miji* (terpilih) dengan hak-hak istimewa yang kedudukannya dekat dengan raja atau setingkat Pangeran Adipati Anom (putera mahkota) dan diberi tanah lungguh yang luar biasa luasnya, 4000 karya. 2000 karya letaknya di Kaduwang, sedangkan 2000 karya lainnya terletak di Nglaroh (Wonogiri), Matesih, dan Gunungkidul. Di kemudian hari tanah lungguh seluar 4000 karya itu disebut *desa babak* yang artinya desa warisan Mangkunegaran.<sup>97</sup>

Dalam Perjanjian Salatiga itu juga ditetapkan:

1. Tempat tinggal Raden Mas Said di Surakarta, yakni di Sindurejan.
2. Berhak berpakaian seperti Sunan dan duduk sejajar dengan Sunan.
3. Dilarang duduk di dampar, membuat alun-alun, membuat *bale witana*, menjatuhkan hukuman mati, dan tidak boleh menanam *waringin kurung sekembaran*.
4. Wajib menghadap Sunan tiap hari Senin dan Kamis.<sup>98</sup>

Di samping itu, Raden Mas Said yang kemudian bergelar Mangkunegara I juga diberi hak oleh Belanda untuk mendirikan pasukan sendiri, Legiun Mangkunegaran.

Dengan kembalinya Raden Mas Said, keadaan politik di kerajaan Surakarta (Kasunanan) dan kerajaan Yogyakarta (Kesultanan) relatif lebih tenang. Namun demikian, pertikaian yang menyangkut soal tanah di antara para pegawai Kasunanan maupun Kasultanan masih sering terjadi. Oleh karena itu pada tanggal 2 November 1773 di Semarang, dengan disaksikan oleh Kompeni, ditandatangani akte yang kedua oleh Raden Adipati Sosrodiningrat atas nama Sunan PB III dengan Raden Adipati Danurejo I atas nama Sultan HB I. Akte ini kemudian dikuatkan dengan perjanjian antara Sunan dengan Sultan pada tanggal 26 April 1774 yang menegaskan bahwa *Buku Klepu* dinyatakan tidak berlaku lagi.<sup>99</sup>

Berdasarkan perjanjian tahun 1773 itu diatur kembali tentang batas-batas wilayah yang diterima, baik oleh Sunan PB III maupun Sultan HB I. Adapun keputusan tanggal 2 November 1773 tersebut antara lain berisi:

1. Di daerah negaragung, sunan menerima 65.080 cacah (sebelumnya pada tahun 1775 hanya 55.350 cacah), dan Sultan menerima 67.700 cacah (sebelumnya hanya 53.450 cacah)

2. Di daerah mancanegara, Sunan menerima 37.230 cacah (sebelumnya hanya 30.100 cacah), sedangkan Sultan hanya 32.080 cacah (sebelumnya 33.600 cacah).

Jadi pada tahun 1773, Sunan mendapat tambahan  $9.730 + 7.130 = 18.860$  cacah, sedangkan Sultan  $14.250 - 1.520 = 12.730$  cacah. Dibandingkan dengan tahun 1775, seolah-olah pada tahun 1773 Sunan menerima 4.081 cacah lebih banyak. Namun hendaknya diingat, bahwa pada tahun 1757 Sunan PB III telah menyerahkan 4.000 cacah kepada Raden Mas Said. Bagi Sunan dan Sultan, pertambahan wilayah diperoleh di daerah negaragung. Sedangkan tambahan wilayah di daerah mancanegara hanya di peroleh Sunan, terutama di Kediri, dari 5.000 cacah menjadi 8.500 cacah. Bagi Sultan, pengurangan daerah mancanegara terjadi di Srengat (tenggara Kediri), dari 2000 cacah menjadi 1.500 cacah, dan di Sela dari 700 cacah menjadi 500 cacah.<sup>100</sup>

Ketentuan batas wilayah kerajaan Kasunanan dengan Kasultanan tersebut tetap tidak berubah sampai tiba saatnya pemerintah kolonial Belanda jatuh ke tangan Inggris pada bulan September 1811. Pada tanggal 1 Agustus 1812 Inggris memaksakan suatu perjanjian kepada Sunan dan Sultan yang menyebabkan penyusutan lagi wilayah dan penghasilan serta pengurangan wewenang atas pemerintahan internal.

## ***Catatan Bab II***

1. Joyosubroto, *Serat Babad Tanah Jawi* (Budi Utomo, 1917), hal. 132.
2. HJ de Graaf dan Th. Pegeaud, *Kerajaan-kerajaan Islam Pertama di Jawa*, Kajian Sejarah Politik abad 15 dan 16 (Jakarta: Grafiti Pers, 1985), halaman 159.
3. Danys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya; Kajian Sejarah Terpadu Bagian III: Warisan Kerajaan-kerajaan Konsentris* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), halaman 36.
4. WF Althof, *Punika Serat Babad Tanah Jawi Wiwit Nabi Adam Dumugi 1647* (Leiden, 1941), halaman 34.
5. Joyosubroto, *Op. Cit.*, halaman 192.
6. *Babad Demak* (Albert Rusche Co., 1921), halaman 8.
7. HJ. de Graaf dan Th. Pegeaud., *Op. Cit.*, halaman 281
8. Sutrisno Kutoyo, dkk., *Sejarah Ekspedisi Pasukan Sultan Agung* (Jakarta: Proyek IDSN Depdikbud, 1986), halaman 3.
9. M. Atmodarminto, *Babad Mataram* (Yogyakarta: Pusat, 1964), hal. 140
10. HJ de Graaf dan Th. Pegeaud, *Op. Cit.*, halaman 282.

11. *Ibid.*, halaman 283.
12. *Ibid.*
13. *Ibid.*, halaman 272
14. *Ibid.*, halaman 285
15. *Ibid.*, halaman 274
16. HJ de Graaf, *Puncak Kekuasaan Mataram, Politik Ekspansi Sultan Agung* (Jakarta: Grafiti Pers, 1986), halaman1.
17. *Ibid.*, halaman 26
18. *Ibid.*, halaman 27
19. Danys Lombard, *Op. Cit.*, halaman 38
20. *Ibid.*, halaman 39.
21. *Ibid.*
22. HJ de Graaf, 1986, *Op. Cit.*, halaman 109.
23. Amen Budiman, "Dari Pleret Menuju Kartasura", *Wawasan*, 6 Desember 1989.
24. HJ de Graaf, 1986 *Op. Cit.*, halaman 112
25. *Ibid.*, halaman 114.
26. Amen Bidiman, *Loc. Cit.*
27. HJ de Graaf, *Disintegrasi Mataram di Bawah Mangkurat I* (Jakarta; Grafiti Pers, 1987), halaman 15.
28. Amen Budiman, *Loc. Cit.*
29. Ny. Wibisono Rusmiputro K., *Perpindahan Kraton Kartasura ke Surakarta* (Surakarta, 1980), halaman 3
30. WF Althof, *Op. Cit.*, halaman 132.

31. *Ibid.*
32. George D. Larson, *Masa Menjelang Revolusi, Kraton dan Kehidupan Politik di Surakarta 1912-1942* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990), halaman 41.
33. Soemardjo Nitinegoro, *Berdirinya Ngayogyakarta Hadiningrat* (Yogyakarta: Yayasan Pendidikan Tinggi Outra Jaya, 1982), hal. 24.
34. *Ibid.*
35. *Ibid.*, halaman 25
36. Ny. Wibisono Rusmiputro K., *Op. Cit.*, halaman 4
37. *Ibid.*
38. *Ibid.*, halaman 5.
39. *Ibid.*, halaman 6
40. Radjiman, *Sejarah Surakarta I* (Surakarta: Fak. Sastra UNS, 1987), halaman 23.
41. "Geger Warisan Sejarah" *Gatra* No. 33, Tahun IV, 4 Juli 1998, halaman 93.
42. Moeljono, dkk., *Monografi Surakarta* (Yogyakarta: Balai Penelitian Sejarah dan Budaya, 1980), halaman 5.
43. Ny. Wibisono Rusmiputro K., *Op. Cit.*, halaman 6-7.
44. Soemardjo Nitinegoro, *Op. Cit.*, halaman 27.
45. Amen Budiman, "Pembangunan Kraton Minta Tumbal", *Wawasan*, 7 Desember 1989.
46. Radjiman, *Menelusuri Berdirinya Kota Surakarta* (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1989), halaman 6.

47. Radjiman, 1987, *Op. Cit.*, halaman 24
48. Panitia, *Buku Peringatan Hari Jadi ke-27 Pemda Kotamadya Surakarta 16 Juni 1946-1973* (Surakarta: Pemda Kodya, 1973), halaman 81.
49. *Pawarti Surakarta* (Mangunegaran: Reksapustaka, 1939), halaman 6-7.
50. Padjiman, 1989, *op.cit.*, halaman 7.
51. Yosodipuro, *Berdirinya Karaton Surakarta Hadiningrat atau Lahirnya Kota Surakarta* (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1989), halaman 5.
52. Ny. Wibisono Rusmiputro K., *Op. Cit.*, halaman 10.
53. *Serat Tus Pajang* (Surakarta: Panitia, 1939), halaman 24-25.
54. Amen Budiman, 7 Desember 1989, *Loc. Cit.*
55. *Pawarti Surakarta, Loc. Cit.*
56. Yosodipuro, *Op. Cit.*, halaman 6.
57. *Ibid.*, halaman 7.
58. Pemda Kodia Tingkat II Surakarta, *Kenangan Emas 50 Tahun Surakarta* (Surakarta: Murni Grafika dan STSI, 1997), halaman 4.
59. Yosodipuro, *Op. Cit.*, halaman 8.
60. *Ibid.*
61. *Ibid.*
62. *Ibid.*
63. Ny. Wibisono Rusmiputro, *Op. Cit.*, halaman 11.
64. Amen Budiman, "Sulit Nian Tentukan Saat Lahirnya Kota Sala", *Wawasan*, 8 Desember 1989.

65. Radjiman, 1987, *Op. Cit.*, halaman 30.
66. Yosodipuro, *Dumadosipun Kraton Surakarta Hadiningrat Inggih Lairipun Khita Surakarta* (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1989), halaman 11.
67. Radjiman, 1989, *Op. Cit.*, halaman 10.
68. Pawarti Surakarta, *Op. Cit.*, halaman 10-11.
69. Amen Budiman, "Solo Lahir Berkat Juru Nujum", *Suara Merdeka*, 14 Februari 1992.
70. *Ibid.*
71. Pemda Kodia Tingkat II Surakarta, *Op. Cit.*, halaman 9-10.
72. Pawarti Surakarta, *Op. Cit.*, halaman 26.
73. Radjiman, 1987, *Op. Cit.*, halaman 34.
74. Karkono Kamajaya, "Revolusi di Surakarta", *Makalah Temu Ilmiah* di Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, tanggal 28 Agustus 1993.
75. Danys Lombar, *Op. Cit.*, halaman 45.
76. George D. Larson, *Op. Cit.*, halaman 14
77. MC Ricklefs, *Yogyakarta under Sultan Mangkubumi 1746-1755* (Batavia: Albrecht & Rusche, 1974), halaman 31.
78. *Ibid.*, halaman 20.
79. Agustinus Supriyono, "Perjanjian 22 Juni 1930, Aneksasi Terakhir oleh Belanda atas Wilayah Kerajaan Surakarta", *Lembaran Sastra* No. 13, Tahun 1989-1990 (Semarang : Fak. Sastra Undip, 1990), halaman 158.
80. Serat Perjanjian Dalem Nata (Surakarta: Radya-pustaka, Tth.) halaman 26-43.



81. Radjiman, 1987, *Op. Cit.*, halaman 35.
82. Serat Perjanjian Dalem Nata, *Op. Cit.*, halaman 49.
83. Agustinus Supriyono, *Op. Cit.*, halaman 159.
84. Radjiman, 1987, *Op. Cit.*, halaman 37.
85. Ny. Wibisono Rusmiputro, *Op. Cit.*, halaman 13.
86. Radjiman, 1987, *Op. Cit.*, halaman 39.
87. Menurut GP Rouffeer, *Swapraja*, Terjemahan M. Husodo Pringgokusumo (Surakarta: Reksopustoko, 1983), halaman 13, menyebutkan bahwa pertemuan antara Sunan PB III dengan Pangeran Mangkubumi berlangsung pada tanggal 15 Februari 1755.
88. Radjiman, 1987, *Loc. Cit.*
89. *Ibid.*, halaman 40.
90. GP Rouffeer, *Op. Cit.*, halaman 4.
91. Agustinus Supriyono, *Op. Cit.*, halaman 159.
92. GP Rouffeer, *Loc. Cit.*,
93. *Ibid.*, halaman 5
94. *Ibid.*, halaman 6.
95. Radjiman, 1987, *Op. Cit.*, halaman 43.
96. *Ibid.*
97. GP Rouffeer, *Loc. Cit.*
98. *Radjiman*, 1987, *Loc. Cit.*
99. GP Rouffeer, *Op. Cit.*, halaman 7.
100. *Ibid.*

**BAB IV**  
**KASUNANAN SURAKARTA ADININGRAT**  
**PADA ABAD XVIII - ABAD XIX**

**4.1 Pemerintahan**

**A. Raja-raja yang Berkuasa**

**Sunan Paku Buwana II**

Beliau lahir pada hari Selasa Pon, 18 Sawal tahun Jimakir 1634 J atau tahun 1711 Masehi. Putera dari Sunan Amangkurat IV. Pada usia 15 tahun, beliau naik tahta, tepatnya pada hari Senin Pahing 3 Sapar tahun Alip 1651 J atau tahun 1726 Masehi. Pemerintahannya berlangsung dari tahun 1726-1749. Selama masa pemerintahannya, kraton di Kartasura mengalami serbuan dari Sunan Kuning dan orang-orang Cina, sehingga raja melarikan diri. Kraton dapat diduduki oleh Sunan Kuning. Dengan bantuan Kumpeni, Paku Buwana dapat naik tahta lagi. Kemudian pusat pemerintahan dipindahkan ke Surakarta. Pada tahun 1746, tanggal 11 Desember 1749 Paku Buwana mengadakan perjanjian dengan V.O.C yang isinya menyerahkan seluruh negara Mataram V.O.C.<sup>1</sup> Sembilan hari kemudian beliau meninggal dunia dalam usia 56 tahun.

**Sunan Paku Buwana III**

Sunan PB III lahir pada hari Minggu Kliwon tanggal 4 Februari 1732. Beliau putra dari Paku Buwana II. Raja ini

sering pula disebut Sunan Prabu. Tanggal 15 Desember 1749, beliau naik tahta, menggantikan ayahandanya. Masa pemerintahannya berlangsung dari 15 Desember 1749-26 September 1788. Paku Buwana III wafat dalam usia 56 tahun. Sebutan untuk Paku Buwana III adalah Sunan Prabu.

Selama masa pemerintahannya, Kerajaan Surakarta Hadiningrat terpecah menjadi dua, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Pembagian itu terjadi lewat Perjanjian Gianti yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755, antara Paku Buwana III dengan Pangeran Mangkubumi (pamannya), yang kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwana I. Dua tahun kemudian, Sunan PB III menyerahkan sebagian cacahnya kepada Raden Mas Said, yang bergelar Pangeran Mangkunegara I. Penyerahan itu terjadi pada tanggal 17 Maret 1757.<sup>2</sup>

#### **Sunan Paku Buwana IV**

Sunan PB IV adalah putera dari Sunan PB III. Sunan ini sering pula disebut Sunan Bagus. Lahir pada hari Jum'at Kliwon tanggal 2 September 1768, dan wafat pada tahun 1820. Naik tahta menggantikan kedudukan ayahandanya pada hari Senin Pahing 28 Besar, Jumakir 1714 tahun Jawa, atau tanggal 29 November 1788. Pemerintahannya berlangsung sampai tanggal 1 Oktober 1820. Patihnya bernama Raden Adipati Jayaningrat, kemudian digantikan oleh Raden Adipati mangkupraja di Ngayah. Mula-mula sebagai Bupati Panumping dengan nama Raden Tumenggung Cakranegara sampai tahun 1815 Masehi. Penggantinya adalah kanjeng Raden Adipati Sasraningrat II (Bagus Mangir, bekas opsir prajurit Jayengastra dengan nama Raden Panji Jaya Marjaya).

Kegiatannya memberi atap sirap pada bangsal prajurit (1790 M). Juga memperbaiki Masjid Besar yang semula dibangun oleh Sunan PB III. Pendapa yang sudah ada dirobohkan dan kemudian dibangun lagi, kemudian dinamakan *Pendapa Sasana Sewaka*. Selain itu Sunan Paku Buwana IV mendirikan Prabasuyasa di Kradenayan.

## **Sunan Paku Buwana V**

Sunan PB V disebut pula dengan nama Sunan Sugih. Disebut Sunan Sugih konon karena beliau berkenan membagi warisan dari orang tuanya untuk semua saudaranya, sedangkan beliau sendiri mengambil alih semua hutang orang tuanya. Sunan PB V lahir pada hari Rabu Legi, tanggal 16 Februari 1785, dan wafat pada tahun 1823 atau tahun Je 1750 Jawa. Naik tahta pada hari Senin Wage, 2 Sura tahun Ehe, 1748, atau tanggal 10 Oktober 1820. Beliau hanya memerintah selama lebih kurang tiga tahun. Sebab pada tahun 1823, beliau meninggal dunia. Semasa pemerintahan Sunan PB V didampingi oleh patih Kanjeng Raden Adipati Sasraningrat II.

## **Sunan Paku Buwana VI**

Sunan PB VI waktu kecil bernama Raden Mas Sapardan, putra dari *Inggang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Paku Buwana V* dengan Permaisuri Raden Ayu Sosrokusuma. Beliau dilahirkan pada hari Minggu Wage 18 Sapar 1734, *Wuku Warigalid Windu Sangara* atau tanggal 26 April 1807 M, di Kraton Surakarta.<sup>3</sup>

Raden Mas Sapardan dinobatkan menjadi Sri Susuhunan Paku Buwana VI, sebagai pengganti ayahnya pada hari Senin Kliwon, 9 Suro tahun Dal 1751 atau tanggal 15 September 1823. Ditawan Belanda pada tanggal 15 Juli 1830, dan dibuang ke Ambon. Beliau wafat di Ambon pada hari Minggu Pon 12 Rejeb tahun Wawu 1777 atau tanggal 9 Juni 1849. Di makamkan di Istana Batugajah, Ambon.<sup>4</sup> Pada tahun 1957 kerangka jenazahnya dipindahkan dari istana Batugajah, Ambon ke Istana Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Ditempatkan di kompleks *Kedaton Surakarta Kaping Sangan*. Karena jasa-jasanya, Sunan PB VI memperoleh gelar Pahlawan Nasional Kemerdekaan Republik Indonesia dengan ketetapan Presiden Republik Indonesia tanggal 17 November 1964 No. 294/64.

Beliau mendapat pembimbing dari para sesepuh antara lain : Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi (putera Paku

Buwana III), Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Buminata (putra Paku Buwana III), Kanjeng Pangeran Hadinegara (putra Paku Buwana III), Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Kusumoyuda (putra Paku Buwana IV, atau paman beliau). Serta diasuh oleh Kanjeng Raden Adipati Sasradiningrat II, patih kerajaan pada waktu itu.<sup>5</sup> Maka jiwa patriotik tumbuh dalam diri Raden Mas Sapardan.

Sunan PB VI memperoleh gelar "*The Sovereign*" dengan gelar *Emperor of Java*.<sup>6</sup> Dalam kedudukannya sebagai raja Surakarta, beliau masih terikat dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pendahulunya tahun 1677, 1702 dan 1749. Maka beliau masih memberi bantuan prajurit kepada Belanda. Namun secara diam-diam beliau juga memberikan bantuan baik materiil maupun spirituil kepada Pangeran Diponegara, sewaktu Diponegara berperang melawan kolonial Belanda. Adapun usaha beliau antara lain pertama, Surakarta jangan sampai terpecah-pecah, kedua, berusaha jangan sampai wilayah Surakarta bertambah sempit karena rongrongan penguasa kolonial Belanda. Ketiga, berusaha membatalkan perjanjian tahun 1677, 1702, dan 1749 yang dibuat dan dipaksakan oleh kolonial Belanda secara sepihak. Keempat, mengusahakan bersatunya negeri-negeri seperti negeri Mataram dahulu dan kelima, mengusir Belanda dari Pulau Jawa.<sup>7</sup>

### **Sunan Paku Buwana VII**

Sunan PB VII, disebut pula Sunan Purbaya. Lahir pada hari Kamis Wage tanggal 21 Juli 1796, dan wafat pada tahun 1858. Sunan PB VII naik tahta pada tanggal 14 Juni 1830, menggantikan Sunan PB VI yang diasingkan oleh Belanda ke Ambon. Sunan PB VII bertahta lebih kurang selama 28 tahun, yaitu tahun 1830-1858. Patihnya sampai 1848 dijabat oleh Kanjeng Raden Adipati Sasraningrat II kemudian digantikan oleh Kanjeng Raden Adipati Sasraningrat III. Pada masa pemerintahan Sunan PB VII, kasunanan kehilangan daerah-daerah *Mancanegara* yang semuanya diambil oleh pemerintah Hindia Belanda dan sebagai gantinya Sunan menerima uang ganti rugi.

## **Sunan Paku Buwana VIII**

Sunan PB VIII adalah putra dari Sunan PB IV, oleh karena itu masih bersaudara lain ibu dengan Sunan PB VIII. Masa pemerintahan Paku Buwana VIII sangat singkat, sekitar 3 tahun dari tahun 1858 sampai dengan 28 Desember 1861. Karena pemerintahannya yang singkat tersebut, belum banyak yang beliau kerjakan.

## **Sunan Paku Buwana IX**

Sunan PB IX adalah putra dari Sunan PB VI dengan permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Beliau lahir pada hari Rabo Kliwon tanggal 22 Desember 1830. Pada saat beliau dilahirkan, sang ayah, Paku Buwana VI berada di tempat pembuangan di Ambon. Nama kecil yang diberikan oleh orang tuanya adalah Bandoro Raden Mas Duksino.

Pada tanggal 30 Desember 1861, beliau naik tahta menggantikan Sunan PB VIII yang telah wafat. Memerintah Kraton Surakarta selama 32 tahun, dari tahun 1861-1893. Wafat dalam usia 63 tahun.

Semasa kepemimpinan Sunan PB IX keadaan kerajaan mengalami kemajuan yang pesat. Bangunan fisik kraton banyak yang direnovasi seperti Sitihinggil, Panggung Sanggabuwana dan lain-lain. Bidang perekonomian juga mendapat perhatian khusus dari beliau, terbukti dengan munculnya kantor Pratisan. Beliau juga ahli dalam bidang kesusastraan dan pertanian.

## **B. Struktur Birokrasi**

Dalam struktur birokrasi tradisional raja mempunyai kekuasaan sentral dalam wilayah kerajaan. Kedudukan dan kekuasaan raja diperoleh berdasarkan warisan menurut tradisi pengangkatan raja baru atas dasar keturunan. Seseorang yang menjadi raja tentunya tidak sembarang orang, ia harus berasal dari keluarga yang agung. *Trahing kusuma rembesing madu wijining atapa, tedaking andana warih*. Artinya, turunan bunga, titisan madu, benih pertapa, turunan mulia.<sup>9</sup> Sehingga

raja adalah orang yang terpilih karena kesuciannya, kesaktiannya dan masih keturunan raja.

Kerajaan Surakarta Hadiningrat dipimpin oleh seorang raja yang bergelar *Sampeyan Dalem Inkgang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Paku Buwana Senapati Ingalaga Ngabdulrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah*.<sup>10</sup> Dengan gelar itu menempatkan raja pada kedudukan yang tinggi, merupakan pusat kekuasaan dan dunia, yaitu *mikrokosmos* (jagad kecil) dalam hal ini terdapat dalam diri sang raja, serta *makrokosmos* (jagad besar) yang berarti dunia. Raja adalah orang pertama dan terhormat di negaranya (*Sampeyan Dalem Inkgang Sinuhun Kanjeng Susuhunan*), dia juga sebagai pusat kehidupan masyarakat dan dunia (*Paku Buwana*). Di samping kepala pemerintahan, raja juga sebagai panglima tertinggi angkatan perang (*Senapati Ingalaga*), juga sebagai kepala bidang keagamaan (*Ngabdulrahman Sayidin Panatagama*). Raja sebagai penguasa harus memerintah dengan hukum yang adil. Sifat raja juga dihubungkan dengan sifat Tuhan, tampak dalam gelar Kalifatullah, artinya sebagai wakil Allah di dunia.<sup>11</sup> Oleh karena itu raja pun duduk sebagai wali hakim bagi *kawula dalem* wanita yang akan menikah.

Hubungan raja dengan rakyatnya merupakan suatu ikatan antara *kawula-gusti* (hamba-tuan) yang merupakan ikatan yang erat, akrab, saling menghormati dan bertanggung jawab.<sup>12</sup> Rakyat sebagai kawula menyerahkan segalanya termasuk jiwanya jika raja menginginkannya. Demikian tingginya kekuasaan raja terhadap kawulanya, sehingga menyejajarkan kedudukan antara dewa dan raja.

Selanjutnya kewibawaan raja diperbesar dengan adanya benda-benda pusaka kraton dan benda-benda upacara seperti: *banyak, dhalang, sawunggaling, harda walika, bebek emas, menthok emas, senuk, memreng*, dan sebagainya. Benda-benda tersebut ikut menguduskan kedudukan raja. Sebagai penguasa tunggal. Adanya anggapan tentang hubungan mistis antara raja-raja dinasti Mataram dengan Ratu Kidul menempatkan raja memperkokoh kedudukan raja sebagai penguasa.

Raja secara tradisional dianggap sebagai pusat dunia, pusat kehidupan masyarakat, maka tanggung jawab baik buruknya kerajaan terletak di tangan raja. Oleh karena itu dalam struktur birokrasi pemerintahan, raja (Sunan) menduduki tempat tertinggi. Raja berhak mengangkat dan memberhentikan pejabat-pejabat dalam pemerintahan yang dipegangnya. Para pejabat tersebut turut serta menjalankan kekuasaan raja.

Melihat kedudukan raja yang sangat tinggi maka dalam menjalankan tugas pemerintahan, raja dibantu melalui birokrasinya yang merupakan alat dari kekuasaan raja yaitu para *abdi dalem* (pegawai kerajaan). Dalam hal ini *pepatih dalem* (patih) merupakan orang nomor dua setelah raja, baru kemudian diteruskan kepada *kawula dalem* (rakyat). Dalam bidang keprajuritan *senapati* (panglima perang) merupakan orang pertama di bawah raja. Walaupun pangkat *senapati* sebenarnya di bawah patih kerajaan, namun karena kedudukannya sebagai *warana* (*tirai* = pelindung) raja, maka apabila menghadap keduanya duduk berjajar.

Struktur organisasi pemerintahan Kerajaan Surakarta dibentuk dalam tiga bagian administrasi pemerintahan yang terdiri atas:<sup>13</sup>

1. *Reh Kepatihan*, yaitu lembaga administrasi pemerintahan di bawah kekuasaan patih, dimana patih berfungsi sebagai pejabat tertinggi dalam *hierarki* birokrasi. Patih berfungsi sebagai wakil Sunan dalam bidang pemerintahan, maka patih disebut sebagai *rijksbestuurder* artinya yang memerintah negara atau *Mangreh negara*.<sup>14</sup> Pada awalnya, Mataram mempunyai dua orang *pepatih dalem*, yaitu *patih jawi* dan *patih lebet*. Tetapi dalam perkembangannya tinggal satu dengan sebutan *patih jawi*.<sup>15</sup> *Reh Kepatihan* (lembaga administrasi pemerintahan) dalam pelaksanaannya dibantu oleh para Bupati Nayaka dan Bupati Pangreh Praja. Para pelaksana pemerintahan tersebut dalam melaksanakan pemerintahan dipusatkan di Kuthagara, yang disebut *Pemerintahan Bale Mangu*, Bupati Nayaka yang berjumlah delapan orang (*Nayaka Wolu*)



yang menjadi Dewan Kerajaan adalah: empat *Bupati Nayaka Lebet* (*Bupati Keparak Kiwa, Bupati Keparak Tengen, Bupati Gedong Kiwa dan Bupati Gedong Tengen*), dan empat *Bupati Nayaka Jawi* (*Sewu, Bumi, Bumi Gede dan Penumping*). Para bupati tersebut menerima perintah langsung dari patih. *Bupati lebet* bertanggung jawab atas tugas masing-masing di dalam urusan istana (*Parentah kraton*). Sedang *Bupati Jawi* mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketenteraman *kawula dalem* di daerah Negara Agung. Di dalam melaksanakan tugasnya para *Bupati Jawi* dibantu oleh pejabat di bawahnya seperti: *Kliwon, Penewu, Mantri, Panatus, Paneket* sampai dengan *Jajar*.

2. *Reh Kadipaten Anom*, berkedudukan sebagai kepala administrasi, mengurus kebutuhan para *sentana dalem*. Lembaga ini berada di bawah kekuasaan Pangeran Adipati Anom.
3. *Reh Pangulon*, bertugas mengurus administrasi keagamaan yang secara integratif di bawah pimpinan Pengulu Tafsir Anom. Penghulu kraton berfungsi sebagai penasehat raja. Khususnya ketika raja mengambil keputusan hukuman di pengadilan, dalam kedudukannya sebagai anggota lembaga peradilan *Surambi*. Pegawai-pegawai yang membantu lembaga *Reh Pangulon* disebut *Abdi Dalem Pametakan*.

### C. Administrasi

Administrasi wilayah di Kasunanan Surakarta masih tetap seperti pada zaman Mataram, yaitu wilayah dibagi menjadi daerah *kuthagara, negara agung* dan *mancanegara*. Di samping itu ada juga daerah pesisiran. Wilayah *negara agung* terbagi dalam kekuasaan *Bupati Nayaka* yang disebut *Nayaka Wolu*. Kedelapan Kanayakan ini terbagi dalam dua kelompok yaitu empat *Bupati Nayaka Lebet* (*Gedong Kiwa, Gedong Tengen, Keparak Kiwa, Keparak Tengen*), dan empat *Bupati Nayaka Jawi* (*Sewu, Bumi, Bumi Gede dan Panumping*). Kemudian semasa pemerintahan Sunan PB II, ada perubahan

jumlah dari delapan menjadi dua belas. Keempat *Bupati Nayaka Lebet* tetap utuh, sedangkan *Bupati Nayaka Jawi* mengalami perubahan menjadi delapan, yaitu Bupati Sewu, Numbak Anyar, Bumi Gede Kiwa, Bumi, Bumija, Bumi Gede Tengen, Panekar dan Panumping.

Wilayah administrasi maupun struktur pemerintahan Kerajaan Surakarta dapat diketahui dari masa Mataram. Lukisan tersebut secara selintas adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Daerah Kuthagara Daerah *Kuthagara* atau sering pula disebut *Kutanagara* merupakan pusat ibu kota kerajaan. Dari *Kuthagara* inilah pusat pemerintahan dijalankan. Daerah ini sering pula disebut dengan daerah *Narawita* (*Nara* = orang; *wita* = suwita), jadi berarti daerah orang-orang yang mengabdikan). *Kutanagara* merupakan daerah tempat tinggal raja beserta keluarganya dan pejabat-pejabat tinggi kerajaan serta *abdi dalem* terdekat dengan Sunan. Daerah ini berbatasan dengan tembok kota atau benteng. Batasnya di sebelah utara dan selatan adalah pintu Brajanala dan di sebelah timur dan barat adalah pintu Gapit, sekarang disebut daerah baluwarti.<sup>17</sup>

## 2. Daerah Negara Agung

Daerah Negara Agung adalah daerah yang ada di sekitar Kutagara, dan berbatasan dengan daerah Mancanegara. Daerah ini merupakan daerah *apanage* para *sentana dalem*, tanah lungguh para *abdi dalem* serta Bumi Narawita milik raja. Tanah *apanage* merupakan tanah *pancen* (siti dhahar) bagi *sentana dalem* yang tidak menjabat, seperti nenek raja, ibu raja, permaisuri, putra mahkota, dan lainnya. Tanah *lungguh* merupakan tanah untuk gaji bagi para pegawai kerajaan (*abdi dalem*) mulai dari patih sampai dengan *jajar*. Jumlah dan luas tanah *lungguh* yang diberikan sesuai dengan tinggi rendahnya jabatan yang disandang. Sedangkan tanah *pancer* disesuaikan dengan tingkat kebangsawanannya. Selanjutnya tanah *narawita* atau tanah milik pribadi raja. Untuk jaminan hidup raja beserta keluarganya.

Daerah Negara Agung ini meliputi 8 bagian :

- 1) Daerah Bumi, meliputi daerah Kedu sebelah barat Sungai Praga, Luasnya 600) cacah (karya = bahu).
- 2) Daerah Bumija, Kedu sebelah timur Sungai Praga, jumlahnya 6000 cacah.
- 3) Daerah Siti Ageng Kiwa, meliputi daerah sebelah kiri jalan besar Pajang - Demak dengan luas 1000 cacah.
- 4) Daerah Siti Ageng Tengen, terletak di sebelah kanan jalan besar Pajang - Demak, luasnya 1000 cacah.
- 5) Daerah Sewu meliputi daerah Bagelen dan Cilacap jumlah ada 6000 cacah.
- 6) Daerah Numbak Anyar, daerah antara sungai Bagawanta dan Sungai Praga, jumlahnya 6000 cacah.
- 7) Daerah Panumping (daerah Sukowati) luasnya 10.000 cacah.
- 8) Daerah Panekar (Pajang), luasnya sekitar 10.000 cacah.

### 3. Daerah Mancanegara

Daerah Mancanegara adalah daerah di luar Negara Agung. Di daerah Mancanegara tidak ada tanah-tanah *lungguh*, tetapi tiap-tiap waktu tertentu sedikitnya setahun sekali pada Garebeg Maulid harus menyerahkan pajak ke kraton. Oleh karena itu daerah Mancanegara sering pula disebut *Siti Dalem Pamaosan*. Daerah Mancanegara dibagi menjadi 2 bagian yaitu Mancanegara Kulon dan Mancanegara Wetan.

Daerah Mancanegara Kulon meliputi:

- 1) Daerah Banyumas, Banjar, Pasir/Purwakarta, Nganyah, jumlahnya sekitar 5000 karya.
- 2) Daerah Kalibeber, ada 450 karya.
- 3) Karangayar luasnya 800 karya.

- 4) Karangbolong jumlahnya 4000 karya
- 5) Daerah Merden, Timur Banyumas 400 karya.
- 6) Daerah Wacah, Tersana dan Karencang. Jumlah semuanya berjumlah 300 karya.
- 7) Daerah Bobotsari, Kertanagara, luasnya 100 karya
- 8) Daerah Lebaksiyu, Balapulang, berjumlah 102 karya.
- 9) Bantar dan Dayaluhur, meliputi 600 karya

Daerah Mancanegara Wetan, meliputi :

- 1) Panaraga, jumlahnya 1600 karya.
- 2) Kediri, seluas 400 karya.
- 3) Madiun, meliputi 1600 karya.
- 4) Pacitan, sejumlah 1000 karya.
- 5) Kaduwang, ada 1500 karya.
- 6) Magetan, jumlahnya 1000 karya.
- 7) Caruban, meliputi 500 karya.
- 8) Pace, sekitar 300 karya.
- 9) Rawa (Tulungagung), berjumlah 800 karya.
- 10) Kalangbret, ada 600 karya.
- 11) Japan (Mojokerto), meliputi 1000 karya.
12. Wirasaba (Majaagung), meliputi 1000 karya.
- 14) Barebeg, ada 400 karya
- 14) Jagaraga, meliputi 1500 karya.

#### **4. Daerah Pasisiran**

Daerah Pasisiran juga dibagi menjadi dua, yaitu daerah Kulon dan Wetan. Mulai dari Demak ke arah barat, masuk daerah Pasisiran Kulon, sedangkan daerah Jarak ke timur, masuk wilayah Pasisiran Wetan. Pada masa pemerintahan Sunan PB II, daerah pesisiran tersebut meliputi :

**Daerah Pasisiran Kulon :**

- 1) Pekalongan, luasnya 800 karya.
- 2) Bares, Wiradesa, Bantar, Lebaksiyu, semuanya ada 2040 karya.
- 3) Daerah Tegal dengan luas 400 karya.
- 4) Pemalang berjumlah 2000 karya.
- 5) Batang, seluas 2000 karya.
- 6) Daerah Kendal berjumlah 2000 karya.
- 7) Kaliwungu ada 2300 karya.
- 8) Demak ada 6000 karya.

**Daerah Pasisiran Wetan, meliputi :**

- 1) Jepara dengan luas 400 karya.
- 2) Kudus dengan luas 1000 karya.
- 3) Cengkal, seluas 700 karya.
- 4) Pati berjumlah 1000 karya.
- 5) Juwana, luasnya 1000 karya.
- 6) Rembang, ada 500 karya
- 7) Pajangkungan, berjumlah 300 karya.
- 8) Lasem, dengan luas 2900 karya.

- 9) Tuban, seluas 3000 karya.
- 10) Sedayu, berjumlah 3000 karya.
- 11) Lamongan dengan luas 1000 karya.
- 12) Gresik berjumlah 2800 karya.
- 13) Surabaya, dengan luas 6000 karya.
- 14) Pasuruan dan Bangli, ada 300 karya.
- 15) Banyuwangi dan Blambangan, ada 10080 karya.
- 16) Madura sebanyak 18000 karya.

Secara keseluruhan luas wilayah Kerajaan Surakarta pada waktu diperintah oleh Sunan PB II adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- |  |   |               |
|--|---|---------------|
| 1) Lenggahan Nagari termasuk Negara Agung, Kutagara dan Pamaosan | = | 186.000 karya |
| 2) Daerah Mancanegara Kulon                                      | = | 8.252 karya   |
| 3) Daerah Mancanegara Wetan                                      | = | 66.300 karya  |
| 4) Daerah Pasisiran Wetan  | = | 61.280 karya  |
| 5) Daerah Pasisiran Kulon  | = | 30.550 karya  |

-----

Jumlah Seluruhnya = 352.382 karya

Pada waktu pemerintahan Sunan PB II jumlahnya sekitar 352.382 karya, namun pada masa-masa selanjutnya terus mengalami pengurangan. Dengan adanya Perjanjian Gianti, maka kerajaan menjadi dua, Surakarta dan Yogyakarta. Selanjutnya akibat adanya perjanjian Salatiga tahun 1757 antara Sunan PB III dengan Mas Said, daerah menjadi berkurang lagi. Dalam perjanjian itu Sunan memberikan 4000 cacah kepada Raden Mas Said. Pengurangan wilayah secara

besar-besaran terjadi pada masa pemerintahan Sunan PB VIII, dimana Sunan diharuskan menyerahkan daerah-daerah Mancanegara (Wetan-Kulon) kepada pemerintah Hindia Belanda. Setelah tahun 1830 di Kasunanan Surakarta bisa dikatakan tidak pernah terjadi perubahan luas wilayah kerajaan lagi.

#### **D. Sistem Peradilan**

Kraton Surakarta sebagai suatu bentuk negara kerajaan, memiliki struktur pemerintahan yang tersusun atas beberapa lembaga diantaranya adalah lembaga peradilan kraton. Secara kelembagaan, peradilan kraton yang merupakan bagian dari struktur pemerintahan memberikan *kontribusi* dalam upaya menegakkan hukum, menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan kraton. Selain itu, peradilan kraton adalah lembaga penegak hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan yang bisa mengakibatkan timbulnya ancaman terhadap eksistensi kekuasaan raja.

Sejak masa Kerajaan Mataram di Kartasura sampai pindahanya kraton ke Surakarta, sudah ada campur tangan pemerintah kolonial dalam kekuasaan hukum dan peradilan di pemerintahan kraton. Perkembangan selanjutnya menunjukkan, venetrasi pemerintah kolonial ke dalam Kraton Surakarta membawa perubahan dalam tata peradilan dan hukum kraton.

Peradilan di Kerajaan Mataram ada empat jenis, yaitu :<sup>19</sup>

##### **1) Peradilan *Bale Mangu***

Lembaga peradilan *Bale Mangu* berpusat di Kepatihan. Peradilan *Bale Mangu* berdiri berdasarkan perjanjian antara Sunan PB II dengan pemerintah kolonial Belanda di Kartasura pada tanggal 7 Maret 1937.<sup>20</sup> Peradilan *Bale Mangu* mempunyai tugas dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ber-hubungan dengan tanah *lungguh*, tanah *sanggan* serta tanah sewa (*hak anggadhuh*).

Pada peradilan *Bale Mangu* para pelaksanaanya adalah patih (sebagai kepala), dibantu oleh Patih Kadipaten dan Bupati *Nayaka Wolu*, sehingga majelis tersebut berjumlah 10 orang. Masing-masing mempunyai seorang *mantri*, yang tugasnya mengadakan pemeriksaan ke desa-desa di daerahnya, menyampaikan laporan dan menerima perintah. Kesepuluh *mantri* tersebut juga ikut menghadiri sidang *Bale Mangu*, walaupun tidak mempunyai suara. Sejak tahun 1812, para *mantri* tersebut mempunyai pangkat *Panewu*. Di samping yang telah disebutkan tadi, majelis itu ditambah lagi dengan seorang jaksa dari kepatihan yang disebut *Jeksanagara*. Bahkan kemudian pengadilan *Bale Mangu* ini disebut dengan *Jeksanegara*. Pernyataan tersebut seperti yang dilaporkan oleh Residen Valck, bahwa peradilan di samping *Surambi* dan *Pradata* ada pula *Jeksanegara*.<sup>21</sup> *Bale Mangu* dihapuskan pada tahun 1897.

## 2) Pengadilan Kadipaten Anom

Lembaga ini muncul pada tahun 1831.<sup>22</sup> Merupakan lembaga pengadilan bagi para *sentana dalem* yang terlibat dalam suatu perkara hukum. Di Surakarta terdapat tradisi, apabila seorang *sentana dalem* bersalah, maka yang menjatuhkan vonis pengadilan adalah raja sendiri, walaupun perkaranya melibatkan bangsa Belanda. Apabila sebuah perkara tidak bisa diselesaikan di pengadilan Kadipaten Anom, atau apabila yang bersangkutan tidak puas terhadap keputusan pengadilan Kadipaten, maka dapat naik banding ke tingkat pengadilan *Pradata*. Pengadilan Kadipaten ini pada tahun 1847 juga dihapus, bersamaan dengan hapusnya pengadilan *Bale Mangu*. Kemudian segala masalah pelanggaran yang dilahirkan oleh *sentana dalem* akan ditangani oleh Pengadilan *Pradata*. Selanjutnya untuk memudahkan dan melancarkan pelaksanaan sistem pengadilan baru tersebut, wilayah Kasunanan Surakarta dibagi menjadi enam daerah Kabupaten Gunung atau Kabupaten Pulisi. Keenam kabupaten tersebut adalah Kabupaten Kota Surakarta, Kartasura, Klaten, Boyolali, Ampel, dan Sragen.



### 3) Pengadilan *Surambi*

Lembaga pengadilan *Surambi* merupakan pengadilan agama, yang menggunakan dasar hukum Al-Qur'an dan Hadist, sebagai pegangan dalam memutuskan perkara. Lembaga ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram di Kartasura. Kewenangan dalam hal pengadilan dilakukan berdasarkan surat keputusan Sunan PB II, tertanggal 9 April 1746. Dalam piagam tersebut antara lain disebutkan:

".....lan wanira wenangke Kyai Kasan Besari ..... salaki rabi, kang wus kanggo kaya lakune negara, kaya nafkah, talak, waris lan sapapadhane kaya utang piutang, titipa, gadhe lan sapapadhane, den ukumana kalawan adil, amung bab kisas kethok iku ora manira wenangake, lan manira idini pasah".<sup>23</sup>

Artinya, Lebih kurang :

"..... dan saya kuasakan kepada Kyai Kasan Besari untuk memberi hukuman pada perkawinan, seperti halnya yang sudah berlaku di negara, seperti nafkah, talak, warisan, dan sebagainya. Seperti hutang piutang, titipan pegadaian dan sebagainya, hukumlah dengan adil, hanya masalah hukum kisa tidak saya kuasakan, dan saya ijin ....."

Dalam pengadilan *Surambi*, *abdi dalem* penghulu mendapat *Kanjeng Kyai Mas Pengulu Tafsir Anom Adiningrat*. Perkara yang ditangani bersifat kekeluargaan. Antara lain masalah perkawinan, perceraian, wasiat, *gonogini*, dan warisan. Pengadilan *Surambi* juga mempunyai pengadilan banding bagi perkara yang tidak terselesaikan dalam pengadilan *Bale Mangu* dan *Pradata*.

Semula yang melaksanakan pengadilan *Surambi* adalah *abdi dalem Pengulu* yang dibantu oleh empat orang ulama. Kemudian ditambah dengan 8 orang *khotib*. Dalam perkembangannya semasa pemerintahan Sunan PB VII, lembaga ini hanya diberi wewenang menangani masalah-

masalah yang berhubungan dengan agama Islam. Bahkan pada masa akhir pemerintahan Sunan PB VII, kewenangan lembaga ini dipersempit lagi karena lembaga ini bukan lagi sebagai pengadilan tandingan dari dua lembaga pengadilan yang lain.

#### 4) Pengadilan *Pradata*

Semula pengadilan *Pradata* hanya menangani masalah kriminal saja. Namun dalam perkembangan juga menangani masalah-masalah sipil penduduk. Oleh sebab itu pengadilan *Pradata* akhirnya menangani seluruh pelanggaran hukum, asal tidak menjadi wewenang pengadilan *Bale Mangu* ataupun pengadilan *Surambi*. Pelaksana pengadilan ini terdiri atas satu orang ketua (jaksa ketua) ditambah engan 12 mantri jaksa. Dua belas mantri jaksa tersebut adalah dari Kepatihan, Kadipaten, *Pangulon*, dan prajurit (masing-masing satu orang). Kemudian yang delapan orang berasal dari *abdi dalem Bupati Nayaka* sehingga jumlahnya menjadi 13 orang (1 ketua + 12 anggota).

Semenjak Sunan PB VI jaksa dari pengadilan *pradata* mendapat gelar Raden Tumenggung, sedangkan sebelumnya hanya Raden *Ngabehi*. Bagi pengadilan *Pradata* yang dijadikan pegangan untuk menyelesaikan perkara adalah *Nawala Pradata*, *Angger*, *Angger Aru-biru* dan *Angger Sepuluh (sedasa)*.<sup>24</sup> Pengadilan *Pradata* bersidang pada hari Senin dan Kamis. Jaksa *Pradata* mulai tahun 1833 disebut juga Wedana Jaksa.

#### 4.2 *Dominasi Kekuasaan Kolonial*

Pengaruh kolonial Belanda terhadap Mataram dimulai sejak masa pemerintahan Amangkurat I. Mula-mula usaha campur tangan itu hanya sebatas pada pengelolaan daerah pesisir, tetapi lambat laun makin luas dan kuat. Sebagai perbandingan, pada bagian pertama abad ke-18 V.O.C belum mempunyai kedudukan teritorial yang kuat di Jawa. Hanya Semarang dan Sumenep yang langsung berada di bawah V.O.C. Itupun untuk

masalah pemerintahan di daerah tersebut hampir sepenuhnya diserahkan kepada bupati yang berada di daerah tersebut. Di Semarang bupati bahkan diangkat dengan meminta persetujuan dari Sunan. Untuk jabatan Syah bandar Semarang pun yang mengangkat masih Sunan. Oleh karena itu, pada waktu tersebut Semarang belum dikuasai sepenuhnya oleh V.O.C.

Pada tahun 1708 Semarang dijadikan kantor utama dari wilayah V.O.C untuk daerah pantai timur Jawa (*Java's Oostkust*) atau pantai timur laut Jawa (*Java's Noordoostkust*). Pejabat tertinggi di Jawa adalah seorang *Gezaghebber* dengan pangkat *Opperkoopman*. Setelah beberapa tahun pangkatnya dinaikkan menjadi *Commandeur*.<sup>25</sup> Di bawah Semarang terdapat terdapat enam *loji* V.O.C.: Tegal (*dipimpin oleh Onderkoopman*), Juwana (*Assistent*), Rembang (*Onderkoopman*), Surabaya (*Koopman*), dan dua pos militer. Pasuruan (seorang *Luwitenant/Kapitein*), dan di Kartasura (*Kapitein*). *Garnizun* V.O.C. tidak begitu besar dan juga tergantung pada keadaan. Pada akhir Juli 1727, Kekuatan militernya ada 1061 orang. Dengan rincian 229 orang ditempatkan di Semarang, 292 ditempatkan di Kartasura, 150 di Surabaya, 149 di Pasuruan, 43 di Tegal, 60 di Jepara, 35 di Rembang, 17 di Demak, dan 16 Juwana.<sup>26</sup> Kemudian pada akhir bulan Februari 1740 seluruh garnizun hanya terdiri 597 prajurit Eropa. Dari jumlah itu 254 ditempatkan di Kartasura, 89 di Surabaya, 74 di Pasuruan, dan 188 di Semarang.

Pemerintah kolonial Belanda mulai memperoleh keuntungan yang besar dari Sunan PB I (1705--1719). Keuntungan itu diperoleh akibat campur tangannya dalam usaha mengatasi konflik antara Amangkurat III (1703--1705) dengan Pangeran Puger (pamannya) yang akhirnya diangkat menjadi Sunan PB I. Prinsip yang kemudian dijalankan oleh Batavia adalah mendukung dan mempertahankan Kerajaan Mataram apabila kerajaan itu menghadapi musuh.<sup>27</sup> Berdasarkan prinsip itu V.O.C. tetap membantu Sunan PB II (1725-1749), walaupun Sunan ini pernah bersikap melawan

kompeni dan menghancurkan garnizun V.O.C. yang ada di Kartasuarra. Akan tetapi V.O.C. dalam waktu yang tidak begitu lama berhasil membangun benteng di Sala.<sup>28</sup> Dengan politik *de vide et impera*, pemerintah kolonial Belanda mulai mencengkeram Kerajaan Mataram. Politik memecah belah yang dijalankan oleh Belanda dapat dengan mudah mengusik ketenteraman Mataram. Seperti munculnya perang suksesi Jawa I (1705--1709), II (1711--1723), III (1741--1757).<sup>29</sup>

Di dalam percaturan politik tersebut pihak kolonial Belanda selalu bertindak sebagai penengah dalam setiap persengketaan yang diakhiri dengan balas jasa yang berbentuk perjanjian yang mengikat. Seperti dalam pengangkatan putera mahkota dan pengangkatan raja baru, sedangkan jika raja melanggar perjanjian, maka Belanda akan mengambil tindakan yang merugikan penguasa tradisional.

Sejak tahun 1742, ketika Sunan PB II berada ditempat persembunyiannya, di Panaraga sampai menjelang wafatnya tahun 1749, peranan Van Hohendorff untuk memperluas kekuasaan V.O.C. sangat besar. Berdasarkan perjanjian tahun 1743, Sunan menyerahkan kepada V.O.C. mengenai hak mengangkat dan memberhentikan *pepatih dalem*, seluruh daerah pantai Jawa utara dengan kota-kota pentingnya. Dengan dicapainya perjanjian itu *pepatih dalem* berkedudukan sebagai orang kedua dalam pemerintahan kerajaan, merangkap menjadi pegawai V.O.C. Penyerahan pantai utara itu berarti tertutupnya Kerajaan Mataram dari hubungan luar, yang juga berarti mematikan perdagangan Mataram.

Pada masa akhir pemerintahan Paku Buwana II, tampak sekali pengaruh Belanda dalam urusan politik Kerajaan Mataram (Surakarta). Hal itu terlihat ketika Sunan PB II jatuh sakit, yang kemudian dimanfaatkan oleh G. van Hohendorff untuk menguasai kerajaan. Ternyata Sunan pun sudah bersedia untuk "menyerahkan" kerajaan dan puteranya, yaitu Pangeran Adipati Anom (Putra Mahkota) kepada V.O.C. Perjanjian tanggal 11 Desember 1749 antara Paku Buwana II dengan V.O.C, dianggap sebagai perjanjian penting oleh V.O.C.

Dengan perjanjian itu, Mataram kehilangan kemerdekaannya. Akan tetapi oleh Kompeni daerah itu dikembalikan dalam bentuk pinjaman kepada raja-raja Mataram. Sejak saat itu, terdapat suatu tradisi bahwa sesudah penobatan, raja baru harus menandatangani perjanjian yang antara lain menyatakan bahwa penobatannya sebagai raja bukan karena mewarisi, tetapi karena ijin dari Kompeni Belanda.

Perjanjian tersebut menempatkan derajat V.O.C ke tempat yang tinggi. Karena sewaktu *Pangeran Adipati Anom* dilantik menjadi raja menggantikan Sunan PB II, raja dilantik oleh V.O.C. Raja baru yang bergelar Sunan PB III adalah *vasal* Kompeni. Oleh sebab itu tempatnya berada di sebelah tangan kiri van Hohendorff. Sedangkan komandan Toutlemonde berada di sisi kanan wakil Kompeni. Tempat Sunan itu melambangkan bahwa kedudukannya lebih rendah daripada gubernur. Sejak saat itu penobatan raja Mataram, yang bertempat di Sitiyinggil, dilakukan oleh wakil V.O.C. dan tradisi ini dilanjutkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Dengan demikian campur tangan pihak kolonial Belanda pada urusan intern kerajaan menjadi semakin meningkat dan merongrong wibawa raja.

Perjanjian Gianti (1755) yang berakibat pecahnya Kerajaan Mataram menjadi dua, Surakarta dan Yogyakarta, serta Perjanjian Salatiga (1757) yang mengakibatkan Surakarta terbagi menjadi dua, Kasunanan dan Mangkunegaran. Semuanya tidak lepas dari campur tangan pihak Kompeni. Terbaginya daerah Swapraja menjadi dua tersebut mengakibatkan kekuasaan Sunan semakin sempit. Kedudukan sunan di daerah Swapraja diimbangi oleh seorang Gubernur dari pemerintah Hindia Belanda yang ditempatkan di Surakarta, sesuai dengan perjanjian bahwa daerah Swapraja mempunyai hak untuk mengatur rumah tangga sendiri. Swapraja dilihat dari segi hukum terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Swapraja dengan kontrak panjang, yaitu perjanjian yang mengikat dan membatasi kekuasaan swapraja dan memberi kelonggaran pada pemerintah pusat.

2. Swapraja dengan kontrak pendek, yaitu berisi keterangan bahwa swapraja mengakui kedaulatan negara dan tunduk akan perintah.<sup>30</sup>

Dilihat dari segi hukum tersebut di atas maka daerah swapraja Surakarta tergolong swapraja dengan kontrak panjang, karena perjanjian yang dibuat secara turun temurun berlaku terus.

Politik adu domba dari Kompeni Dipergunakan lagi pada waktu akan terjadi pergantian penguasa. Setelah dalam waktu tidak begitu lama Sunan Paku Buwana III, Sultan Hamengku Buwana I dan Mangkunegara I wafat, masing-masing pada tahun 1788, 1792, dan 1795 maka penguasa selanjutnya harus tunduk pada V.O.C. Di Kasunanan, Paku Buwana IV yang menggantikan tahta ayahnya harus menandatangani kontrak dengan Belanda, yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 1788. Isi perjanjian tersebut, yaitu :<sup>31</sup>

1. Antara Sunan dan Kompeni saling mengikat Persaudaraan, saling membantu dalam segala masalah.
2. Pengangkatan Patih atau Pangeran Adipati Anom harus ada persetujuan dari Gubernur di Semarang maupun Residen Surakarta.
3. Sunan tidak boleh meminta kembali Pulau Madura dan daerah pesisir, sebab daerah ini telah diambil oleh Kompeni berdasarkan perjanjian tanggal 11 November 1743 dan 18 Mei 1746 dengan Sunan Paku Buwana II. Juga tidak boleh meminta kembali "*Siti dhusun*" berdasarkan perjanjian tanggal 26 April 1744.
4. Pelaksanaan pengadilan ditangani oleh penguasa yang berhak. Kesalahan yang diperbuat oleh orang-orang asing (Arab, Cina, India, Belanda, dan sebagainya) diadili oleh pengadilan Kompeni.
5. Pengakuan adanya monopoli dagang hasil bumi dan palawija dari Kompeni dengan harga yang telah ditentukan oleh Kompeni.

6. Sunan menyediakan tenaga kerja untuk mengangkat barang-barang ke Semarang, adanya kerja wajib di kator Kompeni dan biaya dipikul oleh Sunan.
7. Apabila Sunan melanggar perjanjian ini, maka segala miliknya akan dicabut dan diambil alih Kompeni.

Pada masa pemerintahan Sunan PB IV atau menjelang akhir abad XVIII daerah *Vorstenlanden* selama beberapa waktu mengalami masa yang semakin merugikan martabat kerajaan. Pada tahun 1799 V.O.C. ambruk, dan harta bendanya diambil alih oleh negara Belanda yang pada waktu itu merupakan *protektorat Perancis*. Salah seorang Marsekal Napoleon yang dikirim ke Jawa adalah H.W. Daendels (1808-1811), yang diberi wewenang *diktatorial* untuk mengadakan reorganisasi pemerintahan dan memperkuat pertahanan Hindia Belanda. Di Kerajaan Jawa. Daendel memperlakukan raja-raja pribumi secara kasar, mencabut semua atribut kedaulatan mereka. Sebab Daendels ingin menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi berada di Batavia. Daendels memerintahkan para residen (yang diberi sebutan *minister*) untuk menggunakan simbol raja seperti payung emas. Politik Daendels dilanjutkan oleh Raffles (1811-1816) selama masa peralihan pemerintahan Raffles mulai melakukan pemaksaan perjanjian dengan raja-raja, baik di Surakarta maupun Yogyakarta. Di Surakarta menghasilkan lagi penyusutan wilayah dan penghasilan dari kerajaan, serta pengurangan wewenang atas pemerintahan internal.

Para penguasa yang memerintah berikutnya pun penobatannya selalu disertai dengan perjanjian. Sunan Paku Buwana VII diharuskan menyerahkan daerah-daerah Mancanegara. Sejak saat itu kekuasaan atas daerah *Mancanegara Wetan* dan *Kilen* berada di bawah pengawasan pemerintah Kolonial Belanda. Daerah-daerah yang dikuasai Sunan tinggal daerah Mataram, Pajang, Sokawati, dan Gunung Kidul. Untuk itu Sunan menerima ganti rugi yang ditentukan antara kedua belah pihak. Selain ganti rugi untuk daerah mancanegara, Sunan juga menerimanya untuk pajak pelabuhan dan sarang burung pajak daerah *jaban Rangkah* (*Jaban Kori*);



pajak pasar-pasar; pajak "siti dhusun" di Kradenan; pajak beberapa dukuh dan pajak garam di Kuwu. Jumlah seluruhnya ada 754.987 rupiah.<sup>32</sup>

Setelah Perang Dipanegara berakhir tahun 1830, dimulailah masa penjajahan yang sebenarnya dalam Sejarah Jawa. Untuk yang pertama kalinya pihak Belanda mampu mengeksploitasi dan menguasai seluruh Pulau Jawa, dan hampir tidak ada satupun tantangan yang serius terhadap kekuasaan mereka sampai abad XX.

Pembayarannya mulai tanggal 15 Agustus 1831, berupa uang emas dan uang tembaga. Kemudian sebagai realisasi Sunan tentang kesanggupannya memperbaiki jalan-jalan dan jembatan jurusan Surakarta-Yogyakarta dan Surakarta-Semarang, maka pada tanggal 12 Oktober 1840 dikeluarkan surat keputusan tentang pembentukan pos-pos keamanan dan lalu lintas barang-barang. Dengan surat keputusan itu dibentuklah po-pos keamanan di Boyolali, Ampel, Larangan (Sukoharjo), Krpyak, Kartasura, Delanggu, Klaten, Tangkisan, Sukowati, Jagamasan, Mungkung, Kebonrama, dan kedung Banteng.<sup>33</sup> Kepala di pos-pos tersebut di samping bertugas menjaga keamanan lalu lintas barang juga bertugas memperbaiki jalan-jalan dan jembatan apabila ada yang rusak. Kepala pos juga diwajibkan menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang kecil-kecil yang terjadi di wilayahnya masing-masing.

Tindakan Sunan ini kemudian diperkuat oleh Pemerintah Belanda dengan adanya sistem pengadilan *pradata*, *Kadipaten Anom* dan pengadilan *Surambi*, atas dasar perjanjian yang ditandatangani tanggal 5 Juni 1847. Tidak lama kemudian pemerintah mengangkat 6 orang bupati Pulisi untuk ibu kota Klaten, Kartasura, Boyolali, Ampel, dan Gagatan.

Dalam usaha menanamkan pengaruh dan kekuasaan Barat, baik di pusat pemerintahan kraton maupun di daerah pedalaman, pemerintah Hindia Belanda menuntut agar *pepatih dalem* berperan sesuai dengan isi perjanjian tahun 1743.



Bahkan apabila terjadi pertentangan antara Sunan dengan pihak Kompeni/pemerintah Hindia Belanda *pepatih dalem* harus memihak pada yang disebut terakhir. Namun demikian, pelaksanaan mengabdikan pada dua orang tuan tidaklah mudah. Selain itu *pepatih dalem* pada umumnya diambil menantu oleh raja yang sedang berkuasa. Selain adanya hubungan kekerabatan dengan raja, *pepatih dalem* juga mendapat status, kekuasaan, dan kemakmuran dari raja. Hal ini merupakan faktor yang menyulitkan bagi patih untuk tidak tunduk pada raja.

Sampai dengan meninggalnya Paku Buwana VII (1858), usaha pemerintah untuk menanamkan pengaruhnya dalam bidang kepolisian dan pengadilan telah sampai pada tingkat menghapus peradilan *Bale Mangu*, mengangkat enam bupati Pulisi, dan membentuk lima *Pradata Kabupaten*. Usaha itu diteruskan pada masa Sunan PB VIII yang hanya memerintah selama 3 tahun. Sewaktu Sunan PB VIII wafat dan Sunan PB IX naik tahta, pada masa sunan ini berkuasa keluar peraturan bahwa penyewaan tanah diperluas meliputi seluruh Karesidenan Surakarta, termasuk daerah Pajang yang sangat subur. Hal itu mengakibatkan pemerintah berusaha untuk dapat menguasai bidang kepolisian dan pengadilan secara penuh. Kemudian sewaktu Sunan PB X naik tahta menggantikan Sunan PB IX, raja baru ini diharuskan menandatangani suatu *verklaring*.<sup>34</sup>

Penandatanganan suatu *verklaring* sebelum dinobatkan menjadi raja merupakan tradisi baru, yang berarti bahwa raja yang akan berkuasa diikat oleh peraturan/ketentuan di luar Akta Perjanjian. Dengan demikian makin tampak adanya pengaruh pemerintah kolonial Belanda terhadap urusan-urusan intern kerajaan di Jawa.

Secara politik kekuasaan raja yang bermakna tradisional sudah mulai memudar karena kekuasaannya yang disejajarkan dengan dewa tersebut kini hanya dijadikan hamba bagi pemerintah kolonial Belanda, walaupun perlakuan-perlakuan khusus untuk raja masih tetap ada. Keadaan ini terus menerus

berjalan selama pemerintah kolonial Belanda berkuasa di Kerajaan Mataram dan penerusnya. Segala perlengkapan birokrasi kerajaan oleh Belanda justeru dimanfaatkan sebagai alat untuk mencapai tujuannya baik di bidang politik maupun ekonomi. Dengan sistem pemerintahan tidak langsung, penguasa tradisional otomatis di bawah pengawasan dan kekuasaan kolonial.<sup>35</sup>

Pemerintah kolonial Belanda dengan cukup piawai telah terlibat dalam urusan politik dan ekonomi di Jawa. *Venetras* kekuasaannya dapat dilihat dari perjanjian-perjanjian antara penguasa dari kerajaan dengan pihak kolonial. Perjanjian yang dibuat selalu merugikan pihak kerajaan. Usaha tersebut telah dirintis sejak Sunan Amangkurat I mulai bertakhta di Kerajaan Mataram (1645-1677), kemudian diteruskan ke raja-raja sesudahnya. Dinasti ditegakkan kembali hanya sesudah intervensi V.O.C yang memaksakan perjanjian yang memberi kepadanya konsensi penting dalam hal ekonomi dan teritorial. Sejarah Mataram setelah itu diwarnai dengan pertikaian dalam istana dan campur tangan lebih banyak dari pemerintahan Belanda yang mengakibatkan konsensi ekonomi dan teritorial lebih luas lagi. Bahkan pada tahun 1749, usaha menguasai wilayah Mataram dapat terlaksana tatkala Sunan PB II yang sedang sakit keras menandatangani perjanjian tentang penyerahan Kerajaan Mataram kepada Kompeni. Sesudah itu, apabila ada raja atau penguasa yang dianggap tidak loyal kepada pemerintah kolonial Belanda kemudian ditangkap dan dibuang, seperti Sunan PB VI yang dibuang ke Ambon.

Apabila dicermati sesudah ada campur tangan dari Kompeni kemudian diteruskan pada pemerintah Hindia Belanda, mengenai batasan-batasan kekuasaan raja, yaitu:<sup>36</sup>

- Berdasarkan wasiat dari Sunan Paku Buwana II tanggal 11 Desember 1749, maka yang memiliki kerajaan adalah Belanda, sedang raja hanya meminjam.
- Raja diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda dengan "*Akte van Verband*". Sampai dengan Sunan PB IX dan

Hamengku Buwana VI raja diangkat atau dinobatkan dahulu, baru diteruskan dengan menandatangani "*Akte van Verband*". Sesudah masa itu penobatan baru dilakukan apabila para raja telah menandatangani suatu *verklaring* (keterangan) yang menyatakan tentang ketaatannya pada pemerintah.

- Patih kerajaan diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah Hindia Belanda, berdasarkan kontrak perjanjian tanggal 1 Agustus 1812. Sebelum itu patih diangkat oleh raja dengan persetujuan Belanda.
- Pemerintah Hindia Belanda menempatkan seorang wakilnya diibukota kerajaan. Orang tersebut berpangkat residen, sejak tahun 1928 berpangkat gubernur.
- Pemerintah memiliki monopoli hutan jati (kontrak tahun 1812, yang mengubah kontrak 1743), monopoli candu dan sarang burung (kontrak tahun 1812).
- Adanya perjanjian khusus (*Bizonder Verband*) yang mengatur tentang pertambangan (perjanjian tahun 1743 dan 1891), urusan kopi (1833, tetapi tahun 1901 dicabut), dan tentang pembuatan garam.
- Di larang membuat uang sendiri (1743) dan menyelenggarakan tentara sendiri (1812).
- Kekuasaan dan kewenangan lembaga peradilan kerajaan dibatasi, bahkan ada yang dihapuskan, perjanjian yang mengatur itu dilakukan tahun (1737, 1771, 1773, 1812, 1818, 1847, dan 1903).

Kekuasaan para raja masih ada dalam hal :

- Urusan tanah
- Pengangkatan pegawai kecuali patih
- Urusan pemberian gelar, penggunaan payung dan upacara kraton.

### **4.3 Reaksi Terhadap Dominasi Kekuasaan Kolonial**

Seperti yang sudah dituliskan di bab terdahulu, bahwa Kerajaan Surakarta Adiningrat merupakan turunan dari dinasti Mataram. Oleh sebab itu perasaan tidak senang atau anti pada Kompeni yang pertama sekali muncul adalah sewaktu pemerintahan Sultan Agung. Terbukti dengan pengiriman prajurit Mataram ke Batavia sebanyak dua kali, tahun 1628 dan tahun 1629.<sup>37</sup> Pemberontakan lainnya seperti yang dilakukan oleh Trunojoyo, Untung Suropati, juga pemberontakan orang-orang Tionghoa yang pada mulanya mendapat dukungan dari Paku Buwana II. Walaupun pada akhirnya Paku Buwana II bersekutu dengan pihak V.O.C, menggempur pemberontak yang menyebabkan lahirnya perjanjian Ponorogo atau lebih dikenal dengan sebutan politik kontrak.<sup>38</sup>

Akibat dari adanya pemberontakan, kraton Sunan PB II di Kartasura rusak parah. Oleh Paku Buwana II kemudian dipindahkan ke daerah Surakarta. Di Surakartapun situasi masih belum pulih seperti sedia kala. Sebab ternyata masih banyak *sentana dalem* bahkan adik-adiknya sendiri masih melakukan pemberontakan dan belum kembali ke kraton. Mereka adalah :

1. Pangeran Harya Buminata di Sembuyan (adik Sunan).
2. Pangeran Harya Singasari di Kaduwang (adik Sunan).
3. Pangeran Prangwadana di Nglaroh (Raden Mas Said).
4. Panembahan Puger atau Raden Tumenggung Sujanapura di Grobongan, Purwadadi.<sup>39</sup>

Perlawanan yang gigih dilakukan oleh Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa (kelak dikenal Mangkunegara I), yang tidak rela melihat cengkeraman kekuasaan V.O.C di Kerajaan Mataram (Surakarta). Pemberontakan Mas Said yang dibantu oleh Martapura dapat dipadamkan oleh Pangeran Mangkubumi. Namun Mas Said dan Martapura dapat lolos. Sunan semula menjanjikan hadiah untuk Pangeran

Mangkubumi tetapi karena dihasut oleh pihak V.O.C, hadiah tersebut dibatalkan.

Lebih dari itu Sunan Paku Buwana II pada tanggal 18 Mei 1746 menandatangani perjanjian dengan V.O.C yang isinya antara lain disebutkan bahwa Pulau Madura sepenuhnya dan pantai Utara sejak saat itu menjadi milik V.O.C yang sah. Di samping itu Sri Susuhunan bersedia akan memberikan bantuan sekuat tenaga, bila diminta oleh V.O.C untuk menindas segala anasir-anasir yang bisa merugikan V.O.C Dengan alas bahwa pembatalan hadiah berasal dari usaha-usaha V.O.C dan orang-orangnya yang duduk di pemerintahan ditambah dengan hasil dengan hasil perjanjian yang sangat merugikan Mataram, Pangeran Mangkubumi dan para pembantunya melarikan diri dari kraton Surakarta. Pangeran Mangkubumi merasa bahwa kekuasaan dan pengaruh V.O.C tidak hanya puas sampai disitu saja dan mungkin akan terus menggerogoti kekuasaan kerajaan apabila tidak dilawan dengan kekuatan bersenjata.

Sebelum keluar dari istana, Pangeran Mangkubumi mohon diri terlebih dahulu kepada Sri Susuhunan Paku Buwana II dan Pangeran mendapat bekal uang dari Sunan. Dengan melihat dari sudut ini bisa ditarik kesimpulan bahwa peristiwa pemberontakan yang dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi dan kawan-kawannya pada hakekatnya bukan pemberontakan terhadap Mataram. Akan tetapi titik beratnya untuk menindas pengaruh dan kekuasaan V.O.C atau setidaknya membatasi gerak V.O.C supaya tidak meluas.

Pasukan Pangeran Mangkubumi bertambah kuat tatkala bisa bergabung dengan pasukannya Mas Said. Oleh karena itu dengan cepat daerah-daerah pesisiran yang berada di sekitar Surakarta dapat di kuasanya. Perlawanan di daerah Sukawati kearah selatan dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi sendiri. Di daerah Grobongan ke selatan sampai dengan Boyolali utara di pimpin oleh Raden Mas Said dan Pangeran Martapura. Daerah Semarang Selatan, Ambarawa, Salatiga selatan, di pimpin oleh Pangeran Wijil II dan Pangeran Krapyak. Sedangkan di daerah Kedu utara dan selatan di pimpin oleh

Pangeran Hadiwijoyo. Dengan demikian ibukota Mataram telah dikurung dari tiga jurusan.<sup>40</sup>

Situasi di Surakarta (Mataram) untuk sementara kembali tenang setelah diadakan perjanjian antara Paku Buwana III dengan Pangeran Mangkubumi, yang menghasilkan pembagian wilayah Kerajaan Mataram menjadi dua yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Namun kondisi yang tenang itu tidak sepenuhnya menyelimuti Kerajaan Surakarta (Kasunanan), sebab Raden Mas Said masih tetap melakukan pemberontakan di daerah-daerah.

Akan tetapi peperangan belum berakhir. Walaupun saingan utama itu sekarang telah menjadi Sultan namun masih banyak pemberontakan lain yang bebas. Mas Said adalah yang paling penting dan pasukannya sangat kuat. Pada bulan Oktober 1755 dia berhasil mengalahkan suatu pasukan V.O.C. Walaupun cukup kuat namun Mas Said tidak bisa juga mengalahkan V.O.C, Surakarta maupun Yogyakarta. Oleh karena itu dia mulai mengadakan perundingan-perundingan, dan pada tahun 1757 terjadi perundingan Salatiga. Mas Said mendapat 4000 cacah dari PB III.

Ketika Kasunanan diperintah oleh Sunan PB IV yang duduk di singgasana kerajaan menggantikan ayahandanya, banyak tradisi lama yang diganti. Sunan PB IV banyak dipengaruhi oleh orang-orang terdekatnya yang sangat fanatik. Beberapa perubahan yang dilakukannya antara lain:

- Pakaian prajurit yang bergaya Belanda diganti dengan pakaian jawa.
- Tiap Jum'at Sunan selalu melakukan Sholat Jum'at di Masjid Besar.
- Tiap hari Sabtu, diadakan latihan "Watangan" perang-perangan dan semua *abdi dalem* yang menghadap raja diwajibkan berpakaian santri.
- *Abdi dalem* yang dinilai tidak patuh pada syariat agama di geser atau dipecat.

- Mengangkat adiknya dengan nama "Mangkubumi" dan "Buminata".

Perubahan-perubahan yang dilakukan tersebut tidak lepas dari peranan para ulama yang membantu Sunan. Secara mencolok Sunan melindungi mereka dan memberinya gelar-gelar yang tinggi kedudukannya. Para *abdi dalem* itu berjumlah enam orang, yaitu: R. Santri, P. Panengah, R. Wiradigdo, R. Kanduruhan, Kyai Balkan dan Kyai Nursaleh. Mereka membawa misi ke Sunan untuk membenci "orang kafir" yaitu penjajah Belanda. Secara diam-diam Sunan dan kelompoknya menyiapkan gerakan untuk melawan Kompeni. Rencananya antara lain melakukan penyerangan terhadap Kompeni di Salatiga, lewat Boyolali dan membunuh semua orang Belanda. Namun usaha itu bocor dan segera diketahui oleh pihak musuh.<sup>41</sup>

Kompeni menuntut agar para santri pembantu Sunan diserahkan kepada Kompeni. Namun tuntutan itu ditolak oleh Sunan dan bahkan salah seorang dari santri itu diangkat menjadi wakil pepatih dalem. Dalam sebuah perjamuan yang diadakan dikraton Sunan mencoba membunuh Greeve dan teman-temannya, namun tidak berhasil.<sup>42</sup> Peristiwa itu menyebabkan Sunan dikepung oleh Kompeni. Kompeni tetap pada tuntutannya agar Sunan menyerahkan para santri yang menjadi pembantunya.

Menghadapi "pengepungan" dari Kompeni, Kasultanan dan Mangkunegeran, Sunan akhirnya berdamai dengan pihak Sultan maupun Komponi dan kemudian menyerahkan pembantunya pada Kompeni.

Dari apa yang dilakukan Sunan tampak nyata bahwa sebenarnya Sunan ingin lepas dari Kompeni yang dianggapnya "orang kafir". Walaupun usaha itu banyak dipengaruhi oleh para pembantunya yang sangat fanatik. Usaha untuk mengusir kaum penjajah yang didukung oleh Kraton Surakarta lainnya, tampak pada saat meletusnya pemberontakan kaum Sepoy di Jawa Tengah pada tahun 1815.<sup>43</sup> Pemberontakan Sepoy dimaksudkan untuk mengusir Inggris dari tanah Jawa.



Reaksi yang cukup berani dalam menentang kekuasaan kolonial Belanda datang dari Paku Buwana VI. Tidak berapa lama setelah Paku Buwana VI naik tahta, berkobarlah pemberontakan yang dilancarkan oleh Pangeran Diponegara di Yogyakarta. Perang Diponegara ternyata mendapat banyak pendukung, baik dari kalangan pangeran, para pembesar kerajaan dan juga dari rakyat. Semua itu karena akibat dari politik pemerintah Hamengku Buwana yang menyebabkan keadaan perekonomian yang susah dan menimbulkan kelaparan dimana-mana, sehingga dalam peperangan ini raja Surakarta, Paku Buwana VI semula berpegang teguh pada pendiriannya, bahwa Sunan bersikap mempertahankan kehormatan kerajaannya. Namun kemudian, sesuai dengan permintaan dari Pangeran Diponegara, Sunan berkenan membiarkan kedudukan dari prajurit Diponegara yang berkedudukan diantara daerah Surakarta dan Yogyakarta. Sunan juga tidak melarang seorang *kawulanya* yaitu Kyai Mojo (seorang ulama dari sala) menjadi penasehat Diponegara. Kyai Mojo ternyata banyak berperan dalam Perang Diponegara. Ulama tersebut oleh umum dianggap sebagai wakil raja Surakarta. Sementara itu raja Surakarta sendiri dengan cukup berani mengatakan kepada Kolonial Nahuys (Residen Surakarata), bahwa jika Gubernur Jenderal de Kock tidak datang ke Surakarta, maka Sunan dan semua pangeran di Surakarta akan menjadi pemberontak pula.<sup>44</sup>

Sikap Susuhunan PB VI yang demikian itu dianggap oleh Belanda sangat membahayakan kedudukannya. Pemerintah kolonial Belanda kemudian berusaha untuk melakukan politik memecah belah antara Sunan dengan Pangeran Diponegara. Maksud Belanda dijalankan dengan cara mengurangi daerah kekuasaan kerajaan Surakarta. Berulang kali diadakan pembicaraan-pembicaraan tentang masalah-masalah daerah antara Belanda dengan Sri Susuhunan. Berbagai cara ditempuh oleh Belanda untuk melumpuhkan Kerajaan Surakarta. Pemerintah kolonial Belanda antara lain meminta daerah-daerah Banyumas, Bagelan dan daerah Mancanegara kepada Sunan agar Gubernur yang menjalankan pemerintahan di



daerah-daerah tersebut atas nama Sunan (*Asmadalem*). Sunan PB VI tidak menerima begitu saja usul dari pemerintah kolonial, tetapi setelah didesak akhirnya Sunan bersedia.

Meskipun begitu ternyata masih tetap dipaksa untuk menandatangani suatu perjanjian yang isinya antara lain :<sup>45</sup> Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan berjanji dengan sungguh-sungguh tidak akan melakukan tindakan-tindakan pemerintahan di daerah-daerah yang atas Asma dalem dikuasai oleh Gubernemen tidak akan memberi perintah-perintah kepada bupati-bupati dan pembesar-pembesar kerajaan serta rakyat, kecuali bila dimohon oleh Gubernemen; tidak akan mengadakan surat-menyurat dengan bupati-bupati dan pembesar-pembesar, kecuali dengan perantaraan pegawai-pegawai gubenemen yang tertinggi jabatannya; tidak akan menerima surat-surat laporan-laporan dan permohonan-permohonan kecuali yang diajukan oleh pegawai-pegawai tertinggi tersebut.

Didorong oleh niat menolak penjajahan dan tidak mau menandatangani perjanjian yang dipaksakan tersebut, maka Sunan pada tanggal 5 Juni 1830 malam hari meloloskan diri dari keraton. Sunan hanya diiringi oleh 7 orang *abdi dalem*.

Lolosnya raja dari keraton dilaporkan oleh Pangeran Buminata kepada Residen Surakarta. Berdasarkan laporan Pangeran Buminto diketahui bahwa raja menuju ke Mancingan (daerah Mataram di sebelah selatan Yogyakarta). Dalam laporan itu dikatakan bahwa beliau tidak akan kembali ke Surakarta sebelum keutuhan kerajaan Surakarta pulih seperti sedia kala. Raja merasa kecewa dan benci terhadap Belanda karena tanahnya selalu dipersempit oleh ketamakan pemerintah kolonial Belanda.

Tindakan Sunan Paku Buwana VI tersebut dianggap oleh Belanda, bahwa Sunan tidak mengakui pemerintah kolonial Belanda. Bahkan Sunan dianggap telah melawan Belanda, Sunan dituduh akan melakukan perlawanan terbuka terhadap pemerintah kolonial Belanda seperti yang dilakukan oleh

Pangeran Diponegoro dari Yokyakarta. Oleh karena itu, Belanda kemudian melakukan pengejaran. Akhirnya pada tanggal 11 Juni 1830, Sunan berhasil ditangkap dan kemudian dibuang ke Ambon.

Sesudah perang Diponegara berakhir, beberapa pengusaha asing mendapat izin untuk menyewa tanah selama lima belas tahun, di wilayah kerajaan Jawa. Sebuah kasus yang menggetarkan para pengusaha asing terjadi di daerah Surakarta, yaitu adanya perampokan dan pembunuhan terhadap penyewa tanah, J. Joses. Pada sekitar tahun 1860-an, banyak terjadi perampokan secara besar-besaran. Di samping itu juga terdapat suatu gerakan seperti gerakan Mangkuwijaya. Para pengikut gerakan tersebut bersumpah akan membunuh orang-orang Eropa seperti yang dilakukan terhadap J. Joses pada tahun 1843.<sup>46</sup>

Gerakan-gerakan lain banyak muncul di pedesaan Surakarta, antara lain gerakan Srikaton tahun 1888, gerakan Suradi alias R.M. Kapiten dari daerah Boyolali pada tahun 1871, juga gerakan Alisuwangso di desa Jatinom pada tahun 1881.

Masih banyak gerakan-gerakan lain di Surakarta yang dilancarkan oleh para petani. Banyaknya gerakan-gerakan sosial di Surakarta disebabkan oleh faktor-faktor sosial ekonomi dan politik. Dominasi kekuasaan Barat menciptakan desintegrasi yang meliputi : dominasi ekonomi, politik dan kultural.<sup>47</sup> Dominasi ekonomi yang berupa perluasan monetisasi faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, komoditi ekspor, dan pengenalan pajak baru jelas memperberat beban petani. Kehidupan petani menjadi sangat bergantung pada perusahaan perkebunan maupun penguasa kolonial. Sehubungan dengan perluasan agro industri dan birokrasi timbullah di ferensia struktural yang menciptakan peranan baru dalam masyarakat.

Dominasi politik membuahkan hubungan yang tidak wajar sehingga terjadi ketegangan dan ketidakserasian. Perluasan administrasi kolonial yang legal-rasional menempatkan

penguasa kerajaan di bawah kekuasaannya dan mendesak lembaga-lembaga tradisional. Sedangkan dominasi *cultural* Barat jelas mendesak norma-norma yang ada sehingga masyarakat kehilangan orientasi.

Dalam kondisi yang demikian, gerakan-gerakan rakyat itu merupakan suatu indikator dan reaksi masyarakat yang sudah merata di pedesaan. Hal ini merupakan bukti bahwa *venetrasi* kekuasaan kolonial yang disertai perubahan sosial sudah mengganggu ketertiban dan menggoncangkan masyarakat. Walaupun terjadi secara mikro reaksi terhadap *venetrasi* kolonial telah menjangkau daerah pedesaan yang cukup luas.

#### ***4.4 Hubungan Antara Kasunanan Surakarta Adiningrat dengan Kerajaan Lainnya di Jawa***

Kerajaan Mataram yang merupakan dinasti pewaris tahta di Surakarta adalah salah satu kerajaan di Jawa Tengah yang pernah mengalami masa kejayaannya di sekitar tahun 1635-an, pada masa pemerintahan Sultan Agung. Daerah kekuasaannya yang cukup luas meliputi seluruh Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Madura. Dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Cirebon dan Banten pihak Mataram menjalin persahabatan, walaupun tidak selamanya berjalan mulus. Para pengganti Sultan Agung ternyata tidak bisa mempertahankan kekuasaannya yang luas tersebut. Mataram lama kelamaan kehilangan daerah-daerahnya. Pada tahun 1755 kerajaan itu dipecah menjadi dua, Surakarta dan Yokyakarta. Kemudian muncul juga Kadipaten Mangkunegaran dan Kadipaten Pakualaman. Bagaimana sebenarnya hubungan antara “Kasunanan Surakarta Adiningrat dengan para penguasa lainnya di daerah swapraja? Untuk mendapat jawaban tentang masalah tersebut perhatian akan diarahkan pada perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh para penguasa swapraja. Karena dengan memperhatikan isi perjanjian itu akan dapat dipahami bagaimana sebenarnya hubungan kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lainnya. Selain itu hubungan antara Kerajaan Surakarta dengan daerah lainnya juga akan dilihat lewat perkawinan antara daerah-

daerah tersebut. Sedangkan hubungan lewat perdagangan dan ekonomi akan dibahas dalam subbab tersendiri.

Setelah Mataram dibagi menjadi dua kerajaan pada tahun 1755, maka sebagai tindak lanjut dari pembagian itu, diperlukan peraturan lebih lanjut mengenai pembagian wilayah. Buku yang pertama-tama dibuat antara kedua daerah, Surakarta dan Yokyakarta mengenai pembagian wilayah adalah "Boek van klepoe" (Buku Klepen).<sup>48</sup> Disebut demikian karena dibuat di Desa Klepu, yang terletak antara Klaten dan Delanggu di tepi jalan Solo - Yogya. Perundingan diadakan pada tanggal 11 Sura Tahun Alip 1683 atau tanggal 26 September 1757. Para pembuat adalah dari pihak kasunanan dan Kasultanan yang diwakili oleh Raden Adipati Mangkuprojo I, Tumenggung Wirodigdo, dan Arungbinang untuk Kasunanan. Sedangkan pihak Kasultanan diwakili oleh Raden Adipati Danurejo I Pangeran Notokusuma, dan Tumenggung Sawunggading.

Oleh karena sering terjadi pertikaian mengenai tanah di antara pegawai Kasunanan dan Kasultanan, maka pada tanggal 2 Nopember 1773 ditandatangani Akta Perjanjian yang kedua. Penandatanganan dilakukan di Semarang yang dihadiri oleh Wakil Sunan Paku Buwana III yaitu Raden Adipati Sosrodiningrat dan Raden Adipati Danurejo I atas nama Sultan Hamengkubuwana I. Dengan disaksikan oleh pihak kompeni, perjanjian tersebut di atas kemudian dikuatkan dengan perjanjian baru antara Sunan dan Sultan pada tanggal 26 April 1774, yang menyatakan bahwa "Buku Klepu" sudah tidak berlaku lagi.

Berdasarkan perjanjian tahun 1773 dari daerah Negara Agung Sunan menerima 65.080 karya atau (sebelumnya pada tahun 1755 hanya menerima 55.350 karya). Sultan menerima 67.700 karya, sebelumnya hanya 53.450 karya. Untuk daerah Mancanegara Sunan menerima 37.230 karya, sebelumnya hanya 30.100 karya. Sedangkan Sultan hanya menerima 32.080 karya, sebelumnya 33.600 karya. Jadi, berdasarkan perjanjian tahun 1773 Sunan mendapatkan tambahan  $9.730 + 7.130 = 16.860$  karya, sedangkan Sultan  $14.250 - 1.520 = 12.730$  karya.

Dibandingkan dengan tahun 1755 seolah-olah pada tahun 1773 Sunan menerima 4.081 karya, lebih banyak, tetapi Sunan pada tahun 1757 telah menyerahkan 4000 karya kepada mangkunegara. Bagi Sunan dan Sultan tambahannya itu terutama di daerah Negara Agung. Tambahan untuk Mancanegara hanya diperoleh oleh Sunan, yaitu di daerah Kediri. Sedangkan Sultan mendapat pengurangan di daerah Srengat dan di Sela.

Masih mengenai kontrak yang berhubungan dengan luas wilayah, pada tanggal 27 September 1830, di buat lagi kontrak yang mengakibatkan keempat swapraja di Surakarta dan Yogyakarta memiliki wilayah seperti sekarang, yang terpisah satu dengan lainnya. Dengan ini diluruskan kesalahan pada perjanjian tahun 1755 yang mengakibatkan wilayah Sunan dan Sultan bercampur-baur, sehingga sering terjadi perang antar desa.

Perjanjian atau kontrak tahun 1830 ditandatangani oleh Raden Adipati Sosrodiningrat II (Patih Kasunanan) dengan Raden Adipati Danurejo (Patih Kasultanan), bertempat di Klaten.<sup>49</sup> Berdasarkan perjanjian itu daerah Pajang dan Sukowati jatuh ke tangan Sunan, sedangkan daerah Mataram dan Gunung Kidul menjadi milik Sultan, Sungai Opak dan puncak Gunung Merapi dan kaki utara Gunung Kidul merupakan garis batas yang merupakan tanah perkecualian adalah makam leluhur di Sela, Pasar Gede dan Imogiri.

Hubungan antara Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta, dua kerajaan pewaris tahta Mataram juga terjadi di bidang hukum atau peradilan. Pada tanggal 4 April 1773, tujuh bulan sebelum perjanjian di Semarang, ditandatangani undang-undang mengenai gangguan keamanan, Undang-undang tersebut disebut *Angger Arubiru*, yang berisikan 5 pasal. Undang-undang tersebut berlaku di kedua daerah swapraja. Setelah melalui beberapa kali perbaikan, *Angger Arubiru* memperoleh bentuknya yang tetap pada tahun 1818.

Lewat sistem perkawinan bisa juga dilihat hubungan antara kerajaan Surakarta dengan daerah lainnya, umpamanya dengan Madura. Hubungannya dengan Madura telah ada sejak zaman Mataram pada saat Sultan Agung dapat menguasai Madura pada tahun 1624. Untuk kepentingan politik Amangkurat Seda Tegalarum memberikan putrinya kepada Pangeran Cakraningrat. Di Madura putri ini dikenal sebagai Ratu Ayunan. Amangkurat IV juga memberikan putrinya untuk dijadikan istri Pangeran Dipati Cakraningrat, putri Pangeran Cakraningrat. Kebiasaan memberikan pengantin wanita kepada penguasa di Madura tersebut berubah, ketika kerajaan Mataram pecah menjadi dua. Beberapa raja Surakarta mengambil putri-putri Madura untuk permaisurinya dan langkah yang diambil ini erat hubungannya dengan perubahan kedudukan penguasa-penguasa di Madura.

Menurut perjanjian tahun 1705 dan tahun 1749, Madura jatuh ketangan V.O.C. dan selanjutnya menjadi milik Pemerintah Hindia Belanda. Oleh pemerintah kolonial status penguasa pribumi di Sumenep, Pamekasan, dan Bangkalan dibuat sejajar dengan kedudukan raja-raja Surakarta dan Yogyakarta. Dalam kenyataannya pemerintah kolonial menganggap para penguasa pribumi di Madura itu hanya sebagai bupati.<sup>50</sup>

Diawali dari Paku Buwana III, permaisuri raja Surakarta ini berasal dari Madura. Tindakannya diikuti oleh putranya, yaitu Paku Buwana IV bahkan ketika raja ini masih berkedudukan sebagai putra mahkota, istri utamanya juga berasal dari Madura, raden Ayu Adipati Anom ini menurunkan Paku Buwana V. Sesudah dinobatkan menjadi Paku Buwana IV, permaisurinya yang bernama Ratu Kencana adalah adik mending Raden Ayu Adipati Anom dan menurunkan Paku Buwana VII. Sunan ini mengikuti jejak ayahnya mengambil permaisuri dari Madura.<sup>51</sup>

Setelah Mataram pecah menjadi dua kerajaan dan kemudian muncul kadipaten Mangkunegaran dan diikuti oleh Kadipaten Pakualaman, maka di bekas kerajaan Mataram ini

terdapat empat penguasa. Walaupun demikian sampai berakhirnya abad XIX, raja-raja Surakarta tidak ada yang mengambil putri dari tiga penguasa itu untuk dijadikan permaisurinya. Terhadap kadipaten Mangkunegaran, sikap kraton yang semula memberikan *triman* (pengantin wanita, putri raja) pada masa pemerintahan Mangkunegara IV mengalami perubahan. Sunan PB III memberikan ratu Alit, putrinya, sebagai *triman* kepada putra Mangkunegara II. Berikutnya Sunan PB V memberikan putrinya Raden Ayu Sekar Kedhaton, kepada Mangkurat III. Perkawinan ini tidak membuahkan keturunan. Bagi Mangkunegara kehadiran putri kraton sebagai istri utama kepala trah kadipaten merupakan suatu kehormatan. Tatkala istri Mangkunegara III meninggal dunia, Mangkunegara III ingin sekali mempersunting Raden Ayu Sekar Kedhaton putri dari Paku Buwana VII. Tujuannya selain untuk memperoleh kehormatan juga kekuasaan, sebagai pengganti raja.

Perubahan sikap Kasunanan Surakarta terhadap Mangkunegaran terjadi ketika Surakarta diperintah oleh Paku Buwana IX. Walaupun Mangkunegaran pada waktu itu masih sebagai *vasal* kasunanan, namun hubungannya sangat akrab. Keakraban itu terjalin antara lain dengan adanya kekerabatan dengan trah Hadiwijayan. Permaisuri Sunan adalah dari K.P.A. Hadiwijaya II. Sedangkan K.P.A. Hadiwijaya II adalah kakak dari Mangkunegara IV. Mangkunegara IV sangat bangga terhadap kedudukan keponakannya. Apalagi saat keponakannya yang menjadi permaisuri Paku Buwana IX melahirkan putra laki-laki, seorang calon putra mahkota, yang selanjutnya akan menaiki tahta Kerajaan Surakarta.

Pada saat Paku Buwana X bertahta, permaisurinya adalah putri Mangkunegara IV. Namun perkawinan itu tidak membuahkan putra. Kemudian Sunan mengambil permaisuri kedua dari Kasultanan Yogyakarta, yaitu putri dari Hamengku Buwana VII, bernama Gusti Raden Ajeng Mursudarinah. Sesudah mendapat persetujuan dari Gubernur Jenderal maka Sunan melakukan kunjungan ke Yogyakarta untuk *nontoni*



(melihat) putri-putri Sultan. Kemudian Sultan melakukan kunjungan balasan ke Kasunanan Surakarta. Kunjungan Sunan dan Sultan itu merupakan suatu peristiwa yang luar biasa. Hal ini disebabkan karena sejak Kerajaan Mataram pecah menjadi dua pada tahun 1755, hubungan antara dua kerajaan pewaris dinasti Mataram tersebut sangat terbatas.

#### ***4.5 Ekonomi dan Perdagangan***

Pada sekitar abad ke 14-17 Kepulauan Nusantara baik secara politis maupun ekonomis bercorak kerajaan agraris dan kerajaan maritim. Kerajaan agraris (Jawa Tengah) seperti Pajang dan Mataram, sedangkan kerajaan maritim seperti Malaka Aceh, Makasar, Banten, Tuban, Surabaya, dan daerah pesisir lainnya. Sebelum kejatuhannya pada tahun 1512, Malaka merupakan kerajaan maritim terbesar di Kepulauan Nusantara.

Salah satu ciri perdagangan pada masa itu adalah bahwa perdagangan merupakan monopoli negara atau raja. Di kerajaan Mataram misalnya perdagangan beras dimonopoli oleh raja. Jadi rajalah yang beruntung dari penjualan padi ke negara-negara maritim seperti Malaka, Banten, Aceh dan lain-lainnya yang tidak menghasilkan dalam jumlah besar. Monopoli ini melahirkan persaingan dagang dan kekuasaan yang hebat antara pesisir utara dan Mataram, khususnya daerah pesisir yang juga menghasilkan besar seperti Gresik dan Surabaya. Persaingan dalam monopoli perdagangan beras ini mungkin menjadi salah satu sebab timbulnya konflik yang hebat antara daerah pedalaman dan pesisiran.<sup>52</sup>

Golongan pedagang pada zaman itu adalah para priyayi dan para raja pedagang di pesisir utara Jawa. Menurut penilaian Schrieke para raja pedagang pesisir itu bukan merupakan suatu kelas pedagang yang mementingkan investasi modal. Penguasa pesisir itu sebenarnya tidak lebih dari priyayi Jawa Tengah, kelas penguasa pesisir adalah kelas "feodal" yang memakai keuntungan perdagangan bagi kekuasaan politik, seperti mencapai monopoli dan memperkuat kedudukan politis, mereka<sup>53</sup>.



Pada pertengahan abad ke-19 sisa Kerajaan Mataram tinggal empat daerah swapraja yang terpisah-pisah. Padahal semasa kejayaannya di masa silam (di bawah Sultan Agung 1613-1645) Mataram membentang dari ujung timur Pulau Jawa sampai pedalaman tanah Priangan. Daerah kekuasaannya meliputi tanah pertanian di pedalaman dan kota-kota di pantai utara Jawa, dan berpengaruh juga terhadap Pulau Madura. Kegagalannya pada penyerbuan ke Batavia pada tahun 1629 dan sifat serta gaya pemerintahan Jawa yang tidak stabil menyebabkan kemerosotan Mataram, sehingga menyebabkan munculnya kekuatan luar yang cukup besar. Pemberontakan yang sering terjadi untuk memperebutkan tahta, memberi peluang kepada orang Belanda untuk campur tangan di dalam urusan dalam negeri Mataram. Dari pihak yang dibantu, Belanda memperoleh imbalan berupa tanah. Dengan berakhirnya Perang Diponegara-Perang Jawa terakhir berlangsung antara tahun 1825 sampai dengan tahun 1830, tinggal seluas tanah yang tidak diperintah secara langsung oleh Belanda.

Daerah swapraja mengandung sifat Istimewa, diantaranya : terpeliharanya kesenian, adat-istiadat dan perilaku tradisional dalam lingkungan istana, yang di luar tembok sudah tidak digunakan atau disesuaikan dengan kondisi, lebih-lebih di daerah-daerah yang langsung diperintah oleh Belanda. Rasa hormat kepada para penguasa *vorstenlanden* lebih didasarkan pada kekuasaan yang didukung oleh polisi dan harta kekayaannya.<sup>54</sup>

Mengikuti pendapat bahwa hak atas tanah yang tertinggi ada pada raja maka di samping raja menggunakan tanah untuk memenuhi kebutuhan sendiri, tanah-tanah itu juga diberikan sementara kepada *sentana dalem* sebagai *tanah gadhuan*. Menurut fungsinya tanah di kerajaan dapat dibedakan menjadi: Pertama, *Bumi Narawita*, yaitu tanah yang menghasilkan sesuatu yang ditentukan dan diperlukan oleh raja. Tanah-tanah itu terdiri dari a) *bumi pamajegan*; b) *bumi pangrambe* dan c) *bumi gladag*. Kedua, *bumi lungguh* atau *tanah apanage*,

yaitu tanah *gaduhan* yang diberikan kepada *abdi dalem* sebagai gaji berupa *bumi palungguhan*. Tanah itu diberikan kepada *abdi dalem* selama mereka masih menduduki jabatan dalam pemerintahan. Oleh karena itu, *patih* diberi hak untuk memungut sebagian hasil *apanage*-nya<sup>55</sup>

Bertumpu pada landasan seperti itulah, maka status para penggarap tanah tidak lain hanyalah sekedar *menggaduh* dari penguasa, dan hak gaduh itu ditandai dengan diserahkannya lebih dari separuh hasil panen mereka kepada penguasa. Sebagian besar tanah diserahkan oleh penguasa kepada *bekel*. Selanjutnya *bekel* menyerahkan pengerjaannya kepada para petani dengan ketentuan pembagian hasil 20 % untuk *bekel*, 40 % untuk pihak yang berhak *nggaduh* atas tanah itu, dan 40 % sisanya untuk petani yang bersangkutan. Selain itu, para petani dibebani kewajiban membangun, memperbaiki, dan memelihara jalan, melakukan ronda, wajib kerja pada pemegang hak *gaduh*, dan menyediakan bahan makanan kepada para penguasa atau bangsawan pada peristiwa-peristiwa tertentu.

Dalam sistem di atas, maka tanah adalah milik penguasa, hak atas tanah itu di tangan para penggaduhnya, namun kekuasaan atas tanah dipegang oleh para *bekel*; sedang para petani hanya merupakan bagian dari tanah itu. Karenanya para pengusaha perkebunan Belanda dengan mudah dapat membeli hak *gaduh* itu dari orang yang berhak. Para *bekel* masih diberi hak atas 20 % tanah. Pengusaha perkebunan Belanda dengan mudah pula memperoleh tanah yang paling baik, sedang sebagai pemegang hak baru mereka tidak berniat untuk berbagi hasil tanaman pangan dengan para petani. Para petani harus menanam 40 % luas tanah dengan tanaman untuk ekspor sesuai petunjuk para pengusaha perkebunan sebagai ganti kewajiban mereka kepada para pemegang hak *gaduh*.

Di Kasunanan tanah-tanah *apanage* disewakan pada perusahaan perkebunan, sedangkan untuk Mangkunegaran sudah lebih dahulu dirintis pembebasan tanah *apanage* dan diusahakan agar tanah-tanah itu dimanfaatkan untuk tanaman perdagangan. Namun situasi di pedesaan pada umumnya

masih belum berubah karena masih terjadi pemerasan, pemalsuan dan sejenisnya oleh para *patuh*. Selain itu karena letak *apanage* yang bercampur aduk sangat menyulitkan para *patuh* dan petani.

Di Surakarta, selain tanaman padi, yang juga banyak ditanam adalah kopi. Tebu dan lada tidak begitu banyak, sedangkan kapas dan *tom* hanya ditanam untuk keperluan sendiri. Tembakau dan kacang-kacangan banyak yang dijual kepasar-pasar.

Selain dari bidang pertanian dan perkebunan di daerah Surakarta juga terkenal sebagai penghasil kerajinan, yaitu batik. Sekitar tahun 1890 kerajinan rumah mulai berkembang dan hasilnya dijual di pasar-pasar sekitar perkebunan dan bahkan menjangkau pasar di luar daerah Surakarta. Kerajinan batik tulis yang semula merupakan monopoli keluarga bangsawan sejak tahun 1890-an dibuat oleh orang-orang Cina. Pada waktu itu kain batik sudah menjangkau pasar-pasar seluruh Jawa dan Priangan.<sup>56</sup> Bahan-bahan baku batik seperti katun, damar, malam, dan soga distribusinya dikuasai oleh para pedagang Cina. Kerajinan yang lainnya yang banyak dihasilkan di Sala adalah kerajinan kuningan. Pemasarannya menembus daerah Semarang.

Sejak tahun 1775 sampai awal Perang Diponegara Pengangkutan dan perdagangan sudah berjalan lancar. Perdagangan alat-alat pertanian, hasil bumi, dan hasil kerajinan lainnya sudah memasuki pasar lokal. Bahkan untuk pemasaran barang ke luar daerah berarti telah memasuki pasar regional. Hubungan antara pedalaman dengan pantai utara yang sudah lama terjalin memudahkan masuknya barang-barang kebutuhan ke daerah pedalaman.

Pengangkutan yang sudah ada dilakukan dengan kapasitas dan jarak angkut yang sangat terbatas. Untuk pengangkutan jarak jauh digunakan *gerobak* atau *cikar* yang mampu menempuh jarak empat puluh *paal* sehari. Perjalanan yang lebih dari sehari memerlukan penginapan yang sekaligus

menjadi tempat transit para pedagang. Prambanan, Jatinom dan Boyolali adalah tempat transit bagi pedagang yang akan melanjutkan perdagangannya ke luar daerah Surakarta.

Perdagangan terus bertambah ramai, beras dari daerah Surakarta banyak dijual ke Semarang, Yogyakarta dan juga Salatiga. Barang dari kulit, emas dan perak sudah diperdagangkan sejak awal abad XIX. Di samping itu barang impor yang dimasukkan melalui pelabuhan Semarang antara lain kain putih, piring, cangkir, dan barang-barang dari porselin, bumbu, ikan asin, gambir, besi, baja, dan kuda.<sup>57</sup> Barang-barang itu ada yang diangkut dengan perahu ke pedalaman melalui Sungai Bengawan Sala. Sejak zaman kuno sungai mempunyai fungsi yang berbagai macam, antara lain untuk kepentingan ekonomi, sosial, politik maupun militer. Mengingat desa Sala yang akhirnya menjadi ibu kota Kerajaan Surakarta, letaknya dekat dengan sungai *Bengawan*, yaitu sungai yang terbesar di Jawa, maka tidak mustahil sejak zaman kuno daerah Sala menjadi tempat yang ramai. Perahu dari Gresik menyusur sungai Bengawan sampai di kota Sala dan masih dapat diteruskan ke hulu sejauh 20 *paal*. Muatan utama perahu itu adalah garam dan ikan asin untuk konsumsi di pedalaman. Gula dan kopi dari Surakarta banyak yang dijual ke Surabaya dan Semarang. Setelah dibukanya jalur angkutan dengan kereta api, angkutan dengan *gerobak* atau yang lewat sungai menjadi terdesak. Walaupun begitu para pedagang yang jalur perdagangannya tidak terlalu jauh, lebih senang memakai angkutan gerobak, sebab biayanya lebih murah.

Barang-barang dagangan dijual di pasar-pasar oleh para pedagang di hari-hari *pasar*. Hari pasaran ini antara pasar satu dengan yang lainnya tidak bersamaan. Adanya perbedaan siklus *pasar* ini dimaksudkan agar terjadi distribusi kegiatan ekonomi yang merata di setiap daerah. Sehingga akan diperoleh transaksi yang bergiliran. Pasar Gede di kota Sala, setiap harinya banyak dikunjungi pedagang dan pembeli dan pada hari *pasar*, pasar tersebut menjadi sangat ramai oleh transaksi yang dilakukan para pedagang. Baik pedagang dari daerah setempat atau pedagang dari luar daerah.

Sebelum Perang Diponegara, pasar-pasar yang menghasilkan berbagai pajak seperti pajak penjualan, *beya sapon* *beya bango* dan lainnya merupakan sumber pendapatan kerajaan. Pajak pasar yang tinggi di daerah Klaten menunjukkan banyaknya transaksi setiap tahunnya. Dan bersamaan dengan perluasan perkebunan maka banyak pula pasar-pasar yang didirikan di sekitar perkebunan.

#### ***Catatan Bab IV***

1. G.P. Rouffeer, "Voorstenlanden" dalam *Encyclopaedie van Nederlandsch Indie* jilid IV. Terjemahan M. Husodo Pringgokusumo, *Swapraja* (Surakarta: Rekso Pustoko, 1983), hal. 18.
2. *Ibid.*
3. Suratmin, *Paku Buwana VI*. (Jakarta: Proyek IDSN, Depdikbud, 1982), hal. 3.
4. "Het 40 - Jarig Regeeringsjubileium van S.D.I.W.I.S.K. Soesoehoenan Pakoeboewana X", dalam *Djawa* no. 1 Januari 1932, hal. 2.
5. Suratmin, *op.cit.*, hal. 7
6. Wisnu Widodo, "Sri Susuhunan Paku Buwana VI Genap 20 Tahun Diangkat Pahlawan Nasional", dalam *Suara Merdeka*, tanggal 17 November 1984.
7. *Ibid.*
8. Sumarno, "Karakter Seorang Pemimpin: Suatu Kajian Terhadap Serat Wulang Dalem Ingkang Sinuhun Paku Buwana IX", *Laporan Penelitian Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta*, 1995/1996, hal. 28.
9. Soemarsaid Moertono, *Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), hal. 62.

10. C. Lekkerkerker, *Land en Volk van Java* (Groningen: 1983), hal. 339
11. *Ibid.*
12. Soemarsaid, *op. cit.* hal. 18
13. Soeyatno, *Kolonialisme Barat dan Kemunduran Raja-raja Soerakarta Abad XIX* (Surakarta: FKIS-IKIP Surakarta, 1972), hal. 7
14. *Pawarti Surakarta* (Mangkunegara: Reksa Pustaka, 1929), hal. 64.
15. *Pangreh Pradja Bond* (Mangkunegara: Reksa Pustaka, 1938). hal. 112
16. F.A., Sutjipto, *Struktur Birokrasi Mataram Zaman Kerta Kartasura*. (Yogyakarta: Jurusan Sejarah, Fak. Sastra UGM, 1980), hal. 1-4.
17. *Pawarti Surakarta, op. cit.*, hal. 27.
18. F.A. Sutjipto, *Op. cit.*, hal. 4
19. *Staatsblad van Nederlandsch Indie*. Tahun 1847 No. 30 pasal. 2.
20. *Serat Perdjanjian Dalem Nata* (Surakarta: Radya Pustaka), hal. 41
21. G.P. Rouffaer, *op. cit.*, hal. 57.
22. *Pangreh Pradja Bond, op. cit.*, hal. 134.
23. *Pawarti Surakarta, op. cit.*, hal. 90.
24. G.P. Rouffaer. *op. cit.*, hal. 56
25. Willem G.J. Rimmelink, *Babak Pertama Pemerintahan Paku Buwana II 1725-1733: Menurut Sumber Babad dan Sumber VOC* (Yogyakarta : Yayasan Javanologi, 1983), hal. 3.

26. *Ibid.*
27. Darsiti Soeratman, *Kehidupan Dunia Kraton Surakarta 1830 - 1939*. (Yogyakarta: Tamansiswa, 1989), hal. 14.
28. *Ibid.*, hal. 22.
29. Perang Suksesi Jawa I (1709) terjadi konflik antara Amangkurat III (1703-1709) dengan Pangeran Puger (pamannya) dengan gelar Paku Buwana I. Perang Suksesi Jawa II terjadi perselisihan antara Amangkurat IV (1719-1727) dengan Pangeran Arya Mataram, Pangeran Blitar, Pangeran Purbaya dan Pangeran Diponegoro (Herucokro). Perselisihan ini berakhir dengan dibuang keempat pangeran ke Sailan. Perang Suksesi II terjadi perselisihan antara Paku Buwana II (1727-1747) dan dilanjutkan Paku Buwana III (1749-1788) dengan Pangeran Mangkubumi dan R.M. Said. Sengketa ini diakhiri dengan perjanjian Gianti (1755) yang membagi wilayah kerajaan Mataram menjadi dua yaitu Surakarta dan Yogyakarta, serta perjanjian Salatiga (1757) dengan munculnya kadipaten Mangkunegaran.
30. Soenarko, *Susunan Negeri Kita Jilid I*. (Jakarta: Djambatan, 1950), hal. 7
31. Radjiman, *Sejarah Surakarta* (Surakarta: UNS, 1992), hal. 52-53.
32. Darsiti Soeratman, *op. cit.*, hal. 12.
33. Radjiman, *Sejarah Surakarta Tinjauan Politik dan Sosial* (Surakarta: UNS, 1993), hal. 78-79.
34. Darsiti Soeratman, *loc. cit.*
35. Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. terjemahan H.J. Koesoemanto (Jogjakarta: Gadjah Mada University Press, 1981), hal. 22.



36. G.P. Rouffaer, *op. cit.*, hal. 23.
37. H.J. De Graaf, *Puncak Kekuasaan Mataram* (Jakarta: Grafiti Pers, 1987), hal. 150-157.
38. *Kota Jogjakarta 200 Tahun*. (Yogyakarta: Panitia Peringatan Kota Yogyakarta 200 Tahun, 1956), hal. 8
39. Radjiman, *Sejarah Surakarta* (Surakarta: UNS, 1992), hal. 34.
40. Kota Jogjakarta, *loc. cit.*
41. "De Evenwichts Politik:" dalam H.J. De Graaf, *Geschiedenis van Indonesia* ('s Gravenhage: van Hoeve, 1949), terjemahan M. Husodo Pringgokusumo, "Politik Keseimbangan 1757-1808" (Mangkunegaran: Rekso Pustoko)), hal. 3.
42. *Ibid.*
43. Dennys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya Warisan Kerajaan-Kerajaan Konsentris*, Jilid 3 (Jakarta: PT. Gramedia, 1996), hal. 5-7.
44. Suratmin, *op. cit.*, hal. 48.
45. Raden Mas Riyo Yosodipuro, *Sejarah Perjuangan Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Paku Buwana VI Pahlawan Kemerdekaan Nasional Melawan Penjajahan Belanda*. t.t., hal. 1. lihat pula Suratmin, *op. cit.*, hal. 57.
46. Darsiti Soeratman, *op. cit.*, hal. 14.
47. Soehartono, *Apanage dan Bekel : Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1930* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hal. 153.
48. G.P. Rouffaer, *op. cit.*, hal. 6.
49. *Ibid.*, hal. 11-12.

50. Kuntowijoyo, "*Social Change In an Agrarian Society: Madura 1850 - 1940*" (Columbia University, 1980), Disertasi, belum diterbitkan, hal. 5.
51. Darsiti Soeratman, *op. cit.*, hal. 50.
52. Onghokham, "Merosotnya Peranan Pribumi dalam Perdagangan Komoditi", dalam *Prisma* no. 8 Agustus 1988 (Jakarta: LP3ES, 1988), hal. 8.
53. *Ibid.*
54. Wiliam Joseph O'malley, "Indonesia di Masa Malaise: Suatu Studi Terhadap Sumatera Timur dan Yogyakarta di Tahun 1930-an", dalam *Prisma*, no. 8 Agustus 1983 (Jakarta: LP3ES, 1983), hal. 42.
55. Suhartono, *op.cit.*, hal. 29
56. *Ibid.*, hal. 49.
57. *Ibid.*, hal. 51.

**BAB V**  
**KASUNANAN SURAKARTA ADININGRAT**  
**AWAL ABAD XX**

**5.1 *Sistem Pemerintahan***

**5.1.1 *Pemerintahan Sunan Paku Buwana X***

Sunan Paku Buwana ke X dilahirkan pada tanggal 29 November 1866, sebagai putra ke-31 dari Sunan Paku Buwana IX dengan Kanjeng Ratu Paku Buwana. Paku Buwana X juga cucu dari Sunan PB VI yang sering disebut sebagai Sunan Banguntapa.

Sunan PB X dikala masih kecil bernama Raden Mas Gusti Sayidin Malikul Kusno. Ketika beliau berumur 3 tahun diangkat sebagai Adipati Anom (Putra Mahkota) dan diberi nama Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro Sudibyo Rajaputra Narendra Mataram. Pada tanggal 23 Juli 1890, ketika masih menjadi Pangeran Pati, beliau menikah dengan salah seorang putri Sri Mangkunegara IV. Putri itu bernama Bendoro Raden Ajeng Sunarti, yang kelak bergelar Kanjeng Ratu Paku Buwana.

Setelah Sunan PB IX wafat, maka pada hari Kamis Wage tanggal 30 Maret 1893 beliau menggantikan tahta kerajaan, bergelar lengkap Sinuwun Kanjeng Susuhunan Paku Buwana X Senapati Ingalaga Abdul Rahman Sayidin Panatagama. Pada tahun 1924, Sunan PB X diangkat sebagai Letnan Jenderal oleh

Pemerintah Belanda. Sejak saat itu Sunan PB X disebut juga dengan nama *ingkang Wicaksana* (yang bijaksana).

Semasa Sunan PB X bertahta, keadaan Praja Surakarta Hadiningrat sudah memasuki zaman baru. Kraton sendiri setelah beberapa kali mengalami pembangunan dan penambahan, sehingga membuat wajahnya menjadi semakin anggun. Sedangkan kota Solo atau Surakarta juga telah berada dalam tingkat yang cukup maju.

Struktur pemerintahan kraton secara berkesinambungan disempurnakan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan. Untuk itu Sunan PB X membentuk kantor-kantor yang bertugas dalam bidangnya masing-masing. Di antaranya adalah kantor kabinet yang dinamakan *Sitoradiya* dan kantor *Comptabiliteit* yang dinamakan Panti Wardaya.<sup>1</sup>

Selama bertahta, Sunan PB X mengadakan pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya. Usaha-usaha yang dilakukan meliputi berbagai bidang, yaitu bidang sosial ekonomi, pendidikan, dan politik. Dalam bidang sosial ekonomi, Sunan PB X mengadakan kredit untuk pembangunan rumah bagi rakyat yang kurang mampu. Pasar dan jembatanpun dibangun sebagai sarana vital dalam perekonomian dan perhubungan. Bidang pendidikan juga menjadi perhatiannya, sebagai contoh adalah didirikannya sekolah "Pamardi-Putri" dan "Kasatrian", bagi kepentingan kerabat kraton. Didirikan pula organisasi pemuda sebagai wadah kegiatan para pemuda. Sunan PB X juga memberikan dukungannya pada kaum pergerakan, yaitu dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan. Seperti gedung Hadiproyo yang diperkenankan untuk dipakai bagi kelancaran tugas dan kegiatan kaum pergerakan. Sunan Juga memberi kebebasan penuh kepada para kerabat kraton untuk terjun ke gelanggang pergerakan.

Struktur pemerintahan pada masa Sunan PB X masih sama seperti pada masa raja-raja sebelumnya, dimana raja menduduki dan memiliki jabatan dan kekuasaan tertinggi. Untuk melaksanakan roda pemerintahan, Sunan (raja) dibantu

oleh para *sentana* dan *abdi dalem*. Mereka berkedudukan sebagai wakil raja. Dalam menjalankan roda pemerintahan, *sentana* dan *abdi dalem* menerima pelimpahan tugas dan tanggung jawab dari Sunan (raja). Jalannya roda pemerintahan tetap berdasarkan kebijaksanaan raja. Di bawah raja terdapat sebuah Dewan Menteri (Kabinet) yang berkantor di *Sasana Wilapa*. Dewan tersebut berfungsi sebagai pembantu raja. Adapun tugas dewan adalah mengurus surat dari dan untuk raja. Dewan ini dipimpin oleh seorang *abdi dalem* Bupati dibantu oleh Bupati Anom. Para *abdi dalem* dalam Dewan tersebut biasanya disebut kelompok *abdi dalem Carik Kasepuhan*.

Pada masa Sunan PB X, terdapat pemisahan antara pemerintahan istana (*lebet*) dengan pemerintahan kerajaan (*nagari = jawi*). Pemerintahan istana (*lebet*) diserahkan kepada *Reh Kasentanan*. Sedangkan pemerintahan kerajaan dilaksanakan oleh *Reh Kepatihan*.

#### 5.1.1.1 Pemerintahan Istana

Kerajaan Surakarta seperti halnya negara-negara tradisional Jawa lainnya, dianggap sebagai suatu rangkaian dari beberapa lingkaran konsentris dengan raja di tengah-tengahnya. Segala kewibawaan dan kekuasaan berada di tangan raja dan kekuasaan ini dibenarkan dengan pengukuhan Ilahi. Paling dekat dengan raja adalah lingkaran pertama atau lingkaran dalam, yaitu istana atau kraton.

Istilah kraton menunjuk pada tempat kediaman ratu atau raja, mempunyai beberapa arti. Pertama, berarti negara atau kerajaan; kedua, berarti pekarangan raja, meliputi wilayah di dalam *cepuri* (tembok yang mengelilingi halaman) *Baluwarti*; ketiga, arti pada nomor dua itu ditambah dengan alun-alun.<sup>2</sup> Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan istana atau kraton adalah arti yang disebutkan terakhir. Istana raja dan tempat kediaman yang dihuni bersama keluarganya, beserta bangunan-bangunan tempat pangeran dan bangsawan bekerja, termasuk dalam pusat negara yang dianggap magis religius.

Di seluruh kerajaan, kraton merupakan bangunan yang unik, karena ukurannya paling luas, dan struktur bangunannya bersifat khusus. Kraton adalah monopoli raja, karena itu penguasa tradisional lainnya, misalnya Kadipaten, tidak diperkenankan duduk di *dhampar* dan tidak diizinkan memiliki alun-alun, *Bale Witana*, disamping tidak berhak memutuskan hukuman mati.<sup>3</sup> Dengan demikian alun-alun dan Siti Hinggil hanyalah untuk kraton, tempat kedudukan raja.

Kraton yang sangat besar dan sangat lengkap tersebut memerlukan suatu perangkat yang dapat dipakai untuk mengurus segala keperluannya. Perangkat yang mengurus hal itu adalah pemerintahan kraton, yang dipimpin oleh seorang pembesar kraton. Dalam menjalankan tugasnya pemerintah kraton dibagi dalam beberapa lembaga. Menurut Radjiman<sup>4</sup>, yang mengambil dari *Pawarti Soerakarta*, disebutkan:

- Reh Kasentanan, lembaga ini mengurus tentang raja, permaisuri, *garwa ampeyan* (*priyantun dalem*) serta putra-putra raja. Lembaga ini dipimpin oleh seorang Pangeran Sentana, kantornya berada di *Sasana Wilapa*.
- Lembaga yang mengurus para *abdi dalem* yang bekerja di dalam istana (*abdi dalem lebet*). Lembaga ini tergabung di dalam Reh Kanayakan, yang dipimpin oleh seorang Wedana Bupati Nayaka. Termasuk dalam Reh Kanayakan ini adalah: Kantor *Kapilihan* mengurus pekerjaan di istana; kantor *Kaniten Lebet* mengurus kebutuhan harian istana; kantor *Kaniten Jawi* mengurus kebutuhan pangan dan sandang istana; kantor *Pangrambe* mengurus tentang *siti* (tanah) *dhusun* dan menerima pajaknya.
- Lembaga yang mengurus keuangan istana. Mereka tergabung dalam lembaga kas kraton yang dipimpin oleh seorang Wedana Bupati Gedong.
- Lembaga yang mengurus adanya yayasan, rumah tinggi istana, perlengkapan istana dan kegiatan istana yang lain. Misalnya: *wisudan*, *manten*, dan sebagainya. Lembaga ini

tergabung dalam *Reh Parentah Kraton*, yang dipimpin oleh seorang *wedana (nayaka)*.

- Lembaga yang mengurus tanah *pamijen kraton* dan pembangunan di lingkungan istana. Lembaga ini bergabung dalam lembaga harta benda yang dipimpin oleh seorang *abdi dalem* Bupati Pangrembe.

Lembaga-lembaga tersebut terbentuknya tidak sekaligus, tetapi secara bertahap. Selanjutnya pada tahun 1920 diadakan pengaturan kembali mengenai *Pamarentah Kraton* (istana) tersebut. Jumlah kantornya ada 19 buah, yaitu:

- 1) Kantor Sasana Wilapa, merupakan kabinet raja
- 2) Kantor Komisi Karaton dan Komisi Pasamuhan Karaton. Tugasnya mengurus kas kraton, kereta, kuda beserta perlengkapannya, serta melaksanakan tugas-tugas pada waktu kraton punya kerja.
- 3) Kantor Pangageng Parentah Karaton
- 4) Kantor Pemerintahan
- 5) Kantor Sitaradya
- 6) Kantor Keuangan atau Kantor Pantiwardaya
- 7) Kantor Karaton
- 8) Kantor Mandrasana
- 9) Kantor Kartipura
- 10) Kantor Reksawahana
- 11) Kantor Gitaswandala
- 12) Kantor Balekarta
- 13) Kantor Hamongraras dan Kantor Reksacangkrama

- 14) Kantor Sasana Pustaka
- 15) Kantor Pantiarta
- 16) Kantor Kridabudaya
- 17) Kantor Wismayana
- 18) Kantor Pananggap
- 19) Kantor Kaputran Karaton.

#### 5.1.1.2 Pemerintahan Nagari (Kerajaan)

Pemerintahan *nagari* (kerajaan) merupakan pelaksana kebijaksanaan raja. Mereka adalah para pembantu raja di bidang urusan kerajaan, pimpinannya dipegang oleh patih. Patih diberi hak oleh raja untuk mengatur negara, mengadakan hubungan negara lain dan terutama dengan pemerintah Belanda serta dengan pembesar lainnya. Seperti halnya pemerintah kraton, pemerintah kerajaan juga mempunyai bagian-bagian yang bertugas menangani bidang yang berlainan. Kelompok atau bagian dalam lembaga pemerintah kerajaan ada 3, yaitu : golongan sekretariat, golongan pengelola keuangan serta golongan pengadilan dan pemerintahan.

Pada masa Sunan PB X juga terdapat Dewan Pertimbangan (*raad*) yang mendampingi raja beserta para *abdi dalem* di dalam menjalankan roda pemerintahan kerajaan. Ketiga dewan tersebut adalah Dewan Bale Agung, Dewan Karaton, dan Dewan Kepatihan.

#### 5.1.1.3 Dewan Bale Agung

Dewan ini dibentuk atas kehendak Paku Buwana X. Dewan berkedudukan sebagai penasihat dan sebagai badan pertimbangan kerajaan. Tugasnya memberikan pertimbangan dan saran terhadap rancangan peraturan dan yang sejenis yang akan dikeluarkan. Keanggotaan dewan ini ditunjuk oleh raja dengan persetujuan dari Gubernur Surakarta. Jumlah anggotanya ada sebelas orang termasuk ketua dan wakilnya,



ditambah anggota luar biasa yang berjumlah tiga orang yang merangkap sebagai penasehat. Masa jabatan selama tiga tahun.

#### 5.1.1.4 Dewan Karaton

Dewan ini khusus merupakan dewan raja. Jumlah anggota ada tujuh orang, masa jabatan juga tiga tahun. Tugas dewan ini adalah mengajukan usul; mempertimbangkan hasil keputusan Dewan Bale Agung dan memberikan pertimbangan kepada raja. Adapun kantor yang dipakai oleh dewan ini berada di Sasana Wilapa. Sejak kapan dewan ini berdiri, kurang jelas, namun pada masa Sunan PB X, dewan tersebut sudah ada.

#### 5.1.1.5 Dewan Kapatihan

Dewan ini merupakan dewan pertimbangan patih dalem beserta para bupati. Pelaksanaannya berdasarkan pada tradisi yang telah berlaku, dan patih berkedudukan sebagai pimpinan. Tugas dewan ini adalah memberikan pertimbangan atas segala keputusan Dewan Bale Agung yang telah mendapat peninjauan dari Dewan Karaton.

### 5.1.2 *Administrasi Wilayah*

Pada bab yang terdahulu telah ditulis bahwa sejak Agustus tahun 1873, tiap kabupaten Pulisi dibagi menjadi 5 distrik, dan tiap distrik diberi pembantu seorang mantri *onderdistrik*. Menurut surat dari Residen Surakarta yang ditujukan pada patih Kasunanan, enam daerah kabupaten pulisi yang dibentuk berdasarkan *staatsblad* 1847 No. 30, dibagi menjadi daerah-daerah yang lebih kecil adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

- 1) Kabupaten Sragen, dibagi menjadi 4 distrik, yaitu Sragen, Gropol, Sambungmacan, dan Majenang.
- 2) Kabupaten Boyolali dibagi menjadi 5 distrik, yaitu: Boyolali, Tumang, Banyudono, Koripan, dan Jatinom.
- 3) Kabupaten Ampel dibagi menjadi 5 distrik, yaitu: Ampel, Sima, Karang Gede, Lawang, dan Kaliasa.

- 4) Kabupaten Klaten dibagi menjadi 6 distrik, yaitu: Klaten, Senuluh, Prambanan, Gesikan, Gedangan, dan Kalisoka.
- 5) Kabupaten Kartasura dibagi menjadi 5 distrik, yaitu: Kartasura, Katitan, Taraman, Benda dan Jenon.
- 6) Kawedanan Larangan (Sukaharja) dibagi menjadi 4 distrik, yaitu Sukaharja, Nguter, Tawang Sari, dan Masarah.

Selanjutnya perubahan yang terjadi pada masa Sunan PB X pada tahun 1893 untuk mempermudah pengurusan administrasi pemerintahan, maka Kabupaten Kartasura dan Kabupaten Ampel dihapuskan. Kedua kabupaten itu dijadikan daerah kewedanan atau kapanewon. Kapanewon Surakarta dimasukkan dalam wilayah kabupaten kota Surakarta, dan Kapanewon Ampel dimasukkan ke dalam wilayah Kabupaten Boyolali.<sup>6</sup> Pada tahun 1893 terjadi pula perubahan mengenai penarikan beberapa daerah kapanewonan yang kemudian dimasukkan dalam daerah kabupaten terdekat.

Pada sekitar awal tahun 1900-an tanah-tanah yang merupakan daerah *enclave* di kabupaten Ambarawa, yaitu Getas, Gesangan, dan Palur dimasukkan dalam wilayah kabupaten Salatiga. Sedangkan Ngasinan masuk wilayah Ambarawa. Kemudian tanah di Singasari seluas 29,5 jung yang semula menjadi daerah Mangkunegaran, dimasukkan ke dalam wilayah Kabupaten Pulisi, kota Boyolali, sejak tahun 1902. Beberapa perubahan masih terus berlangsung sampai tahun 1942 (pemerintahan Paku Buwana XI)

Kasunanan Surakarta sesudah adanya perubahan pada tahun 1927 adalah meliputi Pajang (Kabupaten Pangreh Praja Sragen). Sukawati bagian selatan (kabupaten Pangreh Praja kota Surakarta), Pengging dan Gagatan (Kabupaten Pangreh Praja/Sragen), sedangkan daerah Mangkunegara meliputi Matesih, Sukawati Tengah, Pajang, Hanggabayan, Ngaribaya, dan Gunung Duk (Kabupaten Pangreh Praja Mangkunegaran); Sembuyan, Kaduwang, Wiraka dan Nglaroh (Kabupaten Pangreh Praja Wanagiri). Wilayah-wilayah di atas selanjutnya

disebut dengan wilayah Surakarta. Dalam tahun yang sama pula yaitu 1927, daerah tersebut di atas dibagi menjadi *Afdeling Kutha* Surakarta meliputi Kabupaten Pangreh Praja Kota Surakarta, Sragen, Kota Mangkunegaran dan Wanagiri. *Afdeling* Klaten meliputi Kabupaten Pangreh Praja Klaten dan Boyolali. Selanjutnya secara terinci lihat di lampiran.

Perubahan paling fundamental yang terjadi pada masa pemerintahan Sunan PB X adalah penggantian status kabupaten Pulisi menjadi Kabupaten Pangreh Praja dan adanya *compleit* tahun 1911-1922 tentang penentuan status tanah bagi milik perseorangan.

Perubahan status tanah dengan adanya *compleit*, dimulai dari tanah-tanah milik raja (*Bumi Pangrambe*), yaitu di Ngunataraharja, Klaten dan Bumi Panumping. Setelah tanah milik raja, kemudian dilanjutkan dengan tanah-tanah para *abdi dalem* dan *sentana dalem*. Tanah milik para *abdi dalem* dan *sentana dalem* yang diambil oleh kerajaan selanjutnya diganti dengan uang yang jumlahnya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Dengan adanya *compleit* ini, maka hak milik atas tanah secara perseorangan diakui. Selanjutnya sebagai pelaksanaannya diadakanlah pengukuran, klasifikasi tanah, pemberian patok pembatasan sawah-sawah, pagar dan sebagainya. Proses ini memakan waktu cukup lama, dan baru bisa dikatakan selesai pada tahun 1939.

Dengan adanya peraturan hak milik perorangan atas tanah tersebut berarti baik *abdi dalem* maupun *sentana dalem* tidak dapat bertindak sebagai tuan tanah kepada rakyatnya. Akan tetapi harus melalui saluran menurut peraturan yang berlaku. Dengan adanya *compleit* juga mengikat perkembangan sistem administrasi Barat, dimana perkembangan ekonomi perusahaan dan perkebunan membutuhkan tanah untuk dapat beroperasinya modal para pengusaha Barat. Oleh karena itu para pengusaha Barat lebih mudah berurusan langsung dengan rakyat, apabila rakyat telah memiliki kepastian hukum tentang tanah yang dimilikinya. Pemberian status hak milik atas tanah

juga mengakibatkan berluasan kewenangan bagi pemerintah daerah serta perlunya pengaturan aparat-aparat yang mempunyai tugas yang jelas.

### *5.1.3 Sistem Pengadilan*

Kraton Surakarta sebagai suatu negara kerajaan memiliki struktur pemerintahan yang tersusun atas beberapa lembaga di antaranya adalah lembaga peradilan kraton. Secara kelembagaan, peradilan kraton yang merupakan bagian dari struktur pemerintahan memberikan kontribusi dalam upaya menegakkan hukum, menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan kraton. Selain itu, peradilan kraton adalah lembaga penegak hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan yang bisa mengakibatkan timbulnya ancaman terhadap eksistensi kekuasaan raja.

Dalam bab sebelum telah diulas tentang sistem pengadilan, bahwa dalam perkembangan sejarahnya, lembaga pengadilan di kraton Surakarta mengalami beberapa kali perubahan. Kebijakan kraton menjadi semakin banyak dipengaruhi oleh pemerintah kolonial. Namun demikian legitimasi Sunan tetap terjaga di mata masyarakat kraton. Dengan *intervensi* pemerintah kolonial terhadap kekuasaan pengadilan menjadikan Sunan hanya merupakan simbol.<sup>7</sup> Sementara itu secara tidak langsung pemerintah kolonial bertindak sebagai pengendali kekuasaan pemerintahan kraton.

Kebijakan reorganisasi peradilan yang dilaksanakan pemerintah kolonial secara umum dikenakan pada masyarakat Hindia Belanda. Khususnya di lingkungan kraton Surakarta, reorganisasi peradilan menjadi bagian peristiwa sejarah yang berlangsung cukup lama. Proses perubahan bidang peradilan di kraton Surakarta tersebut tidak hanya terjadi sekali, tetapi terjadi beberapa kali yang mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Sunan PB X. Reorganisasi peradilan yang terjadi di Kraton Surakarta dilakukan tanpa menghapus sama sekali kelembagaan yang ada. Perubahannya dilakukan secara

bertahap.<sup>8</sup> Pengurangan kekuasaan dilakukan sedikit demi sedikit.

Penguasaan bidang hukum merupakan langkah-langkah yang strategis untuk menguasai kehidupan politik dan memantau tata pemerintahan kraton. Alasan pemerintah Belanda melakukan tindakan politis tersebut adalah supaya mudah mempengaruhi serta menentukan kebijaksanaan kraton. Pemerintah kolonial mencoba menggeser hukum Islam sebagai salah satu hukum asli di kasunanan dan menggantinya dengan hukum Belanda. Kerugian yang timbul akibat Perang Diponegoro juga menjadi salah satu alasan pemerintah kolonial mengadakan reorganisasi di Surakarta. Berkurangnya kekuasaan peradilan di Kraton Surakarta menjadikan *eksploitasi* kolonial atas tanah jajahan kian meningkat.<sup>9</sup>

Keadaan lembaga pengadilan kraton sebelum proses reorganisasi 1903 sudah tampak adanya pengaruh kolonial. Perjanjian antara Sunan dengan pemerintah kolonial menjadi pegangan dan sekaligus tanda kebebasan pihak kolonial dalam memaksakan perubahan-perubahan. Bergesernya legitimasi Sunan PB X disebabkan oleh menguatnya kekuasaan kolonial Belanda.

Persetujuan kerjasama yang ditandatangani Sunan PB IX dengan Residen, lebih dipertegas dalam suatu perjanjian politik. Pada tahun 1886 dan 1889, Sultan Hamengku Buwana dan Sunan Paku Buwana menyerahkan kekuasaan pengadilan kepada Residen yang bertugas di daerah *Vorstenlanden*. Ikatan kontrak politik atas kekuasaan pemerintah Kasunanan Surakarta tersebut mengancam legitimasi raja. Menyempitnya fungsi kewenangan Sunan atas kepentingan rakyat, menjadikan Sunan tidak lebih hanya sebagai seorang *patuh* terhadap pemerintah kolonial.<sup>10</sup>

Jatuhnya pengadilan kraton yang menangani perkara-perkara *kawula dalem* ke tangan pemerintah kolonial berawal saat Sunan PB IX meninggal dan kemudian dilanjutkan oleh penerusnya. Untuk kepentingan ini sebelum dinobatkan

menjadi raja, Sunan yang baru harus menandatangani Suatu *verklaring* yang dilangsungkan pada tanggal 25 Maret 1893.<sup>11</sup> Lima hari kemudian dilangsungkan penobatan raja (30 Maret 1893) yang diikuti dengan penandatanganan akta perjanjian (*Acte van Verband*). Menandatangani suatu *verklaring* merupakan suatu tradisi baru, karena sebelumnya raja-raja Surakarta hanya diwajibkan menandatangani akta perjanjian saja.

Beberapa butir isi *verklaring* adalah :

- 1) perbaikan pengadilan, kepolisian dan penyelesaiannya menurut hukum;
- 2) daerah terselip (*enclave*);
- 3) ganti rugi dari pemerintah;
- 4) pemungutan pajak baru;
- 5) penyewaan tanah kepada orang-orang Eropa;
- 6) kerja wajib bagi penduduk yang tinggal di daerah yang disewa oleh pengusaha asing;
- 7) seremoni pada pesta dan kesempatan lain.<sup>12</sup>

Isi dari akte perjanjian antara lain :

- 1) mengakui kedudukannya sebagai *vasal* yang memperoleh tanah Surakarta bukan karena kekuasaan sendiri, melainkan sesuai dengan perjanjian tahun 1749;
- 2) berjanji akan setia pada perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh raja-raja sebelumnya, khususnya perjanjian tanggal 22 Juni 1830;
- 3) akan memerintah secara adil, melindungi pertanian, perdagangan, dan memajukan kesejahteraan rakyat;
- 4) tidak akan melakukan hubungan politik dengan negara asing;

- 5) menyatakan jika ia tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian, pemerintah berhak menarik kembali tanah pinjaman itu.<sup>13</sup>

Ikatan hubungan yang diungkapkan pada salah satu butir perjanjian penobatan, yang menyatakan bahwa Sunan merupakan *vasal* pemerintah kolonial juga disebutkan dalam Serat Perjanjian Dalam Nata, yaitu :

*Kanjeng Gupermen ing Nderland India, Kula anganggep inggilan kula kang ageng piyambak, dene ingkang sami anyepeng pengawasa ing atasipun kula terang saking kanjeng Gupermen wau, punika kula anggep pengageng kula, sarta kula hurmati amila tuhu tuwin amitulungi. Serat perjanjian Dalem Nata.*

Artinya lebih kurang :

Tuan Gupermen di Hindia Belanda, saya anggap atasan saya yang paling besar (tinggi), adapun para penguasa di atasnya saya minta penjelasan Tuan Gupermen, itu juga saya anggap atasan saya, serta saya hormati dengan sungguh-sungguh dan memberi pertolongan.

Peraturan reorganisasi pengadilan di Kasunanan lebih dipertegas melalui *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* tahun 1903 no. 8. Dalam *staatblad* tersebut dijelaskan bahwa sistem peradilan dipecah menjadi dua, yaitu peradilan yang berada di bawah kekuasaan Kasunanan dan peradilan yang berada di bawah wewenang gubernemen (pengadilan, *landraad*). Kasunanan hanya berhak menyelenggarakan dua lembaga pengadilan, yaitu lembaga pengadilan *Pradata Gedhe* dan pengadilan *Surambi*. Pengadilan *Pradata Gedhe* juga disebut

#### 5.1.3.1 Pradata Negari.

Sesudah reorganisasi dibentuk susunan anggota kehakiman sendiri dari seorang hakim sebagai ketua sidang, panitera, kepala jaksa, dua orang jaksa, serta dua orang pembantu jaksa. Persidangan *Pradata Gedhe* dianggap resmi apabila dihadiri

seluruh anggota kehakiman/Penyelesaian perkara hukum di Kasunanan masih menggunakan peraturan hukum adat Jawa. Namun hukum adat tersebut semakin lama semakin kehilangan kekuatannya.

Pengadilan *Surambi* setelah reorganisasi tahun 1903 juga mengalami penyempitan. Pengadilan ini hanya menangani perkara hukum *darah dalem* dan *sentana dalem*. Ketua pengadilan *Surambi* yang dulunya dipegang oleh penghulu kraton, setelah reorganisasi dipegang oleh *abdi dalem wedana*.

Dalam ketentuan *staadblad* 1903 no. 8 dijelaskan bahwa pengadilan pribumi Kasunanan diselesaikan melalui *landraad*. Sedangkan perkara kriminal dan sipil para bangsawan maupun para bupati *nayaka dalem* ditangani oleh pengadilan kraton Surakarta.<sup>14</sup> Dalam ketetapan tahun 1903 juga menyebutkan bahwa bangsawan yang dimaksud hanya sampai tingkat empat. Adapun bangsawan sampai keturunan keempat tersebut adalah permaisuri (termasuk permaisuri raja-raja terdahulu), *garwa ampeyan*, *putra sentana* sampai *canggih* raja termasuk para istri dan suami mereka, *pepatih*, *bupati nayaka* beserta istrinya.<sup>15</sup>

Apabila seorang *sentana dalem* menjadi kawula *gubernemen* melakukan tindak kejahatan maupun pelanggaran, maka yang berwenang memutuskan perkaranya adalah pengadilan Gubernemen. Sedangkan apabila ada *kawula dalem* yang melakukan pelanggaran di daerah *gubernemen* atau sebaliknya maka yang berwenang mengadili adalah pengadilan di daerah setempat.

Masuknya sistem hukum Belanda ke Surakarta secara tidak langsung memberi dampak positif. Proses reorganisasi setidaknya mempengaruhi kehidupan sosial di lingkungan kraton. Pengaruh aspek sosial tersebut berhubungan dengan aspek-aspek yang lainnya seperti aspek ekonomi, budaya politik, pendidikan dan juga psikologi. Golongan elit di kraton Surakarta secara tidak langsung juga terpengaruh oleh perubahan tersebut. Pengaruh itu terjadi seiring dengan



munculnya fasilitas pendidikan hukum di Batavia. Banyak kalangan elit kraton yang memasuki pendidikan itu, agar bisa mengisi posisi yang tersedia akibat dari perubahan peradilan. Karena pendidikan hukum dipandang sebagai persiapan untuk bisa menjadi pegawai pemerintah maka anak laki-laki golongan priyayi didorong untuk belajar di situ.<sup>16</sup> Lambat laun tingkat pendidikan menjadi lambang status bagi seseorang.

Golongan elit terpelajar semakin dibutuhkan untuk mengisi lowongan pekerjaan di lembaga pengadilan. Sarana pendidikan hukum tersebut merupakan salah satu *inovasi* yang diberikan pemerintah kolonial kepada masyarakat pribumi, melalui politik etis pada awal abad XX. Pemerintah kolonial memberikan perlindungan perwalian kepada pribumi, mendidik hingga mengenal kemajuan, dan membawanya ke taraf kehidupan yang lebih layak. Sekolah hukum ini dimaksudkan untuk lebih memprofesionalkan penyelenggaraan hukum kolonial. Namun dalam kenyataan, sekolah ini telah menjadi salah satu titik awal terjadinya proses-proses ke arah nasionalisasi hukum kolonial. Sistem hukum yang terinstitusi di atas dasar peradaban Barat inilah, yang seterusnya dipertahankan dan dialihkan lewat proses antargenerasi sampai akhirnya pemerintahan kolonial di Indonesia. Seluruh bangunan hukum kolonial dinasionalisasi menjadi bagian dari tertib hukum nasional.<sup>17</sup>

Adanya reorganisasi peradilan 1903 menimbulkan perubahan teritorial di daerah-daerah. Perubahan tersebut dengan alasan untuk mempermudah pekerjaan para pegawai *Gubernemen* dalam mengontrol daerah jajahannya. Sehingga mulai tahun 1919 distrik kota Surakarta dibagi menjadi enam distrik pembantu, yaitu Surakarta, Serengan, Gading, Gandekan, Laweyan, dan Jebres. Setiap distrik pembantu dikepalai seorang *mantri* dan masing-masing distrik pembantu tersebut membawahi *onder* distrik. Karyawan pemerintah dari distrik pembantu dibentuk dari seorang Panewu yang mengepalai seluruh distrik.<sup>18</sup>

Kebijaksanaan pemerintah kolonial terus disalurkan secara langsung, tanpa melalui pemerintah baik *sentana dalem*

maupun *abdi dalem*. Langkah berikutnya, Asisten Residen beserta seluruh stafnya disebut sebagai *abdi dalem* Pangreh Pradja. Sejak reorganisasi itu, juga ada keharusan staf ahli pengadilan memeriksa rumah tahanan negara untuk pribumi. Selain itu, dalam bidang pemerintahan dikeluarkan ketetapan bahwa setiap anggota kepolisian sejak reorganisasi itu disebut sebagai karyawan pemerintah.

## ***5.2 Surakarta Pada Masa Pergerakan Nasional***

Selama akhir abad XIX sampai awal abad XX terjadi perubahan politik kolonial Belanda di Indonesia. Selama abad XIX sistem tanam paksa telah mendatangkan keuntungan besar pada pihak Belanda di atas penderitaan rakyat. Akibatnya politik tersebut mendapatkan kritikan keras dari golongan liberal yang mulai berkuasa di Parlemen Belanda. Kebijakan kolonial Belanda tersebut kini mengambil tujuan baru. Eksploitasi terhadap Indonesia mulai berkurang sebagai pembenaran utama bagi kekuasaan Belanda, dan digantikan dengan pernyataan-pernyataan keprihatinan atas kesejahteraan bangsa Indonesia. Kebijakan ini dinamakan politik etis. Masa muncunya kebijakan ini mengakibatkan perubahan-perubahan yang mendasar sedemikian rupa di lingkungan penjajahan, sehingga orang tidak akan dapat memahami sejarah Indonesia pada awal abad XX apabila tidak mengacu pada kebijakan tersebut. Di dalam kebijakan politik etis sebenarnya terdapat lebih banyak teorinya daripada prakteknya.<sup>19</sup>

Pada tahun 1899 C. Th. van Deventer, seorang ahli hukum yang pernah tinggal di Indonesia selama tahun 1880-1897 menerbitkan sebuah artikel yang berjudul "*Een eereschuld*" (suatu hutang kehormatan) di dalam majalah berkala Belanda *de Gids*. Dia menyatakan bahwa negeri Belanda berhutang kepada bangsa Indonesia terhadap semua kekayaan yang telah diperas dari negeri mereka.<sup>20</sup> Hutang ini sebaiknya dibayarkan kembali dengan jalan memberi prioritas utama kepada kepentingan rakyat Indonesia di dalam kebijakan kolonial. Pihak Belanda menyebut tiga prinsip yang dianggap merupakan

dasar kebijakan baru tersebut yaitu edukasi, emigrasi, dan irigasi.<sup>21</sup>

Hasil politik etis antara lain dengan munculnya golongan cerdas pandai di kalangan rakyat dan bangsawan Indonesia. Mereka mulai sadar akan dirinya dan kemudian membentuk suatu kelompok baru yang berjuang untuk memperbaiki nasibnya. Tidak hanya kesejahteraan yang dituntut tetapi juga kemerdekaan nasional. Gerakannya disebut gerakan nasional. Elit yang muncul kemudian menuangkan ide-idenya lewat cara berorganisasi. Oleh karena itu yang muncul kemudian adalah lahirnya organisasi politik, seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, *Indische Partij*, Muhammadiyah, dan sebagainya yang berjuang dengan ide dan cita-citanya sendiri-sendiri, sesuai dengan azas dan anggaran dasarnya. Tokoh-tokoh nasional mulai muncul dan berjuang untuk usaha perbaikan nasib bangsawannya.

Pada awal tahun 1900-an merupakan masa pertumbuhan dan pematangan pergerakan nasional. Pengaruh nafas pergerakan ternyata juga sampai di daerah Kasunanan (Surakarta). Di daerah Surakarta mulai muncul dan bahkan menjadi salah satu pusat tumbuhnya organisasi-organisasi sosial politik.

Awal abad XX keadaan politik di Surakarta perlu mendapat perhatian tersendiri karena periode ini penuh dengan gejolak dan perubahan yang memberikan ciri khas dan corak perkembangan yang berbeda dengan daerah lain. Sudah dibahas di muka bahwa kekuasaan Sunan dan pengaruh para bangsawan dikurangi sehingga tinggal lambang-lambang yang kurang bermakna bagi kekuasaan yang nyata. Kunjungan Gubernur Jenderal van Rees pada tahun 1887 ke istana Sunan Paku Buwana IX membuktikan berkurangnya kekuasaan Sunan. Jika dilihat dari status dan penggunaan lambang-lambang.<sup>22</sup> Hubungan antara Sunan dan Gubernemen sampai dengan dasawarsa kedua abad XX ditandai oleh hubungan politik pada tingkat atas. Selanjutnya hubungan itu akan bergeser ke bawah setelah organisasi-organisasi dalam pergerakan nasional memperhatikan kekuatan massa.<sup>23</sup>

Upaya untuk menegakkan kembali kekuasaan Sunan yang sudah berkurang itu dimulai melalui organisasi politik modern. Organisasi SI (Sarekat Islam) hidup subur dan mendapat tempat di pedesaan Surakarta. Ini merupakan bukti bahwa gerakan politik di Surakarta mendapat dukungan semua lapisan atas yang terdiri dari para bangsawan dan priyayi tetapi juga lapisan bawah yang sebagian besar adalah petani. Dalam dua dasawarsa situasi politik di Surakarta berkembang cepat karena di daerah ini tumbuh berbagai jenis organisasi modern yang dijadikan dasar perkembangan organisasi politik selanjutnya.<sup>24</sup>

Dominasi politik kolonial yang makin kuat tidak akan mungkin hanya diimbangi oleh kekuatan lokal yang hanya didukung pada kalangan atas.<sup>25</sup> Akan tetapi, dalam menghadapinya diperlukan kekuatan baru yang terkoordinasi secara modern yang dalam hal ini harus mengikutsertakan seluruh masa. Kalau kemudian terbentuk organisasi modern yang berskala nasional hal itu perlu dihubungkan dengan kejadian-kejadian politik lokal yang ada di Surakarta. Memobilisasi massa berarti mencari perimbangan kekuasaan yang secara tegas menanggulangi pengaruh Barat yang makin luas.

Seperti telah diketahui bahwa Surakarta merupakan tempat lahirnya organisasi Sarekat Islam pada tahun 1912. Pada awal munculnya Sarekat Islam, kraton belum menunjukkan bukti yang jelas tentang keterlibatannya dalam Sarekat Islam. Hubungan dengan kraton baru berkembang sesudah perhimpunan ini didirikan oleh pengusaha batik dari Surakarta. Pendirinya semula adalah R.M. Tirtoadisoerjo, orang Sala yang merantau keluar daerah. Ia pernah mendirikan Sarekat Dagang Islamiyah di Batavia pada tahun 1909 dan Sarekat Dagang Islam di Bogor pada tahun 1911. Awal tahun 1912. Tirtoadisoerjo secara resmi membentuk Sarekat Dagang Islam di Surakarta sebagai cabang dari Bogor.<sup>26</sup> Tetapi Tirtoadisoerjo cepat menghilang dan yang kemudian tampil sebagai pimpinan adalah Haji Samanhudi, seorang pengusaha batik terkemuka dari daerah Laweyan.

Walaupun asal mula pendirian Sarekat Islam masih agak kurang jelas alasan-alasan utama rupanya dari segi ekonomi dan etnosentrisme. Faktor yang disebut terakhir kiranya yang jauh lebih penting. Beberapa pakar berpendapat bahwa gerakan ini berpangkal pada saingan berat antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha Cina. J.S. Furnivall umpamanya menulis bahwa pada tahun 1892 akibat dari diganti kain lokal dengan kain impor yang harus dibeli dari pedagang perantau Tionghoa, mengakibatkan seluruh perdagangan batik beralih ke tangan para pedagang Cina, para pedagang batik di Surakarta membutuhkan Sarekat Islam.<sup>27</sup> Oleh karena itu organisasi Sarekat Islam walaupun lebih bersifat sosial-ekonomi namun tetap berlatar belakang politis. Munculnya organisasi itu juga merupakan suatu isyarat bagi kaum muslim bahwa telah tiba waktunya untuk menunjukkan kekuatannya.

Kelahiran Sarekat Islam ditandai dengan komitmennya yang kuat pada rakyat kecil dan golongan pedagang (kerakyatan). Sarekat Islam berusaha meningkatkan taraf perekonomian anggotanya. Selain itu juga berusaha untuk bangkit dari tekanan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Pada saat itu rakyat pribumi menduduki strata paling bawah dalam hukum kolonial. Kontrak yang menghina tersebut membuat ketidakpuasan Sarekat Islam. Karena nasionalisme Jawa pada hakekatnya merupakan reaksi terhadap dominasi orang asing dan campur tangan yang semakin banyak dalam adat istiadat Jawa, maka adalah suatu yang wajar apabila Sarekat Islam mencari dukungan pada Sunan dan pembesar-pembesar istana lainnya, untuk melawan pegawai-pegawai pemerintah yang banyak dipengaruhi oleh politik pemerintah Hindia Belanda.

Dari anggaran dasarnya dapat dirumuskan bahwa Sarekat Islam berusaha untuk mengembangkan jiwa berdagang; memberi bantuan pengajaran dan semua yang mempercepat naiknya derajat kaum pribumi; menentang pendapat-pendapat yang keliru tentang Agama Islam; berjuang demi keadilan dan kebenaran.

Setelah Sarekat Islam didirikan kota Solo pada tahun 1912, organisasi ini dengan cepat menjadi populer sebagai gerakan massa yang bertujuan memperbaiki kondisi ekonomi dan memperkuat kehidupan agama. Organisasi ini menggunakan agama sebagai pengikat anggota-anggotanya untuk membangkitkan *revivalisme* agama dan mengembangkan nasionalisme. Tidak diragukan lagi bahwa solidaritas keagamaan memperkuat gerakan ekonomi sendiri dan memperkuat tindakan-tindakannya dalam menghadapi ekspansi ekonomi bangsa asing yang memiliki modal kuat. Sarekat Islam bersikap menentang kapitalisme asing dan menghadapi baik eksploitasi maupun *kongkurensi*, khususnya pedagang Cina yang menguasai bahan baku batik. Alasan yang terakhir ini rupanya tidak disetujui oleh Korver karena produsen batik orang-orang Cina lebih sedikit dibandingkan dengan orang Jawa. Namun, ia tidak melihat bahwa pedagang Cina itu memiliki modal kuat sehingga selalu menang dalam setiap persaingan.<sup>28</sup>

Mengenai persaingan antara pedagang Cina dan Jawa, selanjutnya Korver mengatakan bahwa sebelum tahun 1890-an pedagang Cina sudah menguasai bahan batik, tetapi pedagang besar seperti H. Samanhudi sebenarnya dapat membeli bahan-bahan itu tanpa melalui perantara orang Cina. Selain itu, tidak terbukti adanya persaingan mati-matian melawan pedagang Cina karena kegiatan Sarekat Islam pada awalnya ditujukan untuk mendirikan koperasi.<sup>29</sup> Di Solo sudah lama terjadi persaingan antara pedagang Islam dengan firma *Sie Dhian Ho* yang berdagang bahan baku batik. Persaingan semakin keras situasi bertambah panas, dan kota Solo dijadikan arena pemboikotan, pemogokan, dan kerusuhan anti Cina.<sup>30</sup>

Sementara itu, sentimen demokrasi disebarluaskan oleh Sarekat Islam. Di sisi lain Sarekat Islam menolak kebiasaan dan adat istana yang bergaya feodal. Namun demikian, Sarekat Islam tetap mendekati Sunan agar mendapatkan bantuan untuk menghadapi dominasi asing. Kerjasama antara Sarekat Islam dengan istana (Sunan PB X) secara tepat digambarkan

sebagai suatu hubungan "pacar-pacaran".<sup>31</sup> Hubungan tersebut telah dimulai sejak September 1912 ketika 4 pegawai Susuhunan menjadi pemimpin Sarekat Islam. Puncaknya tercapai setahun kemudian pada kongres Sarekat Islam yang kedua tanggal 23 Maret 1913 yang diselenggarakan di Solo, tepatnya di Taman Sriwedani, taman hiburan dan pusat pertemuan yang termasuk wilayah Susuhunan.<sup>32</sup>

Pada tahun 1913, keanggotaan Sarekat Islam meluas bukan hanya terbatas pada kalangan bangsawan tetapi juga sudah sampai pada orang kebanyakan. Pada tahun itu anggota Sarekat Islam cabang Surakarta berjumlah lebih kurang 35.000 orang.<sup>33</sup>

Dapat ditambahkan bahwa perkembangan Sarekat Islam agak terhambat oleh kemajuan *Darmo Hatmoko*, sebuah perkumpulan bangsawan Mangkunegeran, pada awal tahun 1913. Perkumpulan ini bergerak di bidang sosial dan politik di pedesaan. Di dalam laporan kolonial disebutkan bahwa perkumpulan itu bertujuan membuang pengaruh-pengaruh yang telah disebarkan lebih dahulu oleh "Sarekat Islam-nya Sunan".<sup>34</sup> Rupanya perkumpulan ini ada hubungannya dengan maksud pemerintah kolonial untuk membuat imbalan kekuatan politik di pedesaan.

Suhu politik di beberapa daerah Keresidenan Surakarta menunjukkan perkembangan yang berbeda-beda. Salah satu contoh yang menyebabkan Sarekat Islam bertambah antipati terhadap Belanda adalah kejadian di perkebunan Trucuk, Klaten. Pada peristiwa itu seorang mandor menyulut seorang kuli perkebunan. Seketika itu juga anggota Sarekat Islam dan tujuh belas orang lainnya dengan bersenjata tongkat, sabit dan senjata tajam lainnya menyerang mandor dan mengancam akan membunuhnya. Akan tetapi mereka ditangkap dan dijatuhi hukuman kerja paksa antara satu setengah sampai enam bulan. Pada bulan April 1913 di daerah Klaten juga terjadi penganiayaan terhadap seseorang oleh sekitar 150 orang petani. Pelaku Penganiayaan diduga anggota Sarekat Islam, tetapi polisi tidak berhasil menangkap mereka.<sup>35</sup>



Oleh karena perkembangan situasi politik di daerah Surakarta semakin memburuk, Residen van Wijk mencegah perluasan Sarekat Islam. Selanjutnya untuk membatasi kegiatan Sarekat Islam, pemerintah hanya memberi kedudukan badan hukum (*rechtspersoon*) pada cabang-cabang Sarekat Islam, termasuk cabang Surakarta.

Kerjasama antara Sarekat Islam dengan elite istana berakhir karena faktor eksternal yang berupa tekanan dan campur tangan pemerintah kolonial, sedangkan faktor internal berupa pergeseran kepemimpinan. Tekanan terhadap Sunan dan terhadap Sarekat Islam yang dilakukan oleh van Wijk menandakan bahwa kekuatan Sarekat Islam sudah dikurangi, khususnya Sarekat Islam cabang Surakarta. Dalam Kongres Sarekat Islam lokal pada bulan April 1914, Cokroaminoto menggantikan H. Samanhudi sebagai anggota pusat Sarekat Islam. Sementara itu H. Samanhudi menjabat ketua cabang Sarekat Islam. Hal ini berarti hilangnya rasa hormat terhadap elite istana. Pimpinan pusat Sarekat Islam dipindahkan ke Surabaya karena Cokroaminoto bertempat tinggal di kota itu.

Dalam perkembangan selanjutnya, di daerah Surakarta menjadi tempat yang subur bagi tumbuhnya organisasi-organisasi sosial-politik, baik yang berskala nasional maupun lokal. Organisasi yang berskala nasional antara lain Budi Utomo, Sarekat Islam, PKI, PNI, Parindra, dan sebagainya. Sedangkan organisasi yang berskala lokal antara lain: Pakempalan Kawula Surakarta (PaKaSa), Pakumpulan Darah Dalem atau disebut Pakempalan Narpawandawa, dan Prukunan Pakempalan Politik (Surakarta (PPS)).

Munculnya organisasi-organisasi kebangsaan pertama di Indonesia berawal dari *vorstenlanden* bukan suatu hal yang mengherankan. Sekalipun dibandingkan dengan sebagian besar daerah lain di Jawa, wilayah kerajaan agak terbelakang dilihat dari sudut teknologi, tetapi daerah ini secara cultural paling tinggi perkembangannya. J. Th. Petrus Hlumberger<sup>36</sup> bahkan menyatakan bahwa daerah *vorstenlanden* merupakan "tempat jantung Jawa berdenyut", juga ditambah secara sosiologis



gagasan nasional untuk pertama kali muncul di kalangan penduduk di daerah kerajaan yang sangat terkenal sebagai tempat lahirnya jwanisme, tempat kebudayaan purba lebih menonjol daripada berbagai aliran keagamaan.

Bagi rakyat di daerah kerajaan maupun bagi banyak penduduk di tanah gubernemen di pulau Jawa, para raja terutama Sunan tetap diakui, paling sedikit secara simbolis menempati kedudukan sentral dari segala kewibawaan dan kekuasaan di Jawa. Sunan masih tetap dianggap sebagai raja tradisional yang sah di mata kebanyakan penduduk Jawa di seluruh Jawa Tengah dan tak kurang pentingnya adalah kedudukan Sunan sebagai Kepala Agama Islam (Panatagama). Meskipun mereka terbagi-bagi, daerah kerajaan ini adalah kenangan akan kemegahan masa lampau dan bekas kesatuan Kerajaan Mataram. Dengan demikian mereka merupakan tempat tumpuan perasaan nasionalisme Jawa yang sedang timbul, tumpuan keinginan untuk menegakkan kembali kemerdekaan Jawa. Menurut D.A.Rinkes yang dikutip oleh Larson, bahwa gagasan untuk merestorasi Kerajaan Mataram tidak pernah mati. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan cepatnya gerakan Sarekat Islam menyebar pada tahun 1912 dan 1913 dan terus mempengaruhi pemikiran kaum politik istana.<sup>37</sup>

Sebagai suatu komunitas, kraton tidak terpisahkan dari komunitas lainnya. Pada dasawarsa kedua abad XX banyak diantara bangsawan dan priyayi ikut terjun dalam gerakan nasional. Dihubungkan dengan Budi Utomo, nama yang sangat menonjol adalah R.M.A. Wuryaningrat, seorang bupati *nayaka* yang menjadi menantu Sunan Ia adalah cucu Sunan PB IX karena ibunya adalah putri Sunan PB IX atau kakak Sunan PB X.

Budi Utomo (BU) sebagai organisasi politik modern yang pertama berhasil menghimpun golongan *priyayi* dan melalui pengajaran Budi Utomo hendak mencapai kemajuan. Akan tetapi terhadap agama, organisasi ini bersikap netral.

Peranannya dalam Budi Utomo dimulai dari kedudukannya sebagai ketua Budi Utomo cabang Surakarta, kemudian pengurus besar Budi Utomo untuk masa bakti 1916-1921. Pada kongres berikutnya (1921) K.P.A. Hadiwidjojo terpilih sebagai ketua, akan tetapi pada tahun 1922 jabatan itu dilepaskan dan jabatan ketua diwakili oleh Radjiman Widyadiningrat, seorang *abdi dalem* berpangkat *kliwon*. Wuryaningrat terpilih lagi sebagai ketua Budi Utomo untuk masa bakti 1922-1925, kemudian untuk masa bakti 1933-1935, dan sesudah dokter Sutomo meninggal pada tahun 1938, Wuryaningrat menduduki jabatan ketua Parindra untuk masa jabatan 1939-1941.<sup>38</sup> pada tahun 1918 R.M.A. Wuryaningrat duduk dalam "*Commissie tot Herziening van de Staatsinriuchting van Nederlandsch-Indie*" di bawah pimpinan Prof. Mr. J. H. Carpentier Alting.<sup>39</sup>

Sementara itu pada tahun 1930 atas prakarsa K.P.A. Hadiwidjojo, R.M.A. Wuryaningrat Mr. K.R.M.T. Wongso Nagoro didirikanlah perkumpulan putra dan kerabat Sunan yang diberi nama Narpawandawa. Walaupun masih diikat oleh persamaan darah, karena yang dapat menjadi anggota perkumpulan itu adalah bangawan derajat satu sampai dengan derajat empat, namun adanya perkumpulan itu memperkuat kedudukan mereka. Hubungan dengan dunia di luar kraton dapat lebih mudah dilakukan sesudah perkumpulan itu menerbitkan majalah bulanan yang diberi nama Narpawandawa Surakarta. Pada tahun 1931 Putri Narpawandawa didirikan atas prakarsa G.R. Ayu Wuryaningrat dan G.R. Ayu Sasranegara.<sup>40</sup>

Narpawandawa mengadakan hubungan dengan Perkumpulan Kawula surakarta (P.K.S) dan membantu perkumpulan itu dengan pinjaman uang. Atas saran Narpawandawa di Surakarta didirikan sebuah komite lokal, yang disebut Pirukunan Pakempalan Surakarta (P.P.S) yang diharapkan dapat dijadikan badan perwakilan. P.P.S yang diketuai R.M.A. Wuryaningrat itu beranggotakan Budi Utomo Narpawandawa, Perkumpulan Darah Mangkunegaran, P. B. I. Pakempalan Politik Katolik Jawi, dan Perkumpulan Guru Kristen.

Pada tanggal 12 Juli 1938, P. P. S mengadakan rapat di Kanggotan dan Hadiprayan. Rapat dihadiri lebih kurang 1000

wakil dari berbagai organisasi sosial politik, antara lain: PPKI, Parindra, Narpawandawa, PKS, PKC, Al Islam, PSII, dan sebagainya. Pembicara yang tampil pada pertemuan itu seperti Dr. Sutomo, R. M. Pringgawinata dan Dr. K.R.T. Radjiman Widyadinigrat. Rapat menghasilkan mosi yang menuntut agar Dewan Perwakilan Bale Agung (sebuah Dewan Perwakilan Kasunanan), benar-benar berfungsi sebagai Perwakilan Rakyat.<sup>41</sup>

Di lain pihak Pangeran Hangabei pada tahun 1913 memasuki perkumpulan Sarekat Islam (S.I). Ia menerima tawaran pengurus besar Sarekat Islam untuk menjadi pelindungnya. Akan tetapi, karena Sunan tidak menyetujuinya kedudukan itu segera dilepaskannya. Dengan munculnya Sarekat Islam di Surakarta dalam masyarakat luas sampai jauh luar karesidenanan Surakarta berkembang gagasan yang sifatnya *mesianistis* dan *milenaristis* yang dikaitkan dengan beberapa nama tertentu, antara lain nama Sunan dan putra sulungnya.

### ***5.3 Perkembangan dalam Bidang Kebudayaan dan Pendidikan***

#### ***5.3.1 Bidang Kebudayaan***

Sunan PB X yang memerintah selama 46 tahun dan sebelumnya selama dua puluh lima tahun kedudukan sebagai putra mahkota banyak dihubungkan dengan tingkat peradaban yang tinggi, yang berlangsung di dalam kraton Surakarta. Peradaban yang halus ditandai dengan simbolisme yang semakin kompleks dan rumit dan dapat dilihat pada benda-benda, tingkah laku, sikap, serta macam bahasa yang dipergunakan menunjukkan adanya semacam sifat *barok* yang makin lama makin menonjol.

Sunan PB X juga identik dengan tokoh yang banyak membawa perubahan yang bersifat *progresif*, banyak menciptakan kemajuan lingkungan kraton Surakarta. Pribadi Sunan PB X adalah tipe penguasa Jawa yang mudah menerima

masuknya pengaruh asing sebagai salah satu unsur *modernisasi* di lingkungan kraton. Contohnya ketika Sunan mengadakan pesta ulang tahunnya, tata cara perayaan yang digunakan bukan secara adat Jawa atau Islam. Pesta ulang tahun tersebut menggunakan minuman brendi, toast, berjoged dengan seorang *tandhak*, serta berdansa. Pesta itu merupakan tata cara Barat yang dipakai untuk memeriahkan perayaan tersebut.<sup>42</sup>

Sunan juga banyak meminjam unsur-unsur Barat yang bersifat lahiriah dengan disesuaikan menurut selernya. Seperti menu makanan, pakaian, etiket pada waktu berpesta, arsitektur rumah yang mirip loji di puncak Argapura mendapat pengaruh Belanda, tetapi atapnya tetap bergaya bangunan Jawa. Selain itu, terdapat patung-patung Eropa yang dipasang sebagai hiasan di sekeliling pendapa Sasana Sewaka dan Sasana Handrawina. Sunan juga memanfaatkan produk *modernisasi* seperti penerangan listrik, radio, alat telepon, mobil, kereta api, kapal api, pembangunan jembatan, *tanggul tanggul*, dan sebagainya.

Administrasi pemerintahan juga diatur menurut contoh Barat dan dipusatkan di Kepatihan. Sebagai *Abdi dalem* masih melakukan pekerjaan di dalam kraton, misalnya Pangeran Kasumayuda menjabat kepala Paprentahan Kraton, Pangeran Hadiwajaya sebagai ketua Bale Agung, Pangeran Purbanagara sebagai komandan seluruh prajurit kraton, Pangeran Suryawijaya sebagai ajudan Sunan, dan Pangeran Kusumabrata bertugas mengurus sekolah-sekolah yang didirikan di lingkungan kraton.

Kraton mulai berlangganan berbagai macam surat kabar berbahasa Belanda, Melayu, dan Jawa. Seperti *Soerabajaasch Handelsblad*, *De Nieuwe Vorstenlanden*, *Sedia Utama*, *De Java Bode*, *Sinpo*, *Darmakanda*, *Bramartani* dan *Neratja*.

Sunan sebagai pelindung kebudayaan Jawa juga berusaha mempertahankan tradisi yang berlaku di dalam kedudukan seorang wanita, juga mengenai nilai religius-magis dan nilai-nilai lain yang berhubungan dengan kemegahan, kekuasaan,

serta kebesaran lewat upacara dan pesta. Selain itu juga nilai-nilai mengenai pandangan hidup yang terdapat dalam *serat-serat* lama termasuk *suluk* dan *primbon*.

Adanya penerbitan dengan huruf Jawa, seperti N.V. Budi Utama, Vogel Van der Heide. G. C.T Van Dorp & Co, Albert Ruscho, dan sebagainya membantu penyebarluasan isi *serat wulang* karangan para pujangga kraton. Pandangan hidup dan etika bangsawan kraton mulai dikenal oleh masyarakat luas, demikian pula berbagai macam segi-segi kehidupan di dalam kraton. Sehubungan dengan kegiatan ini, ada dua nama yang cukup terkenal sebagai penelitian naskah yang akan dicetak, yaitu R. Tanoyo dan Ki Padmasusastra.

### 5.3.2 Bidang Pendidikan

Sunan PB X bersikap terbuka terhadap peradaban Barat yang sejak awal abad XX makin pesat perkembangannya. Dalam bidang pendidikan dan pengajaran, Sunan mengirimkan putra-putranya ke sekolah rendah Europeeshe Lagere School (E.L.S) setempat dan memondokkan mereka pada keluarga Belanda. Sesudah tamat sebagian melanjutkan pelajarannya ke Hooger Burger School (H.B.S) di Semarang atau Bandung, bahkan ada yang dikirim ke Leiden. Mereka yang dikirim ke Nederland untuk belajar adalah: Pangeran Arya Natabrata, Pangeran Arya Jayakusuma, Pangeran Arya Kusumabrata dan Pangran Arya Natakusuma.

Sedangkan untuk putri-putrinya Sunan mengirim mereka untuk belajar Europeesche Lagere School (E.L.S) setempat dan sesudah tamat, mereka diberi pelajaran tambahan berupa pelajar keputrian, bertempat di dalam kraton dan diberikan oleh guru-guru berkebangsaan Belanda. Selain itu cucu-cucu Sunan juga ada yang menempuh pendidikannya di negeri Belanda. Para priyayi yang mampu dalam hal dan juga mengikuti langkah Sunan, yaitu menyekolahkan anak-anaknya ke negeri Belanda.

Besarnya perhatian terhadap pendidikan Barat mengakibatkan adanya orang-orang yang berhasil meraih gelar sarjana. Banyak diantara yang mengabdikan menjadi priyayi kraton, diantaranya adalah:

1. Mr. K.R.M.T. Wongsonagoro,
2. Mr. R.M.T. Pusponagoro,
3. Mr. R.T. Notonagoro (kemudian bergelar Prof. Dr. Mr. K.R.M. Aria Notonagoro)
4. Mr. R.M.Ng. Projowilopo (Prof. Mr. Ali Afandi)
5. Mr. Sunardi (Menantu K.P. Aria Suryobroto), dan masih banyak lagi lainnya.<sup>43</sup>

Di bidang lain, nama Mr. K.R.M.T. Wongsonagoro, K.P.A. Kusumadiningrat dan K.P.A. Cakraningrat dihubungkan dengan perluasan seni tari gaya Surakarta. Kusumadiningrat adalah saudara tua Sunan yang pada tahun 1917 masuk dalam gerakan "Indie Weerbaar" dan ikut beraudensi dengan Ratu Wihelmina. Ia adalah seorang pengamat theosofi yang terkemuka, banyak mendirikan sekolah-sekolah "Arjuna setingkat H.I.S (Holland Indlansche School). Terhadap perkumpulan seperti Narpawandawa dan Budi Utomo, ia bersikap simpatik dan banyak membantu.<sup>44</sup>

Mr. Wongsonagoro mendirikan kursus tari dengan nama "kridha wacana" yang sebagian pesertanya berasal dari kelas tertinggi. Kursus tari "yokyataya" di bawah pimpinan K.P.A. Kusumadiningrat berdiri pada tahun 1923. Latihan diadakan di pendapa Kusumadiningrat, pesertanya para murid H.I.S, M.U.L.O, A.M.S dan anak-anak kecil yang masih sangat muda. Sedangkan Pangeran Cakradiningrat memberikan latihan tari bagi para pemuda yang berdarah bangsawan dan anak-anak priyayi.

Sementara itu perkembangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran dapat ditinjau dari munculnya sekolah-sekolah di

daerah Surakarta. Antara lain munculnya sekolah H.I.S Kasatrian yang didirikan pada tahun 1910; H.I.S. Pamardi Putri, berdiri tahun 1917, bulan Januari dan Frobelschool Pamardi Siwi, berdiri pada tanggal 12 Agustus 1926. Ketiga sekolah tersebut adalah milik Sunan. Para siswa berasal dari putra-putri keluarga Sunan dan Sentana dalem. Biaya diambilkan dari anggaran belanja istana. Pelaksanaannya dari komisi pendidikan dan pengajaran istana yang diketuai oleh B.K.PH. Kusumabrata Semula guru-gurunya berasal dari pinjaman Gubernur, tetapi sejak tahun 1933 mulai mengangkat guru sendiri. Ketiga sekolah tersebut berada di lingkungan kraton.

Perkembangan selanjutnya, di luar istana (kraton) dan di daerah-daerah mulai didirikan sekolah-sekolah untuk kepentingan para *abdi dalem* dan para *pangreh praja*. Jenis sekolah yang berada di luar istana antara lain *E.L.S. (Europeesche Lagere School)* atau Sekolah Rakyat Belanda; Sekolah Rakyat Angka II; H.I.S. atau Sekolah Bumi Putra. Di samping sekolah tersebut mulai dikembangkan pula sekolah lanjutan. Sekolah lanjutan tersebut antara lain: *M.U.L.O (Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs)*, *A.M.S. (Algemeene Medelbare School)*; *Teccniche School* atau Sekolah Teknik, dan sebagainya.

Selain sekolah-sekolah yang telah disebut ada pula sekolah yang berdasarkank agama Islam, seperti *Mamba'ul Ulum*. Sekolah tersebut didirikan di halaman Masjid Besar oleh yayasan dalem Kasunanan. Lama pendidikan 11 tahun, yang dibagi menjadi 11 tingkatan kelas, yaitu:

- Bagian I kelas I-IV, termasuk bagian *ibtidaiyah*.
- Bagian II kelas V-VIII, termasuk bagian *Wusta*.
- Bagian III kelas IX-XI, termasuk bagian Ngulya.<sup>45</sup>

Para guru yang mengajar di *Mamba'ul Ulum* diambil dari *abdi dalem ulama* yang disebut *Mualim*. Para murid disebut dengan istilah *Mutakalim*, artinya murid. *Mamba'ul Ulum* diketuai oleh *Penghulu Tafsir Anom*. Selain yang berada di Masjid Besar Kraton, sekolah tersebut juga berdiri di

kabupaten-kabupaten sampai kelas IV. Setelah tamat dari sekolah *Mamba'ul Ulum* tingkat kabupaten dapat melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi di pusat atau Surakarta. Jumlah *Mamba'ul Ulum* di kabupaten ada 7 buah, yaitu di kabupaten Klaten, Sragen, Boyolali, Wanagiri, Surakarta, Kartasura, serta di Sukaharja<sup>46</sup> Berdasarkan kurikulum, murid-murid sekolah agama itu, selain menerima pelajaran tentang agama Islam, juga bahasa Jawa, bahasa Melayu, berhitung, ilmu kodrat, dan beberapa mata pelajaran lainnya. Tamatan sekolah ini bisa menjadi punggawa penghulu di kawedanan atau menjadi guru agama.<sup>47</sup> Sekolah yang berdasar agama Islam tersebut diwaktu selanjutnya bertambah lagi setelah munculnya Muhammadiyah.

Lembaga pendidikan yang berdasarkan agama Kristen dan agama lainpun mulai bermunculan, seperti *H.I.S* - Jebres; *H.I.S* - Sragen; *M.U.L.O* Villa - Perkes; *H.I.S* Klaten, dan lainnya. Kemudian ada pula jenis sekolah desa (*Vervolg school*)<sup>48</sup> dimana pembiayaannya diperoleh dari kerajaan, desa dan dari pemerintah Hindia Belanda. Untuk menunjang kegiatan pendidikan pada tahun 1924 didirikan lembaga *Bandha Pasinaon* yang dikenal dengan nama *Rijk Studie Fonds*, di Kapatihan.<sup>49</sup>



***Catatan Bab V :***

1. S. Yadi, "Ingkang Wicaksana Sunan Paku Buwana X", dalam *Suara Merdeka*, pada tanggal 28 Februari 1983.
2. Baca Darsiti Soeratman, *Kehidupan Dunia Kraton Surakarta 1830--1930* (Yogyakarta: Tamansiswa, 1989), hal. 1.
3. *Ibid.*
4. Radjiman, *Sejarah Surakarta Tinjauan Politik dan Sosial* (Surakarta: UNS, 1993), hal 92.
5. *Pangreh Pradja Bond*, 1938, hal. 124--125.
6. *Ibid.*, hal. 132.
7. Wahyu Purwiyastuti "Reorganisasi Peradilan Di Kraton Kasunanan Surakarta Tahun 1903", dalam *Lembaran Sejarah* Vol. 1 No.2 (Yogyakarta: Fakultas Sastra UGM, 1977), hal. 69.
8. Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1981), hal. 175.
9. Seohartono, *Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan 1830--1930* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hal. 75.
10. *Ibid.*, hal. 76.

11. Paku Buwana IX mempunyai putra cukup banyak dan calon penggantinya adalah anak ke -29. Baca Padmasoesastra, *Sejarah Dalem Pangiwa lan Panengen* (Semarang, Surabaya: G.C.T. Van Dorp & Co. 1902), hal. 178--191.
12. Diambil dari Darsiti Soeratman, *op. cit.*, hal.
13. G.P. Rouffeer, "Vorstenlanden", dalam *Adatrechtbundels*, No. 34 Seri D, terjemahan Muh. Husodo Pringgokusumo dalam judul "Sawapraja" (Mangkunegaran: Bekso Pustoko, 1983), hal. 23.
14. *Pangreh Pradja Bond* (Mangkunegaran: Reksa Pustaka, 1938). hal. 131.
15. C.Ch. van den Haspel, *Overwicht in Overleg. Hervormingen van Justitie, Grondgebruik en Bestuur in de Vorstenlanden op Java 1880 - 1930* (Dordrecht: Foris, 1985), hal. 166.
16. Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1990), hal. 325.
17. Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1995), hal. 143.
18. *Rijksblad Soerakarta* tahun 1918 No. 22 hal. 165--168.
19. M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991), hal. 227.
20. *Ibid.*, hal. 228.
21. *Ibid.*
22. *Soerabaiasch Handelsblad*, 1932, hal. 8--13.
23. Suhartono, *op. cit.*, hal. 78
24. Baca Sartono Kartodirdjo, "Peristiwa dan Tokoh dari Sejarah Pergerakan Nasional", dalam *Lembaran Sejarah* No. 2 (Yogyakarta: Fak. Sastra UGM, 1968), hal. 68--71).

25. Penerbitan Sumber-sumber Sejarah.
26. Baca Goerge D. Larson, *Masa Menjelang Reveolusi Kraton dan Kehidupan Politik Di Surakarta 1912--1942* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990), hal.41.
27. *Ibid.*
28. Baca Suhartono, *op. cit.*, hal. 80.
29. *Ibid.*
30. *Ibid.*, hal. 81
31. George D. Larson, *Op. Cit.*, hal. 66.
32. *Ibid.*
33. Suhartono, *Loc. cit.*
34. George D. Larson, *loc. cit.*
35. Suhartono, *loc. cit.*
36. *Ibid.*, hal. 41.
37. *Ibid.*
38. B.K.R.M.T.H. "Woerjaningrat, 25 Tahoen di Dalam Perdjoangan Politik", *Narpawandawa Surakarta* (t.k.: t.p. Juli, 1941), hal. 112--115.
39. *Ibid.*, hal. 116.
40. Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1978), hal. 320--321.
41. Radjiman, *op. cit.*, hal. 62--63.
42. Kuntowijoyo, "Politik Simbolis Paku Buwono X, 1900--1915: Simbol Personal dan Simbol Publik", *Makalah Kongres Nasional Sejarah* tahun 1996, hal. 21.

43. Darsiti Soeratman, "*Kehidupan Dunia Kraton Surakarta 1830-1939*" (Disertasi, UGM, 1989), hal. 516--517.
44. S. Sastrasoewignja, "Herinnengenaan B.R.P) H. Koesoemadiningrat", dalam *Djawa*, Desember 1992, hal. 318--320.
45. Radjiman, *op. cit.*, hal. 111.
46. *Ibid.*
47. Darsiti Soeratman, *op. cit.*, hal. 102.
48. K.R.M.H. Yosodipuro, *Karaton Surakarta Hadiningrat* (Surakarta: Sasana Pusatka, 1994), hal. 11.
49. *Ibid.*

## **BAB VI**

### **SIMPULAN**

Kerajaan Kasunanan Surakarta merupakan lanjutan dari kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram dipecah menjadi dua yaitu Kasunanan di Surakarta dan Kesultanan di Yogyakarta. Dengan dipecah menjadi 2 kerajaan maka secara ekonomi dan politis kekuatannya sangat berkurang. Hal ini memang yang diinginkan pemerintah kolonial untuk mengadakan kontrol secara intensif. Karena di Jawa, daerah Surakarta dan Yogyakarta merupakan pusat-pusat gerakan politis dan ekonomis. Di Surakarta pernah berdiri Sarekat Islam yang merupakan simbol gerakan nasional Islam yang paling awal. Di Yogyakarta pernah berdiri Muhammadiyah sebagai simbol gerakan modern Islam.

Surakarta yang dipakai sebagai nama kraton yang baru setelah pindah dari Kartasura. Sedangkan tempat tinggal Paku Buwono II adalah desa Sala. Namun ditinggalkan karena dan diganti menjadi Surakarta Hadiningrat. Kepindahan kerajaan dari Kartasura ke Surakarta ini erat kaitannya dengan kebiasaan di Jawa. Dimana seandainya suatu pusat kerajaan telah mengalami kehancuran akibat kebakaran maka harus dipindahkan, untuk menghindari malapetaka yang lebih besar.

Menurut J. Brandes nama Surakarta ternyata merupakan nama varian atau nama alias dari Jakarta yang pada masa lalu disebut Jayakarta. Surakarta berasal dari gabungan kata sura

berarti berani dan karta berarti sejahtera. Nama Surakarta sebagai nama kraton baru dimaksudkan sebagai imbingan dari nama Jakarta. Sebab Sunan Paku Buwono II memang mendambakan pusat kerajaan natinya setara dengan Jakarta yang dapat berkembang menjadi pusat perdagangan dan pemerintahan pada VOC. Berdasarkan alasan tersebut maka nama Kartasura dan Sala ditinggalkan bagi kraton yang baru ini. Nama Surakarta nampaknya tidak berbeda dengan nama Salakarta yang disebut-sebut dalam Serat Selasilah Para Leluhur Ing kadanugrejan Yogya dan Babad Mataram Salakarta. Dari kedua sumber dapat disimpulkan bahwa nama asli kraton dan kediaman Paku Buwono II yang baru memang Salakarta dan baru pada masa pemerintahan Sunan Paku Buwono III nama itu menjadi Surakarta.

Kerajaan Kasunanan Surakarta dalam prosesnya selalu terjadi gejolak diantara keluarga kerajaan. Hal ini memang disengaja oleh pemerintah kolonial untuk menunjukkan bahwa pemerintah kolonial selalu bertindak sebagai penengah dalam perselisihan keluarga tersebut. Karena begitu ada pemberontakan seperti pemberontakan Raden Mas Said dan Mangkubumi maka Sunan minta bantuan kepada Kompeni untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Penyelesaiannya selalu diadakan perjanjian yang membagi kerajaan menjadi wilayah lebih kecil.

Dalam struktur birokrasi kerajaan raja mempunyai kekuasaan sentral dalam wilayah kerajaan. Kedudukan dan kekuasaan raja diperoleh berdasarkan warisan. Kerajaan Surakarta Hadiningrat dipimpin oleh seorang raja yang bergelar sampeyan Dalam Inggang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Paku Buwono Senapati Ingalaga Ngabdul rahman Sayidin Panatagama Khalifatullah. Dengan gelar ini menempatkan raja pada kedudukan yang tinggi merupakan pusat kekuasaan dunia. Sebagai penguasa mikrokosmos (jagad kecil) dalam hal ini terdapat dalam diri sang raja, serta makrokosmos (jagad besar) yang berarti dunia. Raja adalah orang pertama dan terhormat di negaranya (Sampeyan Dalem Inggang Sinuhun

Kanjeng Susuhunan), dia juga sebagai pusat kehidupan masyarakat dan dunia (Paku Buwana). Disamping sebagai kepala pemerintahan, raja adalah panglima tertinggi angkatan perang (Senapati Ingalaga), juga sebagai ulama atau penata agama (Ngabdulrahman Sayidin Panatagama) Raja sebagai penguasa harus memerintah dengan hukum yang adil. Sifat raja juga dihubungkan dengan sifat Tuhan, nampak dengan dipakainya gelar Khalifatullah. Artinya raja sebagai wakil nabi harus dapat membawakan sifat-sifat nabi yang terpuji.

Hubungan antara raja dan rakyat adalah antara kawula dan gusti (hamba dan tuan) yang merupakan ikatan yang erat, akrab saling menghormati dan bertanggung jawab. Rakyat sebagai kawula menyerahkan segalanya termasuk jiwanya jika raja menginginkannya. Kekuasaan raja begitu tinggi sehingga raja dianggap sebagai dewa. Dalam struktur birokrasi raja menempatkan dirinya sebagai tokoh nomor satu baru disusul oleh patih dan punggawa kerajaan lainnya.

Sumbangan kerajaan tradisional Surakarta sangat besar dalam membesarkan kebudayaan nasional. Seperti pada masa pemerintahan Sunan Paku Buwono X yang selalu dihubungkan dengan tingkat peradaban yang tinggi. Peradaban yang halus ditandai dengan simbolisme yang semakin kompleks dan rumit, dapat dilihat pada benda-benda peninggalannya, sikap tingkah laku serta macam bahasa yang dipergunakan.

Sunan Paku Buwono X juga identik dengan tokoh yang banyak membawa perubahan yang bersifat progresif, banyak menciptakan kemajuan di lingkungan kraton Surakarta. Pribadi Sunan adalah tipe penguasa Jawa yang mudah menerima unsur budaya asing sebagai salah satu unsur modernisasi. Contohnya ketika Sunan mengadakan pesta, selalu dimasukkan unsur budaya Barat, seperti minum brandy, berjoget bersama dan lain-lain. Dalam bidang pakaian banyak diambil mode barat begitu juga menu makanan.

Dalam bidang administrasi pemerintahan mulai dilakukan pembagian pekerjaan berdasarkan keahliannya. Kepatihan

dijadikan sebagai pusat administrasi sedang kesunanan sebagai tempat mengontrol aktifitas kerajaan lainnya.

Dalam bidang pendidikan Sunan mengirimkan putra-putri kerajaan ke sekolah Belanda seperti ELS, HBS. Putra-putri raja dipondokkan di asrama-asrama Belanda tersebut. Setelah lulus dair sekolah, mereka dikirim ke negeri Belanda untuk melanjutkan pendidikan. Priyayi-priyayi di Jawa akhirnya mengikuti langkah tersebut dengan menyekolahkan di sekolah Belanda. Namun demikian budaya kerajaan masih terus diajarkan oleh pegawai-pegawai kerajaan.

Kota Surakarta atau kasunanan Surakarta telah memberikan sumbangan yang sangat besar pada masa kemerdekaan. Surakarta selalu dijadikan sebagai pusat rapat tokoh-tokoh kemerdekaan seperti Sutan Syahrir, Soekarno, Amir Syarifuddin, Gatot Subroto dan lain-lain.

Kasunanan Surakarta sebagai simbol kebesaran budaya Jawa pada masa sekarang telah memberikan corak yang sangat besar dalam khasanah budaya nasional sebagai hasil kebudayaan yang adiluhung. Untuk itulah pada masa sekarang perlu dibina dan dilestarikan hasil-hasil budaya kerajaan Kasunanan Surakarta sebagai aset bangsa untuk dinikmati oleh generasi yang akan datang.



## ***Daftar Pustaka***

- Abdullah, Taufik,  
1982 "Ke Arah Penulisan Sejarah Sosial Daerah"  
dalam *pemikiran Biografi dan Kesejahteraan:  
Suatu Kumpulan Prasaran Pada Berbagai  
Lokakarya*. Jakarta: IDSN.
- Alfian, T. Ibrahim,  
1981 "Mengapa Penulisan Sejarah Berubah",  
*Makalah* disampaikan pada Pekan Kegiatan  
Ilmiah Fak. Sastra, UGM, Yogyakarta 25--26  
November.
- Althof, WF  
1941 *Punika Serat Babad Tanah Djawi Wiwit Nabi  
Adam Dumugi 1647*, Leiden.
- Anderson, Benedict ROC  
1984 "Gagasan tentang Kekuasaan dan Kebudayaan  
Jawa", dalam Miriam Budiardjo, *Aneka  
Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*,  
Jakarta: Sinar Harapan.
- Budiman, Amen  
1989 "Dari Pleret Menuju Kartasura", *Wawasan* , 6  
Desember, Semarang.  
1989 "Pembangunan Kraton Minta Tumbal",  
*Wawasan*, 7 Desember, Semarang.

- 1989 "Solo Lahir Berkat Juru Nujum", *Suara Merdeka*, 14 Februari, Semarang.
- 1989 "Sulit Nian Tentukan Saat Lahirnya Kota Sala", *Wawasan*, 8 Desember, Semarang.
- "Geger Warisan Sejarah"  
1998 *Gatra* No. 33, tahun IV, Juli.
- Graaf, de H.J.  
1985 *Kerajaan-kerajaan Islam Pertama di Jawa, Kajian Sejarah Politik Abad ke-15 dan ke-16*, Jakarta: Grafiti Pers.
- 1986 *Puncak Kekuasaan Mataram, Politik Ekspansi Sultan Agung*, Jakarta: Garfiti Pers.
- 1987 *Disintegrasi Mataram Di Bawah Mangkurat I* Jakarta: Grafiti Pers.
- Haspel, C. Ch van der,  
1985 *Overwicht In Overleg Hervormingen van Justitie, Grodgebrauk en Bestuur In de Vorstenlanden op Java 1880--1930* Dordrecht: Foris.
- "Het 40 -  
1932 Jarig Regeeringsjubileum van S.D.I.W.I.S.K. Soesoehoenan Pakoeboewana X", dalam *Djawa* no. 1.
- Honben, Vincent J.H.  
1994 *Kraton and Kumpeni Surakarta and Yogyakarta* Leiden: KITLV Press.
- Kabar Paprentahan*, 1925, Surakarta.
- Kartodirdjo, Sartono  
1969 "Struktur Sosial dari Masyarakat Tradisional dan Kolonial", dalam *Lembaran Sedjarah* No. 4, Yogyakarta : Fakultas Sasdaya.
- 1976 "Metode Penggunaan Bahan Dokumenter", dalam Koentjaraningrat (ed.) *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.

- 1976 *Kepemimpinan dalam Sejarah Indonesia.*  
Yogyakarta: Balai Pembinaan Administrasi,  
UGM.
- 1977 *Sejarah Nasional Indoensia IV, Jakarta : PN.*  
Balai Pustaka.
- 1981 *Elite dalam Perspektif Sejarah.* Jakarta:LP3ES.
- Kota Yogyakarta 200 Tahun.*
- 1956 Yogyakarta: Panitia Peringatan Kota  
Yogyakarta.
- Koesoemadi,  
1939 "Soerakarta Adiningrat 200 Jaar", *Djawa*  
No. 3, Mei.
- Kuntowijoyo,  
1996 "Politik Simbolis Paku Buwana X 1900--1915 :  
Simbol Personal dan Simbol Publik", *Makalah*  
*Kongres Nasional Sejarah.*
- Kutoyo, Sutrisno  
1986 *Sejarah Ekspansi Pasukan Sultan Agung ke*  
*Batavia.* Jakarta: Proyek IDSN, Depdikbud.
- Kusumadilaga, M. Wibisono Rusmiputro  
T,th. *Perpindahan Kraton Kartasura ke Surakarta.*  
t.k.p: t.p.
- Larson, George D.,  
1990 *Masa Menjelang Revolusi Kraton dan*  
*Kehidupan Politik di Surakarta 1912--1942.*  
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Lekker kerker, C.  
1983 *Land en Volk van Java.* Groningen.
- Lev. Daniel S.  
1990 *Hukum dan Politik di Indonesia* Jakarta :  
LP3ES.

**Lombord, Dennys.**

1996 *Nusa Jawa: Silang Budaya Warisan Kerajaan-Kerajaan Konsentris.* Jakarta: PT. Gramedia.

**Moedjanto, G**

1985 *Konsolidasi Kedudukan Dinasti Mataram Lewat Pengembangan Bahasa Jawa.* Yogyakarta: Lembaga Javanologi.

1987 "Kepemimpinan dan Kekuasaan Dalam Budaya Jawa, Suatu Tinjauan Hisstoris", *Makalah Seminar*, diselenggarakan BKSNT dan Lembaga Javanologi Yogyakarta, 23 Desember.

1987 *Perseliran dalam Budaya Jawa.* Yogyakarta: Lembaga Javanologi.

**Moeljono, dkk.**

1980 *Monografi Surakarta.* Yogyakarta: Balai Penelitian Sejarah dan Budaya.

**Moertono, Soemarsaid**

1985 *Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

**Narpawandawa Surakarta**

1941

**Nitinegoro, Soemardjo**

1982 *Berdirinya Ngayogyakarta Hadiningrat.* Yogyakarta: Yayasan Pendidikan Tinggi Putra Jaya.

**Nitik Kparadjan, 1957.** Surakarta : Radyapustaka

**O'Malley, William Joseph**

1983 "Indonesia di Masa Malaise: Suatu Studi terhadap Sumatera Timur dan Yogyakarta di Tahun 1930-an", dalam *Prisma* no. 8. Jakarta: LP3ES.

- Onghokham  
1983 "Merosotnya Peranan Pribumi dalam Perdagangan Komoditi", dalam *Prisma* No. 8. Jakarta: LP3ES.
- Panitia Buku Peringatan Hari jadi ke-27 Pemda Kodya Surakarta 16 Juni 1946--1973, 1973.* Surakarta: Pemda Kodya.
- Panitia  
1939 *Serat Tus Pajang.* Surakarta.
- Pangreh Pradja Bond.* Mangkunegaran: Rekxa Pustaka.  
1938
- Pawarti Soerakarta.* Mangkunegaran: Rekxa Pustaka.  
1939
- Pemda Kodia Tingkat II Surakarta  
1997 *Kenangan Emas 50 Tahun Surakarta.* Surakarta: Murni Grafika dan STSI.
- Purwiyastuti, Wahyu  
1997 "Reorganisasi Peradilan di Kraton Kasunanan Surakarta 1903" dalam *Lembaran Sejarah* Vol. 1. Yogyakarta: Fakultas Sastra, UGM.
- Radjiman  
1987 *Sejarah Surakarta I.* Fak. Sastra UNS, Surakarta.  
1988 *Sejarah Surakarta II.* Surakarta: Fak. Sastra, UNS, Surakarta.  
1989 *Menelusuri Berdirinya Kota Surakarta.* Surakarta: Sebelas Maret University Press.  
1993 *Sejarah Surakarta Tinjauan Politik dan Sosial,* Surakarta: Fak. Sastra, UNS.
- Remmelink, Willem G.J.  
1983 *Babad Pertama Pemerintahan Pakubuwana II 1725--1733: Menurut Sumber Babad dan Sumber VOC.* Yogyakarta: Javanologi.

- Ricklefs, M.C.  
 1974 *Yogyakarta Under Sultan Mangkubumi 1746-1755*. Batavia: Albrecht & Rusche.  
 1991 *Sejarah Modern Indonesia*. Jakarta: Grafiti Press.
- Rijksblaad Soerakarta Tahun 1918*.  
 Rouffaer, G.P.  
 1931 "Vorstenlanden" dalam *Adatrecht-bundels*, Jilid XXXIV. Terjemahan M. Husodo Pringgokusumo, "Swapraja". Surakarta : Rekso Pustoko.
- Santoso, Nugroho Imam  
 1994 *Perubahan Sistem Pemerintahan Kraton Kasunanan Pasca Proklamasi (Masa Paku Buwono XII)*, Skripsi S-1. Surakarta: Fak. Sastra, UNS.
- Serat Perdjanjian Dalem Nata. Surakarta: Radya Pustaka
- Soekanto, Suryono dan Soleman B. Taneko  
 1981
- Hukum Adat Indonesia*. Yogyakarta: Rajawali. Soemardjan, Selo  
 1981 *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Terjemahan H.J. Koesoemanto. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Soenarko  
 1950 *Susunan Negeri Kita jilid I* . Djakarta: Djambatan.
- Soeratman, Darsiti  
 1989 *Kehidupan Dunia Kraton Surakarta 1830-1939*. Yogyakarta : Tamansiswa
- Soeyatno  
 1972 *Kolonialisme Barat dan Kemunduran Raja-raja Surakarta Abad XIX*. Surakarta: FKIS- IKIP Surakarta.

*Staatblaad van Nederlandsch - Indie*. Tahun 1847.

Suhartono

- 1991 *Apanage dan Bekel, Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830--1920*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- 1995 *Bandit-bandit Pedesaan di Jawa, Studi Historis 1850-1942*. Yogyakarta: Aditya Media.

Sutjipto, F.A.

- ..... *Struktur Birokrasi Mataram Zaman Kerta-Kartasura*. Yogyakarta: Fak. Sastra, UGM

Supriyono, Agustinus

- 1990 "Perjanjian 22 Juni 1930, Aneksasi Terakhir oleh Belanda atas Wilayah Kerajaan Surakarta" *Lembaran Sastra No. 13*. Semarang: Fak. Sastra, UNDIP.

Suratmin

- 1982 *Paku Buwana VI*. Jakarta: Proyek IDSN, Depdikbud.

Tiknopranoto dan Martosuwignya

T.th. *Sejarah Kitha Sala*. Surakarta: Pelajar.

Wignjosoebroto, Setandyo

- 1995 *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Winter, CF dan Ronggowarsito

- 1986 *Kamus Kawi-Jawa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Yadi, S.

- 1983 "Ingkang Wicaksana Sunan Pakubuwana X", dalam *Suara Merdeka*, tanggal 28 Februari.

Yosodipuro

- 1989 *Berdirinya Karaton Surakarta Hadiningrat atau Lahirnya Kota Sala*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.

- 1989 *Dumadosipun Karaton Surakarta Hadiningrat  
Inggih Lairipun Kitha Sala.* Surakarta:  
Sebelas Maret University Press.
- 1994 *Karaton Surakarta Hadiningrat.* Surakarta:  
Sasana Pustaka.
- ..... *Sejarah Perjuangan Sampeyan Dalem Inggang  
Sinuwun Kanjeng Susuhunan Paku Buwana VI  
Pahlawan Kemerdekaan Nasional Melawan  
Penjajah Belanda.*



